



PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN TASIKMALAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011-2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah, dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015;
- b. bahwa dalam kerangka upaya pencapaian visi, misi, dan program Bupati perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat, sehingga RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam hal terjadinya perubahan yang mendasar, rencana pembangunan Daerah dapat diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2011-2015, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4626);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2006 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 16);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 19);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 18);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011-2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2011) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
- 1.5 Sistematika Penulisan RPJMD

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

- 3.1 Kinerja Keungan Tahun 2006-2010 dan Tahun 2011-2013
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2011-2015
- 3.3 Kerangka Pendanaan

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

- 4.1 Permasalahan Pembangunan
- 4.2 Isu Strategis

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

- 5.1 Visi
- 5.2 Misi
- 5.3 Tujuan dan Sasaran

BAB VI. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 6.1 Strategi dan Kebijakan
- 6.2 Kebijakan Kewilayahan
- 6.3 Kebijakan Pendanaan Pembangunan

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- 7.1 Kebijakan Umum
- 7.2 Program Prioritas Bupati
- 7.3 Program Berdasarkan Misi

BAB VIII. INDIKATOR KINERJA DAERAH

- 8.1 Target Indikator Makro Kabupaten Tasikmalaya 2011-2016 dan Target Indikator Makro Perubahan Tahun 2013-2016
- 8.2 Target Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

BAB IX. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

9.1 Pedoman Transisi

9.2 Kaidah Pelaksanaan

BAB X PENUTUP

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Isi dan uraian RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 11
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT 277/2014

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 11 TAHUN 2014
TENTANG : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2011-2015.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahunan) dan perencanaan pembangunan tahunan yang sinergis antar daerah serta antara pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011. Sampai saat ini, RPJMD telah memasuki periode pelaksanaan tahun ketiga. Berdasarkan hasil evaluasi, ada beberapa hal perlu diubah sehingga mengharuskan dilakukannya Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015. Perubahan RPJMD dilakukan atas dasar: (1) perubahan target indikator makro diantaranya target

IPM, angka kemiskinan dan laju pertumbuhan penduduk; (2) perubahan terhadap format dan substansi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dan target pencapaian indikator kinerja RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015; (3) adanya penambahan SKPD yaitu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan perkembangan rencana perubahan SOTK Organisasi Perangkat Daerah; (4) penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031; (5) penyesuaian dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan akan menjadi dasar penilaian pada pertanggungjawaban di akhir masa periode pemerintahan. Oleh karena itu, perubahan penting dilakukan agar tercipta konsistensi antara perencanaan dan realisasi serta capaian yang akan menjadi substansi pertanggungjawaban Bupati dan Wakil Bupati pada akhir masa jabatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015 ini, akan menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015 disusun berdasarkan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para Calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

2. Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan kerangka berpikir, asumsi, dan metode ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
3. Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta menciptakan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan;
4. Atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*), kedua pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, serta desa, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
5. Sosio-Kultural, adalah perencanaan melalui pendekatan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 disusun melalui tahapan proses evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dalam kurun waktu tiga tahun yang dituangkan dalam Dokumen Review RPJMD, lalu dilakukan proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015 dilakukan melalui serangkaian FGD yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan terutama dengan OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya adalah :

1. Menetapkan visi, misi dan program pembangunan daerah jangka menengah
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi Jawa Barat serta dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya.

1.3 Dasar Hukum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015, berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

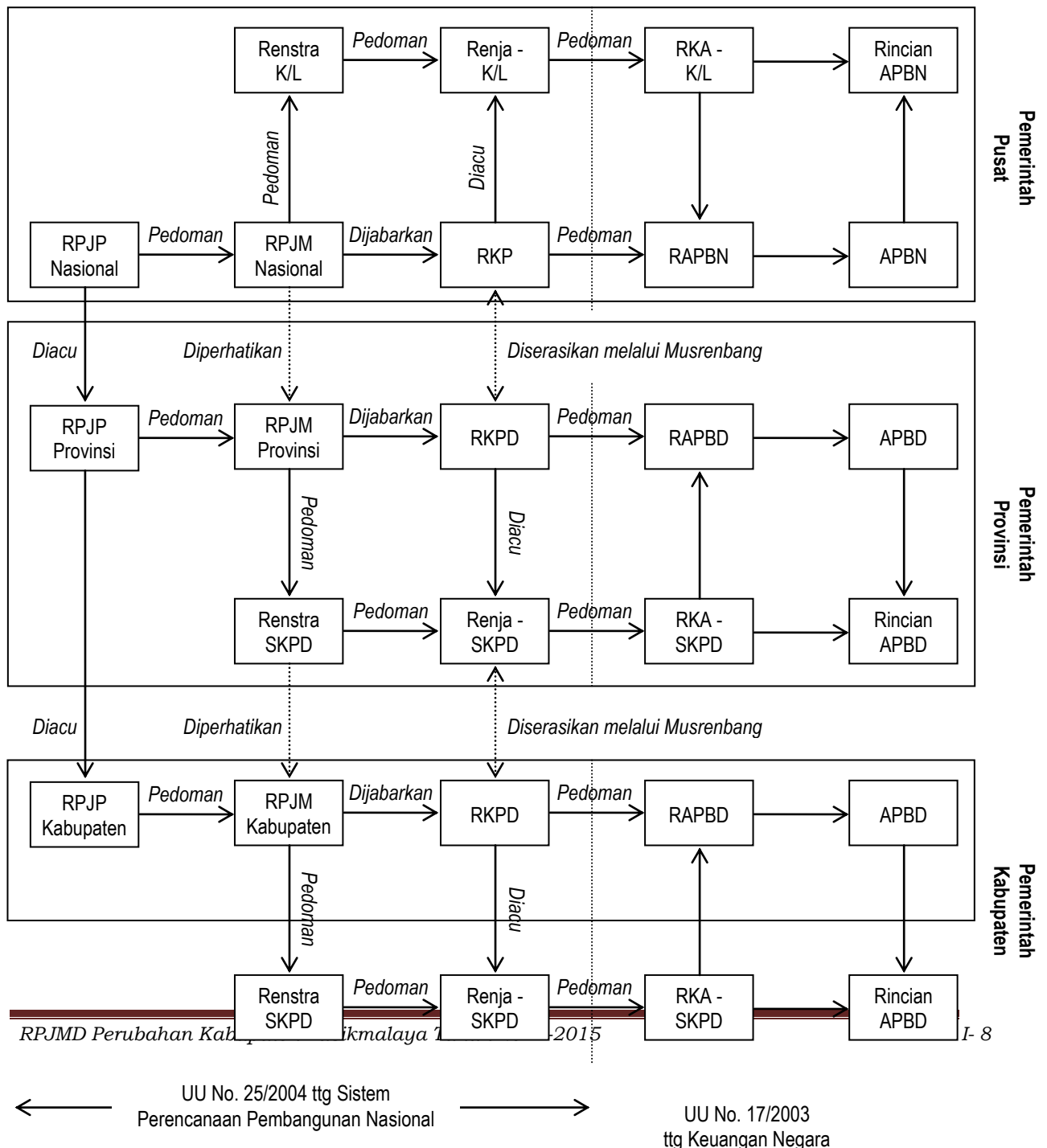
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031.

1.4 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 memiliki hubungan keterkaitan yang signifikan. Langkah perumusan dan penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan sub-sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Gambar 1.1

Hubungan RPJM Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015 selain berpedoman pada RPJPD, juga memperhatikan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Tasikmalaya dimaksudkan untuk: (a) menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan (b) menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kabupaten.

1.5 Sistematika RPJM Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
- 1.5 Sistematika Penulisan RPJMD

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

- 3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2006-2010 dan Tahun 2011-2013
- 3.2 Kerangka Pendanaan

- BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
 - 4.1 Permasalahan Pembangunan
 - 4.2 Isu Strategis
- BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
 - 5.1 Visi
 - 5.2 Misi
 - 5.3 Tujuan dan Sasaran
- BAB VI. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
 - 6.1 Strategi dan Kebijakan
 - 6.2 Kebijakan Kewilayahan
 - 6.3 Kebijakan Pendanaan Pembangunan
- BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
 - 7.1 Kebijakan Umum
 - 7.2 Program Prioritas Bupati
 - 7.3 Program Berdasarkan Misi
- BAB VIII. INDIKATOR KINERJA DAERAH
 - 8.1 Target Indikator Makro Kabupaten Tasikmalaya 2011-2016 dan Target Indikator Makro Perubahan Tahun 2013-2016
 - 8.2 Target Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
- BAB IX. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
 - 9.1 Pedoman Transisi
 - 9.2 Kaidah Pelaksanaan
- BAB X. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Letak Geografis

Kabupaten Tasikmalaya secara geografis terletak antara 07°2' 00" - 07°48' 00" Lintang Selatan dan 107°54' 00" - 108°26' 00" Bujur Timur. Sedangkan secara administratif Kabupaten Tasikmalaya berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya dan Kab. Ciamis.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Garut.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis.

Luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya keseluruhan adalah 2.708,82 km², dengan panjang garis pantai sekitar 54.5 km dan luas fishing ground sebesar 306 km². Secara administratif terdiri dari 39 Kecamatan, 351 desa. Tiga kecamatan mempunyai wilayah pesisir dan lautan dengan luas total 200,72 km² atau 7,41 % dari luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Luas setiap wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Luas Wilayah Administrasi per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	%
1	Cipatujah	238,95	8,82
2	Karangnunggal	153,73	5,68
3	Cikalong	160,47	5,92
4	Pancatengah	160,73	5,93
5	Cikatomas	144,60	5,34
6	Cibalong	61,67	2,28
7	Parungponteng	50,72	1,87
8	Bantarkalong	64,77	2,39
9	Bojongasih	49,83	1,84
10	Culamega	86,42	3,19
11	Bojonggambir	133,37	4,92
12	Sodonghilir	97,20	3,59

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	%
13	Taraju	64,10	2,37
14	Salawu	74,01	2,73
15	Puspahiang	57,37	2,12
16	Tanjungjaya	37,21	1,37
17	Sukaraja	47,42	1,75
18	Salopa	106,54	3,93
19	Jatiwaras	87,77	3,24
20	Cineam	72,18	2,66
21	Karangjaya	48,09	1,78
22	Manonjaya	42,81	1,58
23	Gunungtanjung	47,77	1,76
24	Singaparna	19,48	0,72
25	Mangunreja	28,08	1,04
26	Sukarame	16,47	0,61
27	Cigalontang	141,56	5,23
28	Leuwisari	30,03	1,11
29	Padakembang	19,92	0,74
30	Sariwangi	40,15	1,48
31	Sukaratu	42,81	1,58
32	Cisayong	50,69	1,87
33	Sukahening	29,45	1,09
34	Rajapolah	15,22	0,56
35	Jamanis	17,52	0,65
36	Ciawi	46,65	1,72
37	Kadipaten	43,18	1,59
38	Pagerageung	63,35	2,34
39	Sukaresik	16,55	0,61
Jumlah		2.708,82	100,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Tasikmalaya, 2013

2.1.2 Kondisi Topografis

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketinggian berkisar antara 0 – 2.500 meter di atas permukaan laut (dpl). Secara umum wilayah tersebut dapat dibedakan menurut ketinggiannya, yaitu : bagian Utara merupakan wilayah dataran tinggi dan bagian Selatan merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 – 100 meter dpl. Luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya menurut ketinggian dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.2
Luas Wilayah dan Ketinggian di Kabupaten Tasikmalaya

No	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (ha)	KETINGGIAN (mdpl)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Cipatujah	24.666,59	0 – 500
2	Karangnunggal	13.632,86	0 – 400
3	Cikalong	13.966,48	0 – 200
4	Pancatengah	20.184,68	100 - 350
5	Cikatomas	13.268,46	50 - 500
6	Cibalong	5.857,51	100 - 600
7	Parungponteng	4.726,92	150 - 700
8	Bantarkalong	5.983,46	250 - 750
9	Bojongasih	3.858,33	250 - 700
10	Culamega	6.832,34	200 - 750
11	Bojonggambir	16.928,66	100 - 950
12	Sodonghilir	9.310,90	200 - 900
13	Taraju	5.585,17	350 – 1.250
14	Salawu	5.049,20	500 – 1.450
15	Puspahiang	3.489,21	350 – 1.500
16	Tanjungjaya	3.669,12	250 - 600
17	Sukaraja	4.308,06	200 - 550
18	Salopa	12.176,42	200 -1.150
19	Jatiwaras	7.336,59	150 - 600
20	Cineam	7.878,99	100 - 950
21	Karangjaya	4.789,85	150 - 900
22	Manonjaya	3.941,23	200 - 500
23	Gunungtanjung	3.631,16	300 – 1.000
24	Singaparna	2.481,86	400 – 450
25	Mangunreja	2.964,14	400 - 600
26	Sukarame	1.991,91	350 - 450
27	Cigalontang	11.974,43	450 – 2.100
28	Leuwisari	5.325,94	450 – 1.450
29	Padakembang	3.770,37	400- 850
30	Sariwangi	4.965,81	500 - 900
31	Sukaratu	5.714,38	450- 2.200
32	Cisayong	5.940,13	400 – 1.800
33	Sukahening	2.842,14	500 – 1.800
34	Rajapolah	2.145,42	450 - 600
35	Jamanis	2.128,08	450 - 800

No	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (ha)	KETINGGIAN (mdpl)
(1)	(2)	(3)	(4)
36	Ciawi	4.531,28	500 -1.750
37	Kadipaten	4.578,70	600 – 1.550
38	Pagerageung	6.674,41	500 – 1.500
39	Sukaresik	1.780,53	400 - 500

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Tasikmalaya 2012

Dilihat dari ketinggiannya maka Kecamatan Leuwisari, Cigalontang, Sukaratu, Kadipaten, Pagerageung, dan Taraju merupakan kecamatan yang mempunyai ketinggian wilayah 1.000 diatas permukaan air laut (dpl), dan Kecamatan Cipatujah, Cikalong, dan Karangnunggal merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 – 100 m di atas permukaan air laut (dpl). Sedangkan kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Tasikmalaya berkisar antara 0% - 8% sampai dengan kemiringan > 40 %, untuk luas wilayah kemiringan masing-masing kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.3
Luas Wilayah Menurut Kemiringan Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Kemiringan (Ha)				
		0-8%	8-15%	15-25%	25-40%	> 40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Cipatujah	1.039,78	3.718,75	4.780,55	4.369,53	10.556,84
2	Karangnunggal	667,82	4.597,23	2.447,15	2.077,01	4.155,14
3	Cikalong	973,14	1.109,31	4.394,54	4.210,19	3.374,87
4	Pancatengah	1.221,61	2.695,72	7.636,24	4.681,89	3.761,36
5	Cikatomas	275,64	1.441,56	1.804,14	2.890,61	7.102,18
6	Cibalong	122,85	230,01	498,27	471,37	4.513,25
7	Parungponteng	116,98	776,36	1.574,87	1.541,98	1.030,00
8	Bantarkalong	796,14	914,50	1.625,44	1.210,51	1.453,39
9	Bojongasih	108,79	859,23	1.021,30	860,98	1.035,00
10	Culamaga	106,67	378,24	812,25	612,75	4.355,85
11	Bojonggambir	216,21	680,73	4.154,12	2.033,06	7.952,48
12	Sodonghilir	84,81	913,17	2.184,46	1.945,84	4.782,93
13	Taraju	139,21	248,70	2.637,32	1.597,10	1.245,76
14	Salawu	587,92	292,46	1.614,86	1.647,10	1.959,39
15	Puspahiang	24,50	71,40	1.224,76	1.263,28	1.925,50
16	Tanjungjaya	212,50	701,09	1.591,92	1.272,50	37,50
17	Sukaraja	58,81	93,76	2.908,54	1.538,88	91,39
18	Salopa	29,65	2.049,39	3.773,48	3.244,52	2.023,31
19	Jatiwaras	92,24	1.307,88	3.494,51	2.804,60	1.200,00
20	Cineam	617,85	942,38	1.459,52	1.753,13	3.128,11
21	Karangjaya	236,84	354,75	720,25	591,74	2.881,98
22	Manonjaya	137,98	110,87	2.421,29	877,08	923,61

No.	Kecamatan	Kemiringan (Ha)				
		0-8%	8-15%	15-25%	25-40%	> 40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23	Gunungtanjung	839,71	620,00	210,00	924,09	1.729,63
24	Singaparna	1.034,37	697,04	153,80	46,20	13,40
25	Mangunreja	557,53	525,00	747,76	710,06	125,00
26	Sukarame	523,03	608,32	972,98	323,94	15,02
27	Cigalontang	208,77	584,16	2.179,54	3.283,33	6.370,39
28	Leuwisari	1.203,74	1.428,51	397,47	758,96	671,65
29	Padakembang	950,00	1.305,00	798,03	731,19	229,63
30	Sariwangi	850,00	475,00	650,51	434,64	1.675,00
31	Sukaratu	910,00	450,00	724,53	618,27	1.737,32
32	Cisayong	1.680,00	370,00	82,00	484,33	2.216,72
33	Sukahening	94,00	1.230,00	491,37	192,28	1.201,26
34	Rajapolah	497,53	668,65	148,81	946,50	66,28
35	Jamanis	848,00	697,30	9,00	5,70	239,57
36	Ciawi	325,00	1.375,00	577,24	696,69	1.550,00
37	Kadipaten	300,00	550,00	622,64	1.615,57	1.650,00
38	Pagerageung	300,00	2.235,00	2.664,17	297,80	1.450,00
39	Sukaresik	450,00	642,70	357,40	153,70	146,08
Jumlah		19.439,62	38.949,17	66.567,03	55.718,90	90.576,79
Prosentase		7,17	14,36	24,54	20,54	33,39

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Tasikmalaya 2012

Tabel 2.3 tersebut di atas, menunjukkan bahwa kondisi kemiringan lahan di Kabupaten Tasikmalaya berturut-turut yaitu: Sangat Curam (>40%) sebesar 33,39% dari luas Kabupaten Tasikmalaya, Agak Curam (15 % - 25 %) sebesar 24,54 %, Curam (25 % - 40%) sebesar 20,54 %, Landai (8 % - 15 %) sebesar 14,36 %, dan Datar (0 % - 8 %) sebesar 7,17% dari luas Kabupaten Tasikmalaya. Dari data kemiringan lahan terlihat bahwa sebagian besar bentang alam Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh bentuk permukaan bumi agak curam sampai dengan curam yaitu sebesar 78,47% kondisi kemiringan lahan tersebut kurang menguntungkan untuk pengembangan prasarana dan sarana wilayah. Sedangkan kemiringan lahan yang sangat menunjang untuk pengembangan permukiman perkotaan hanya sebesar 21,53% dari total luas kabupaten, luasan tersebut umumnya terdistribusi di sekitar kota-kota kecamatan.

2.1.3. Fisiografi dan Bentuk Wilayah

Berdasarkan peta kelerengan dan pengecekan ke lapangan dapat dilihat fisiografi dan bentuk wilayah di Kabupaten Tasikmalaya, yang menunjukkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas grup Marin (M), Fluvio Marin (B), Aluvial (A), Sistem Dataran (Plain system), Sistem Perbukitan (Hilly System), dan Sistem Vulkanik (V; Volcanik System). Sebagian besar daerah penelitian terdiri dari fisiografi Vulkanik. Bentuk wilayah sebagian besar bergelombang sampai berbukit, kecuali di Kecamatan-kecamatan bagian Utara bentuk wilayah berbukit sampai bergunung.

Kabupaten Tasikmalaya yang sebagian besar wilayahnya merupakan tanah darat/tanah bukan sawah dan selebihnyamerupakan sawah. Kabupaten Tasikmalaya di wilayah dataran rendah mempunyai temperatur umumnya 34°C dengan kelembaban 50 %. Sedangkan pada daerah dataran tinggi mempunyai temperatur 18° - 22° C dengan kelembaban berkisar antara 61 % - 73 %. Curah hujan rata-rata per tahun 2.171,95 mm dengan jumlah hari hujan efektif selama satu tahun sebanyak 84 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November, dengan musim hujan terjadi antara bulan Oktober dan musim kemarau terjadi antara bulan Juni-September.

Pengelompokkan daerah hujan berdasarkan ketinggian curah hujan pada masing-masing wilayah di Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah dengan curah hujan antara 2500-3000 mm/tahun meliputi Kecamatan Sukaraja, Cibalong, Salopa, Pagerageung, Ciawi, dan Jamanis.
- b. Wilayah dengan curah hujan antara 3000-3500 mm/thn meliputi: Kecamatan Cipatujah, Bantarkalong, Karangnunggal, Salopa, Sodonghilir, Cineam, dan Manonjaya.
- c. Wilayah dengan curah hujan antara 3500-4000 mm/thn meliputi Kecamatan Bojonggambir, Sodonghilir, Singaparna, Cisayong, Rajapolah, Cikalong, Pancatengah, Cikatomas, sebagian Pagerageung.
- d. Wilayah dengan curah hujan di atas 4000 mm/thn meliputi Kecamatan Taraju, Salawu, Cigalontang, Leuwisari, dan Cisayong.

2.1.4. Aspek Demografi

Secara demografis Jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin serta pengelompokan umur berdasarkan usia sekolah merupakan beberapa statistik penting yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan penyusunan perencanaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta rencana intervensi program dalam berbagai sektor seperti perencanaan tingkat kebutuhan pangan, kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur wilayah.

Capaian pertumbuhan penduduk Kabupaten Tasikmalaya selama 2 tahun terakhir (tahun 2012-2013) mencapai 1,00 % dari 1.716.178 jiwa pada tahun 2012 menjadi 1.738.011 jiwa pada tahun 2013, sedangkan untuk laju pertumbuhan penduduk tahun 2013 adalah sebesar 1,3%. Jika melihat struktur usia penduduk yang mayoritas usia produktif dan percepatan pembangunan ibukota diperkirakan pertumbuhan penduduk Kabupaten Tasikmalaya akan lebih meningkat, sehubungan dengan pertumbuhan kawasan perkotaan yang menjadi daya tarik terjadinya urbanisasi. Selengkapnya jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya menurut jenis kelamin disajikan pada Tabel 1.5 berikut ini :

Tabel 2.4
Penduduk Kabupaten Tasikmalaya
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2013

Tahun	Jumlah Penduduk		Total	Sex Ratio	LPP
	Laki-laki	Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	835.052	840.492	1.675.544	99,35	0,88
2011	843.346	849.086	1.692.432	99,32	1,00
2012	855.179	860.999	1.716.178	99,32	1,4
2013	866.058	871.953	1.738.011	99,32	1,3

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya 2013

Dari hasil proyeksi penduduk di Kabupaten Tasikmalaya terlihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013 sebanyak 1.738.011 orang, dengan penduduk laki-laki sebanyak 866.058 orang atau sebesar 49,83 % dan penduduk perempuan sebanyak 871.953 orang atau sebesar 50,17 %.

Secara total, sex ratio penduduk Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2013 adalah sebesar 99,32 yang artinya jumlah penduduk laki-laki 0,68 persen lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

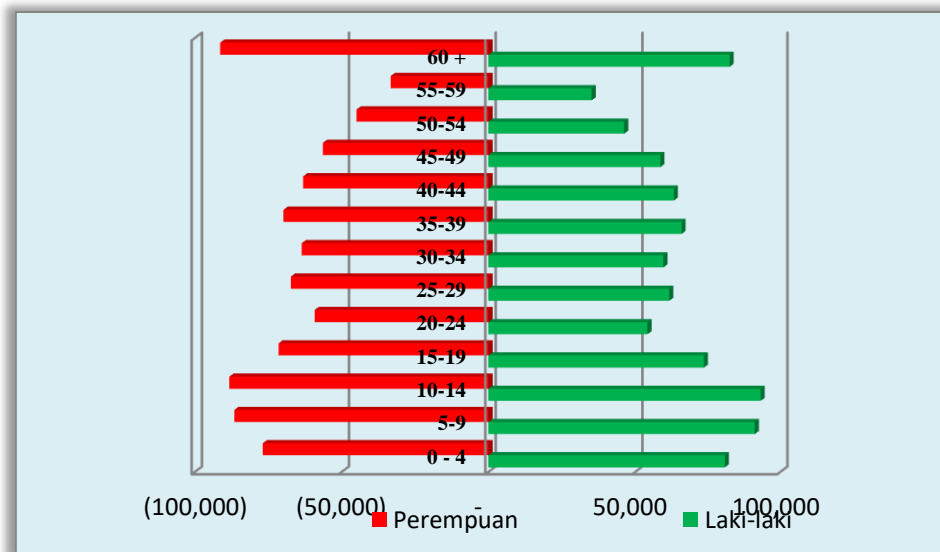
Tabel 2.5.
Jumlah Penduduk Per Kelompok Umur Menurut Jenis Kelamin
Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 4	80.848	76.852	157.700
5 - 9	91.176	86.541	177.717
10-14	93.231	88.242	181.473
15-19	73.661	71.468	145.129
20-24	54.176	59.192	113.368
25-29	61.665	67.276	128.941
30-34	59.649	63.570	123.219
35-39	65.903	69.777	135.680
40-44	63.292	63.081	126.373
45-49	58.597	56.404	115.001
50-54	46.212	44.929	91.141
55-59	35.163	33.289	68.452
60 +	82.485	91.332	173.817
Jumlah	866.058	871.953	1.738.011

Sumber :BPS Kabupaten Tasikmalaya 2013

Dari gambaran diatas, dapat kita lihat bahwa komposisi penduduk Kabupaten Tasikmalaya merupakan penduduk usia produktif dimana penduduk usia (0-14) tahun sebanyak 29,74 persen, penduduk dengan usia 60 tahun ke atas sebanyak 10 persen dan penduduk usia (15-59) tahun sebanyak 60,26 Persen. Hal ini memberikan indikasi bahwa permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Tasikmalaya merupakan pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian serius. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya jumlah mereka yang berusia produktif, oleh karena itu upaya-upaya untuk menciptakan lapangan kerja baru harus lebih ditingkatkan.

Gambar 2.1
Piramida Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013
Berdasarkan Hasil Proyeksi



Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya 2013

Selanjutnya penghitungan penduduk usia produktif dan tidak produktif juga erat kaitannya dengan rasio beban ketergantungan (*Burden of Dependency Ratio*). Rasio beban ketergantungan merupakan perbandingan antara penduduk yang berusia 0-14 tahun dan penduduk 65 tahun keatas dengan penduduk yang berusia 15-64 tahun. Dengan demikian rasio ketergantungan pada dasarnya menyatakan berapa banyak penduduk yang dianggap sebagai tidak/belum produktif dibandingkan dengan penduduk yang berada pada usia produktif.

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa rasio ketergantungan anak Kabupaten Tasikmalaya tahun 2013 sebesar 49,35 persen, dan rasio ketergantungan lanjut sebesar 16,60 persen atau secara keseluruhan angka beban ketergantungan Kabupaten Tasikmalaya sebesar 65,95 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa untuk setiap 100 orang usia produktif harus menanggung sebanyak 66 orang yang tidak/belum produktif.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat dicerminkan dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menyajikan ukuran kemajuan pembangunan yang lebih memadai dan lebih menyeluruh daripada ukuran tunggal pertumbuhan ekonomi (PDRB perkapita). Human Development Report mengelompokkan tingkat pembangunan manusia negara-negara menjadi tiga golongan, yaitu (1) rendah (0 sampai 49); (2)

menengah (50 sampai 79), dan (3) tinggi (80 dan lebih). Laporan Pembangunan Manusia Indonesia mengubah penggolongan untuk daerah di Indonesia menjadi: “tinggi” (65 ke atas), “menengah” (60 sampai 65) “rendah” (dibawah 60). Selain IPM, tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dicerminkan oleh laju pertumbuhan penduduk, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan PDRB/PDRB per kapita. Sebagai gambaran, tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada capaian indikator makro 3 (tiga) tahun pelaksanaan APBD 2011-2013 seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6.

Indikator Makro Pencapaian Visi dan Misi

NO	INDIKATOR MAKRO	2011	2012	2013
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,18	72,93	73,12
	<i>Angka Harapan Hidup (th)</i>	68,26	68,30	68,42
	<i>Rata-Rata Lama Sekolah (th)</i>	7,17	7,24	7,31
	<i>Angka Melek huruf (%)</i>	99,15	99,22	99,23
	<i>Daya Beli (Konsumsi/kapita/tahun) (Rp)</i>	630.050	638,558	639.504
	<i>Indeks Pendidikan</i>	82,04	82,25	82,40
	<i>Indeks Kesehatan</i>	72,10	72,16	72,36
	<i>Indeks Daya Beli</i>	62,41	64,37	64,59
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.692.432	1.716.178	1.738.011
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,00	1,4	1,3
4	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) & % thd Penduduk	222.384	211.598	201.200
	<i>Proporsinya thdp jumlah penduduk total</i>	13,14	12,36	11,6
5	<i>PDRB (berlaku) (Rp. Trilyun)</i>	12,79	13,93	15,00
6	<i>Laju Pertumbuhan Ekonomi (konstan 2000)</i>	4,27	4,32	4,17
7	<i>PDRB Per kapita (berlaku) (Rp.)</i>	7.376.696	8.211.479	8.709.660,76
8	Jumlah Penduduk yang bekerja (Jiwa)	677.453	899.041	900.177
9	Proporsi jumlah penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk total (%)	40,03	52,51	51,79
10	Pengangguran Terbuka (%)	8,29	7	6,46

Sumber : LKPJ 2012-2014

Jika dilihat dari pencapaian IPM tahun 2013 serta yang dijadikan perbandingannya adalah kabupaten/kota se-Indonesia, Kabupaten Tasikmalaya termasuk dalam kategori tinggi (65 ke atas). Pencapaian indikator makro tidak hanya merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, akan tetapi merupakan kinerja bersama antara pemerintah propinsi, masyarakat, serta swasta. Hal ini terkait dengan paradigma baru Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Adalah menjadi tugas pemerintah bagaimana memobilisasi peran-peran komponen lain diluar pemerintah daerah, bagaimana memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dan mandiri serta menarik investasi swasta.

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh pencapaian IPM mengalami peningkatan 0,19 poin dari 72,93 poin tahun 2012 menjadi 73,12 poin pada tahun 2013, dengan tingkat capaian 100,27% termasuk kategori sangat baik. Indeks Pendidikan dari rencana sebesar 82,24 poin realisasinya sebesar 82,40 poin, tingkat capaiannya sebesar 100,19% termasuk kategori sangat baik. Indeks Kesehatan dari rencana sebesar 72,43 poin realisasinya mencapai 72,36 poin, tingkat capaiannya sebesar 99,90% termasuk kategori sangat baik. Indeks Daya Beli dari rencana sebesar 64,09 poin realisasinya sebesar 64,59 poin, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100,78 % termasuk kategori sangat baik.

Dari rumpun indikator kependudukan dan ketenagakerjaan, tingkat capaian jumlah penduduk sebesar 98,85%, yaitu dari estimasi target sebesar 1.718.294 jiwa realisasinya sebesar 1.738.011 jiwa, termasuk kategori sangat baik. Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk belum mencapai target dari rencana 0,8 % realisasinya mencapai 1,3% termasuk kategori kurang baik sehingga hal ini memerlukan penanganan dari berbagai pihak terutama dalam upaya untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja tingkat capaiannya sebesar 115,65 %, yaitu dari rencana sebesar 778.387 jiwa realisasinya sebesar 900.177 jiwa, termasuk kategori sangat baik. Demikian pula halnya dengan proporsinya terhadap jumlah penduduk tingkat capaiannya sebesar 114,32% yaitu dari rencana 45,30 % realisasinya sebesar 51,79 % termasuk kategori sangat baik.

Kebijakan strategi dalam upaya mendukung tujuan pembangunan perhitungannya berdasarkan capaian indikator – indikator indeks pembangunan manusia (IPM). Indikator kesehatan diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH), namun karena indikator ini sendiri memiliki keterkaitan dengan variabel kesehatan lainnya, seperti angka kesakitan (*Morbiditas*), angka kematian (*Mortalitas*), pelayanan dasar kesehatan, sanitasi perumahan dan lingkungan serta variabel lainnya, maka analisis terhadap variabel-variabel kesehatan ini dapat menjadi bahan menunjang dalam menggambarkan kondisi pembangunan manusia diwilayah tersebut.

Demikian pula dengan variabel pendidikan, selain angka melek huruf (AMH), tingkat pendidikan penduduk, partisipasi penduduk dalam pendidikan juga akan mempertajam analisis terhadap hasil pembangunan manusia. Pada variabel ekonomi, selain kemampuan daya beli masyarakat, tampaknya perlu pula mengungkapkan pendapatan perkapita, distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat dan pola konsumsi rumah tangga maupun individu.

Disparitas pembangunan manusia di Kabupaten Tasikmalaya menurut kecamatan dapat dikelompokkan ke dalam wilayah-wilayah yang memiliki kesamaan karakteristik sosial maupun ekonomi.

Aspek sosial yang dapat diamati dari masing-masing kelompok wilayah antara lain angka melek huruf (AMH). AMH dapat dijadikan indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan terutama pembangunan manusianya, karena melalui kemampuan membaca dan menulis diharapkan masyarakat dapat menyerap berbagai informasi penting dan mampu mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Hal ini bermanfaat bagi peningkatan kemampuan dalam berusaha dan meningkatkan pengetahuan tentang cara berpikir kreatif, inovatif sehingga mempunyai peranan penting dalam berpartisipasi dilingkungan masyarakat. Dengan demikian AMH secara eksplisit dapat mencerminkan kualitas SDM di wilayah yang bersangkutan.

Tinggi rendahnya AMH merupakan implikasi dari tingkat pendidikan masyarakat. Dengan pertimbangan program “WAJAR DIKDAS“ 9 tahun, indikator keberhasilan bidang pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk yang mampu menyelesaikan jenjang pendidikan SLTP-nya.

Suatu wilayah dikatakan memiliki SDM dengan kualitas yang relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya dilihat dengan bekal pendidikan yang dimiliki penduduk wilayah ini. Kondisi ini tampaknya terjadi dipengaruhi oleh ketersediaan sarana maupun prasarana fisik yang relatif lebih lengkap, termasuk akses terhadap kegiatan ekonomi ditambah pembangunan ekonomi yang lebih pesat.

Kondisi ini memacu produktivitas tenaga kerja yang ada, implikasinya pendapatan masyarakat meningkat yang pada gilirannya mempermudah akses terhadap pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sosial lainnya.

Kondisi kesehatan masyarakat, yang juga digunakan untuk memantau hasil pembangunan manusia merupakan hasil interaksi dari banyak faktor. Faktor-faktor lain tersebut antara lain, faktor lingkungan, keadaan sosial budaya (misalnya, tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang berpegang teguh pada tradisi yang menghambat modernisasi), kondisi ekonomi dan faktor genetik.

Faktor lingkungan, antara lain dapat dilihat dari kualitas dan fasilitas fisik perumahan termasuk didalamnya sanitasi perumahan dan lingkungannya, ketersediaan air bersih, tempat pembuangan hajat/tinja dan kondisi fisik perumahan (misalnya: jenis lantai, atap dan dinding) memiliki hubungan yang sangat erat terhadap kondisi kesehatan masyarakat.

Banyak ditemui di daerah-daerah dengan kondisi perumahan dan lingkungan yang tidak memadai, penyakit diare serta ISPA menyerang penduduk, khususnya anak-anak. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hidupnya, sehingga harapan untuk membentuk SDM yang tangguh dan handal di masa mendatang akan mengalami hambatan.

Perbedaan status daerah perkotaan dan pedesaan tampaknya turut mempengaruhi kondisi umum sanitasi perumahan dan lingkungan setempat. Kebutuhan akan usaha sanitasi di perkotaan akan berbeda dibanding pedesaan.

Keadaan ekonomi dan tingkat penghasilan yang masih rendah merupakan hambatan utama terhadap berhasilnya usaha peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui perbaikan sanitasi lingkungan. Namun hal ini bukan berarti penduduk yang berpenghasilan relatif tinggi akan terlepas dari masalah ini. Pendidikan yang relatif rendah mengakibatkan perilaku hidup sehat masih belum tertanam dalam kehidupan masyarakat.

Begitupun tradisi atau kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membuang hajat disembarang tempat, agaknya cukup sulit untuk diubah.

Kondisi perumahan dan lingkungan yang tidak sehat secara umum akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Implikasinya angka morbiditas akan meningkat. Angka morbiditas yang tinggi memiliki kontribusi yang besar terhadap angka kematian. Indikator kematian yang dapat dipantau secara berkesinambungan adalah Angka Kematian Bayi (AKB).

Guna keperluan pemantauan hasil pembangunan manusia, AKB yang tinggi mencerminkan banyak hal. Rendahnya tingkat penggunaan maupun pelayanan kesehatan, kekurangan gizi, kontaminasi lingkungan serta rendahnya pendidikan penduduk merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi AKB. Oleh sebab itu, upaya untuk menurunkan AKB adalah melalui peningkatan pendidikan bagi penduduknya. Diharapkan budaya patrilineal, yang memprioritaskan pendidikan anak laki-laki di banding perempuan, yang masih dianut sebagian masyarakat dapat di hilangkan. Dengan demikian kesenjangan kualitas SDM antara wanita dan pria tidaklah terlalu lebar.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia terdapat hubungan timbal balik. Pembangunan manusia memerlukan investasi di berbagai bidang, misalnya di bidang kesehatan dan pendidikan, investasi ini akan berdampak terhadap derajat kesehatan, keterampilan dan pengetahuan serta produktivitas penduduk. Kesemuanya itu pada gilirannya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara keduanya dapat bersifat kuat ataupun lemah.

Selain pertumbuhan ekonomi, indikator ekonomi lainnya yang dapat mempengaruhi manusia antara lain: pendapatan perkapita, jumlah penduduk miskin dan pola distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Apabila distribusi pendapatan timpang, maka banyak penduduk yang tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya untuk membeli makanan, membiayai pendidikan dan kesehatan sehingga memperlambat pembangunan manusia.

Menurut UNDP (1996) hubungan antar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia dapat dikategorikan kedalam 2 kriteria, yaitu seimbang (*balanced*) dan tidak seimbang (*unbalanced*). Seimbang dibedakan lagi antara kuat dan lemah. Kategori seimbang yang pertama, terjadi hubungan kuat (*strong link*) antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. Sementara kategori seimbang yang kedua, berlangsung hubungan lemah (*weak link*) antar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Kategori tidak seimbang (*unbalanced*) memiliki ciri pertumbuhan ekonomi relatif lambat tetapi pembangunan manusia relatif cepat atau sebaliknya.

Dari rumpun indikator ekonomi, tingkat capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB berlaku) sebesar 112,78 %, yaitu dari rencana sebesar Rp. 13,30 trilyun realisasinya sebesar Rp. 15 trilyun, termasuk kategori sangat baik.

2.2.2. Kesejahteraan Ekonomi

Cerminan lain dari tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan PDRB per kapita. Meski tak mencerminkan kondisi sebenarnya, secara statistik, LPE dan PDRB merupakan ukuran yang lazim dipakai.

Salah satu dimensi sasaran pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dengan pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya dan perbandingannya dengan Propinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.7
 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya,
 Dan Propinsi Jawa Barat Tahun 2010– 2013

TAHUN	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Kabupaten Tasikmalaya	Propinsi Jawa Barat
(1)	(2)	(3)
2010	4,15	4,29
2011	4,27	6,20
2012	4,32	6,48
2013	4,17	6,21

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya 2013

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya dalam periode tahun 2010-2013 berkisardiantara 4,00% lebih. Sedangkan tahun 2013 laju Pertumbuhan Ekonomi angka sementara sebesar 4,17 %. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 mengalami perlambatan di dalam perkembangan ekonomi terutama distribusi sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan perikanan dan pertambangan serta penggalian.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang dirinci persektor dapat memberikan gambaran yang lebih rinci tentang pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Untuk mengetahui gambaran pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Tasikmalaya dan perbandingannya dengan Propinsi Jawa Barat, dapat melihat tabel bawah ini:

Tabel 2.8
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya dan
Provinsi Jawa Barat dirinci menurut sektor Tahun 2013

Sektor	Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Kab. Tasikmalaya	Prop. Jawa Barat
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan	-1,16	-0,71
2. Pertambangan dan Penggalan	-3,14	-7,18
3. Industri Pengolahan	9,70	3,94
4. Listrik, Gas dan Air Minum	4,77	7,85
5. Bangunan	4,17	13,61
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	9,81	11,55
7. Pengangkutan dan Komunikasi	1,26	12,00
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa	7,50	10,22
9. Jasa-jasa	8,74	8,14

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya 2013

Pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi di Kabupaten Tasikmalaya adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan lajunya yang mencapai 9,81 %. Kemudian sektor Industri Pengolahan dengan laju 9,70 %, Jasa-jasa dengan laju 8,74 % dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa dengan nilai 7,50 %. Sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalan adalah sektor dengan laju yang paling rendah -3,14 %. Di tingkat Propinsi Jawa Barat sektor Bangunan lajunya yang paling tinggi yaitu mencapai 13,61 % diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi 12,00 %, lalu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 11,55 %. Laju ekonomi yang paling rendah ditunjukkan oleh sektor Pertambangan dan Penggalan dengan lajunya sebesar -7, 18 %.

Distribusi persentase PDRB sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut di dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Distribusi persentase juga dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor dalam

pembentukan PDRB, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi motor penggerak pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan.

Struktur Ekonomi secara kuantitatif bisa digambarkan dengan menghitung besarnya persentase peranan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor terhadap nilai total Produk Domestik regional Bruto (PDRB). Untuk melihat struktur ekonomi Kabupaten Tasikmalaya dan perbandingannya dengan Propinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.9
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Tasikmalaya dan
Provinsi Jawa Barat ADH Berlaku Tahun 2013

Sektor	Distribusi Persentase (%)	
	Kab. Tasikmalaya	Prop. Jawa Barat
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan	38,47	11,52
2. Pertambangan dan Penggalian	0,21	1,86
3. Industri Pengolahan	8,71	35,79
4. Listrik, Gas dan Air Minum	0,86	2,51
5. Bangunan	1,65	4,29
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	27,92	23,90
7. Pengangkutan dan Komunikasi	6,25	7,79
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa	4,05	2,95
9. Jasa-jasa	11,88	9,40

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya 2013

Sektor pertanian masih merupakan “core bussines” di Kabupaten Tasikmalaya dengan peranan lebih dari 38,47%. Sektor perdagangan, hotel dan restoran mempunyai andil terbesar kedua dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2013 dengan andil sebesar 27,92 %. Sektor Jasa-jasa peranannya sebesar 11, 88% merupakan sektor ketiga terbesar setelah sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (*transfer out*) sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk (*transfer in*) maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Asumsi ini digunakan karena sulitnya untuk mendapatkan data pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk dan keluar. Angka PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Tabel 2.10 di bawah ini menunjukkan perkembangan dan perbandingan pendapatan perkapita/PDRB perkapita di Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2.10

PDRB Perkapita Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 – 2013

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (Rupiah)
(1)	(2)
2011	7.384.790,88
2012	8.211.479,85
2013	8.709.660,76

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya 2013

PDRB Perkapita Kabupaten Tasikmalaya dalam periode tahun 2011–2013 atas dasar harga berlaku secara agregat terus bertambah dan selalu tumbuh positif. Tahun 2013 PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp. 8.211.479,85 naik menjadi Rp. 8.709.660,76 dengan pertumbuhan 6,07 % di tahun 2013. PDRB per kapita tingkat capaiannya sebesar 112,56%, yaitu dari rencana sebesar Rp. 7.737.845 per kapita per tahun realisasinya sebesar Rp. 8.709.660,76 per kapita per tahun, termasuk kategori sangat baik.

2.2.3. Kesejahteraan Sosial

Pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial berkaitan dengan kualitas manusia dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi tersebut tercermin diantaranya pada pendidikan, kesehatan, tingkat kemiskinan. Pembangunan bidang pendidikan telah dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya akselerasi penuntasan program Wajib Belajar 9 tahun melalui pendidikan formal maupun non formal, serta rintisan Wajib Belajar 12 tahun. Bukti keberhasilan pembangunan bidang pendidikan bisa terlihat dari meningkatnya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yakni dari 7,17 pada tahun 2011 menjadi 7,31 pada tahun 2013. Disamping itu, Angka Melek Huruf (AMH) pun meningkat, yakni dari 99,15 pada tahun 2011 meningkat menjadi 99,23 pada tahun 2013. Berarti hampir seluruh penduduk Kabupaten Tasikmalaya

telah melek huruf, tersisa 0,77% yang akan diselesaikan pada pada dua tahun ke depan. Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Tasikmalaya baru mencapai 7,31 tahun atau hampir tamat SMP. Selain itu, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Melanjutkan menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Begitu pula Angka Melanjutkan Sekolah setiap tahun terus meningkat seperti ditunjukkan tabel di bawah ini:

Tabel 2.11
APK, APM, AMH dan Angka Melanjutkan Sekolah

No	Indikator Capaian Sasaran	Satuan	2011	2012	2013
1	APK SD/MI (Usia 7-12 Tahun)	%	100.4	100,6	100.2
2	APM SD/MI (Usia 7-12 Tahun)	%	100	100	100.00
3	APK SLTP/Mts(Usia 13 – 15 tahun)	%	94.48	95,34	96.33
4	APM SLTP/MTs(Usia 13 – 15 tahun)	%	92.89	95,18	95.22
5	APK SLTA/MA(Usia 16 – 18 tahun)	%	46.1	53,48	53.76
6	APM SLTA/MA (Usia 16 – 18 tahun)	%	43.89	50,92	52.58
7	Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA	%	55.67	58,66	89.37
8	Angka melanjutkan perguruan tinggi	%	23	24	52.0
9	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7.17	7,24	7,31
10	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	33.77	34.29	42.89
11	Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH)	%	99.16	99,22	99,23

Secara umum, kondisi kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dari capaian Indeks Kesehatan pada tahun 2011 sebesar 72,10 meningkat menjadi 72,36. Angka Harapan Hidup (AHH) meningkat dari 68,28 pada tahun 2011 menjadi 68,42 pada tahun 2013.

Peningkatan Sumber Daya Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Pembiayaan Kesehatan terus dilakukan, sehingga pencapaian beberapa indikator kesehatan dapat mencapai target rata-rata nasional. Pada tahun 2013, Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Tasikmalaya sebesar 10/1000 KH, (Target Nasional AKB 24/1000 KH pada tahun 2014 dan target MDGs AKB 23/1000 KH pada tahun 2015). Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2013 adalah 103,1/100.000 KH (Target Nasional AKI 150/100.000 KH pada tahun 2014 dan target MDGs AKI

102/100.000 KH pada tahun 2015). Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terus mengalami peningkatan dari 83,54 pada tahun 2011 menjadi 86,68 pada tahun 2012.

Tabel 2.12
AKB, AKABA, AKI, dan Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

No	Indikator Kesehatan	Satuan	2011	2012	2013
1	Jumlah Kematian Bayi	Orang	373	406	363
	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 kelahiran hidup	10	10	10
2	Jumlah kematian Balita	Orang	27	38	26
	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1000 balita	1	1	1
3	Jumlah Kematian Ibu	Orang	54	60	36
	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 kelahiran hidup	139	161	103,1
4	Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan	%	83,54	86,68	82,44

Sumber LKPJ 2012-2114 (diolah)

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tasikmalaya pada pada tahun 2010 berjumlah 318 353 jiwa atau setara dengan 19 persen. Kondisi tiga tahun terakhir jumlah penduduk miskin mengalami penurunan drastis yakni berjumlah 222.384 jiwa atau setara 13,14 persen pada tahun 2012, lalu menurun menjadi 211.598 jiwa atau setara 12,36 persen dan terakhir pada tahun 2013 menjadi 201.200 jiwa atau setara 11, 6 persen.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara dan pemenuhan atas hak ini merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah. Pendidikan juga sebagai salah satu gerbang yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Layanan pendidikan dasar yang dilaksanakan meliputi pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Jumlah penduduk yang sedemikian besar dengan struktur umur yang kebanyakan berusia muda, relatif memiliki tanggungjawab besar untuk mengantarkan penduduk muda untuk memperoleh pendidikan yang layak di Kabupaten Tasikmalaya. Selain masalah jumlah penduduk, persebarannya juga menjadi faktor penentu perkembangan pendidikan. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya saat ini masih perlu ditingkatkan dalam upaya menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pelayanan pendidikan tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang dapat dibuktikan dengan kenaikan capaian indikator makro yakni indikator pendidikan dalam IPM, peningkatan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Pada pelayanan sehari-hari dapat ditunjukkan dengan meningkatnya rasio guru dan peserta didik, peningkatan jumlah rombongan belajar, sarana prasarana, peningkatan kualifikasi pendidik (S1 dan S2), dll. Kesemua peningkatan pelayanan pendidikan dapat diperlihatkan pada tabel 2.13 berikut di bawah ini.

Tabel 2.13

Perkembangan Pelayanan Pendidikan

No	Indikator Pelayanan Indikator	Satuan	2011	2012	2013
1	Sarana dan prasana pendidikan dasar				
	- Jumlah SD/MI	Unit	1,297	1,297	1.295
	- Jumlah SLTP/MTs	buah	383	391	441
2	Ratio Siswa : Ruang Kelas				
	- SD/MI	%	26.9	25,01	22.52
	- SLTP/MTs	%	32.96	33,73	40.28
3	Daya tampung SMA,SMK dan MA				
	- Jumlah SMA	buah	41	41	45
	- Jumlah SMK	buah	77	94	95
	- Jumlah MA	buah	64	64	73
4	Tingkat pendidikan guru				
	jumlah guru berkualifikasi S1	orang	15,827	15,926	13.439
	jumlah guru berkualifikasi S2	orang	183	386	784
5	Meningkatnya jumlah guru yang tersertifikasi				
	guru TK	%	13.3	15.2	23.69
	guru SD	%	48.6	48	56.70
	guru SMP	%	32.4	46.3	44.13
	guru SMA	%	44.2	76.4	51.74
	guru SMK	%	5.6	16.9	12.40

Upaya Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, terkait erat dengan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar serta ketersediaan tenaga kesehatan. Salah satu faktor yang menyebabkan masih rendahnya pencapaian indikator kesehatan adalah masih rendahnya pemenuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan, serta masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di bidang kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2011-2013 makin meningkat diantaranya dari cakupan pemeriksaan ibu hamil (K4), cakupan bumil risti/komplikasi tertangani dan cakupan bayi diimunisasi campak. Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan hal penting yang harus dipenuhi adalah ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar antara lain jumlah Puskesmas pada tahun 2013 berjumlah 40 unit dengan rasio 1 (satu) unit Puskesmas per 46.504 penduduk (Standar 1 per 30.000 penduduk) idealnya Kabupaten Tasikmalaya memiliki 62 Puskesmas, tetapi kurangnya jumlah Puskesmas dapat ditutupi dengan ada dan tersebaranya Puskesmas Pembantu sebanyak 151 unit, Puskesmas Keliling 50 unit, Polindes 223 unit serta Praktek Swasta BP 50 dan Rumah Bersalin 2 unit, (*Sumber Profil Dinas Kesehatan tahun 2012*), dalam rangka penyelamatan ibu dan anak telah dilaksanakan pengembangan pelayanan kegawat-daruratan kebidanan dan bayi baru lahir melalui puskesmas yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency Dasar (PONED). Pada Tahun 2012 Jumlah Puskesmas PONED adalah 10 buah (Standar Puskesmas PONED adalah 1/50.000 penduduk) berarti Kabupaten Tasikmalaya membutuhkan sekitar 37 Puskesmas mampu PONED. Kondisi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Tasikmalaya secara kuantitas tidak mencukupi yaitu dengan adanya 1 RSUD dan 15 PUSKESMAS DTP. Secara statistik kondisi pelayanan kesehatan dapat diperlihatkan melalui tabel 2.14 berikut ini.

Tabel 2.14

Perkembangan Pelayanan Kesehatan

NO	Indikator Pelayanan	Satuan	2011	2012	2013
A.	Pengembangan Lingkungan Sehat				
1	Meningkatnya persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	61.77	63,20	64.54
2	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	%	62.73	64,13	65.32
3	Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	%	43.89	46,40	51.36
4	Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	54	69	82
5	Meningkatnya Rumah Tangga	%	44.5	44,5	46.6

NO	Indikator Pelayanan	Satuan	2011	2012	2013
	Sehat (RT ber-PHBS)				
B.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				
1	Meningkatnya Cakupan desa UCI Universal Child Immunization (UCI)	%	82.05	91,74	92
2	Meningkatnya Cakupan Campak	%	93.87	95,20	92.4
3	Meningkatnya cakupan balita dengan pneumonia ditangani	%	100	100	100
C	Perbaiki Gizi Masyarakat				
1	Meningkatnya persentase balita naik timbangannya (N/D)	%	82.12	80,14	73.78
2	Meningkatnya persentase partisipasi masyarakat (D/S)	%	84.44	81,62	80.16
3	Menurunnya persentase balita BGM (KEP Gizi)	%	3.6	5,16	0.67
4	Meningkatnya persentase balita yang mendapat kapsul Vitamin A 2 kali/tahun	%	91.59	93,18	93.31
5	Balita (6-24 bulan) BGM Gakin dapat MP ASI	%	29.56	73,53	77.90
6	Menurunnya prevalensi balita gizi buruk	%	0.87	0,51	0.13
E.	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin				
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di Puskesmas dan jaringannya	%	8	8,4	5.08
2	Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan	%	83.54	86,68	82.44
3	Meningkatnya pelayanan kesehatan antenatal (K4)	%	75.17	84,45	77.91
4	Meningkatnya cakupan Kunjungan Bayi 0-28 hari Neonatal (N2)	%	87.76	88,86	86.25
5	Meningkatnya cakupan bayi baru lahir/neonatus risti/komplikasi tertangani	%	67.5	27,83	84.31
6	Cakupan ibu hamil resiko tinggi/komplikasi tertangani	%	75.96	81,82	82.66

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Sektor pertanian sebagai sektor penyedia lapangan kerja/bisnis inti Kabupaten Tasikmalaya terbesar, yaitu sekitar 43,22% kesempatan kerja berasal dari sektor pertanian, diikuti perdagangan 24,75 %, dan jasa-jasa 11,08 %. Sektor pertanian merupakan penyedia utama kebutuhan pangan masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia. Sektor pertanian juga menyediakan pasar yang sangat besar untuk produk manufaktur karena jumlah penduduk perdesaan yang besar dan terus mengalami peningkatan. Dengan demikian, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah perdesaan melalui peningkatan pendapatan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Komoditas unggulan sektor pertanian Kabupaten Tasikmalaya yang sudah berorientasi ekspor antara lain: Padi Organik (SRI) dengan sentra di 7 (tujuh) Kecamatan. (Sukaresik, Cisayong, Sukaraja, Manonjaya, Cineam, Sukahening dan Salawu), Manggis dengan sentra di Puspahiang, Mendong dan Golok Galonggong Manonjaya. Sedangkan pada sektor industri adalah kerajinan dengan sentra di Rajapolah dan bordir dengan sentra di Sukaraja.

2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah.

Dari jalan kabupaten sepanjang 1.303,323 km yang kondisinya baik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti ditunjukkan pada tabel 2.15. Kondisi tersebut berpengaruh pada daya saing dalam pengembangan perekonomian daerah karena menghambat arus barang dan jasa serta mengurangi minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tasikmalaya. Pemerintah Daerah berusaha untuk terus memperbaiki jalur jalan yang rusak dan membuka jalur jalan ke daerah-daerah yang dianggap cukup bisa mengembangkan potensi perekonomian, diantaranya pembukaan jalur jalan yang menghubungkan Ciawi ke Singaparna yang sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian.

Tabel 2.15

Kondisi Jalan dan Jembatan

No	Kondisi Jalan dan Jembatan	Satuan	2011	2012	2013
1	Kondisi jalan kabupaten :	km	1303,323	1303,323	1303,323
	1. Kondisi Baik.	km	370,855	410,855	450,855
	2. Kondisi sedang	km	160,958	130,958	100,958
	3. Kondisi rusak ringan	km	369,635	379,635	389,635
	4. Kondisi rusak berat	km	401,875	381,875	361,875
2	Kondisi jembatan kabupaten :	buah	435	435	435
	1. Kondisi Baik.	buah	339	345	350
	2. Kondisi sedang	buah	10	9	8
	3. Kondisi rusak ringan	buah	20	17	15
	4. Kondisi rusak berat	buah	66	64	62

2.4.3. Iklim Berinvestasi

Laju pertumbuhan investasi yang ditanamkan di Kabupaten Tasikmalaya melalui Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada periode tahun 2011-2013 memperlihatkan kecenderungan stagnan. Salah satu faktornya adalah belum adanya perubahan kelembagaan pendorong iklim investasi seperti kemudahan proses perijinan. Sejak tahun 2008, KPPT masih sebatas kantor yang hanya menangani 15 perijinan.

2.4.4. Sumber Daya Manusia

Kabupaten Tasikmalaya merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk lumayan besar di wilayah Priangan Timur, sehingga merupakan aset penting yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan pembangunan secara keseluruhan di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan struktur umur, proporsi jumlah penduduk usia produktif (15-60 tahun) lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk di bawah usia 15 tahun dan penduduk usia di atas 60 tahun, yaitu masing-masing sebesar 60,58%, 31,09%, dan 8,33%. Dari potensi tenaga kerja, kualitas tenaga kerja merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan mengingat tenaga kerja usia 10 tahun ke atas yang memiliki ijazah SD

sebesar 0,32 %, SMP sederajat sebesar 2,43%, SMA/SMK sebesar 23,85% dan Perguruan Tinggi sebesar 23,40%.

Dengan demikian, Kabupaten Tasikmalaya mempunyai daya saing dalam bidang sumber daya manusia baik dari jumlah penduduk usia produktif maupun tingkat pendidikan. SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting bagi kemajuan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi kualitas SDM di wilayah tersebut. Peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau menciptakan peluang usaha lebih besar bagi mereka yang berpendidikan tinggi.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 4 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung) pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya sejak tahun 2006 hingga tahun 2010, telah digunakan sebagai dasar dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015. Melalui revisi RPJMD ini, kinerja keuangan daerah telah dapatdapat dikemukakan dan dianalisa lebih lanjut dengan data anggaran dan realisasi anggaran pelaksanaan RPJMD yaitu pada tahun 2011 s.d 2013, yang sebelumnya masih berupa proyeksi. Sedangkan sisa tahun RPJMD hingga tahun transisi 2016 dapat diproyeksikan pada bagian akhir Bab ini.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya digunakan dengan melihat indikator pengalokasian anggaran dan realisasi anggaran pada tahun analisis terakhir (tahun 2013), pertumbuhan anggaran dan realisasi yang dalam analisa ini dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2009-2013), akuntabilitas pelaksanaan anggaran yang ditunjukkan dengan indikator opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pertumbuhan anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah.

Pendapatan dalam perubahan APBD Tahun 2013 dianggarkan naik sebesar 21,90% dibandingkan dengan perubahan APBD Tahun 2012, pada perubahan Tahun 2012 sebesar Rp 1.815.931.038.787,68 dan pada perubahan tahun 2013 menjadi Rp. 2.213.623.318.967,00. Peningkatan secara signifikan tersebut bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 52,41% yaitu sebesar Rp 477.541.881.821,75 pada Perubahan tahun 2012 menjadi Rp 727.832.249.190,00 pada Perubahan tahun 2013, sedangkan Pendapatan Dana Alokasi Khusus yang mengalami penurunan sebesar 6.70%, yaitu dari Rp 106.110.250.000,00 pada perubahan tahun 2012 menjadi Rp 98.997.370.000,00 pada perubahan tahun 2013. Sementara itu Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan 13,12% dari Rp 1.083.660.482.000,00 perubahan tahun 2012 menjadi Rp 1.225.934.879.000,00 pada perubahan tahun 2013.

Dari sisi Belanja mengalami peningkatan alokasi sebesar 12.45% dari Rp 1.925.294.175.147,68 perubahan tahun 2012 menjadi Rp 2.165.004.333.289,00 perubahan tahun 2013. Dari pos Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan 11.47 % yaitu dari Rp 1.270.190.867.119,68 dalam perubahan tahun 2012 menjadi Rp 1.415.967.383.050,00 pada tahun 2013, Belanja Langsung naik sebesar

14.33% dari Rp 655.103.308.028,00 dalam perubahan tahun 2012 menjadi Rp 749.036.950.239,00 pada perubahan tahun 2013.

Realisasi anggaran mencerminkan salah satu indikator kinerja pengelolaan keuangan yang baik, pada tahun anggaran 2013 nampak bahwa realisasi pendapatan asli daerah telah melampaui target anggaran (100,34%), dana perimbangan pun realisasinya lebih besar dari target anggaran (100,69%) sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mencapai target (96,66%) yang berasal dari dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi dan dana bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, sehingga total realisasi anggaran pendapatan tidak mencapai target (99,32%). Realisasi anggaran belanja pada tahun anggaran 2013 secara total adalah sebesar 93,39 % yang terdiri dari penyerapan anggaran belanja langsung sebesar 92,59 % dan penyerapan anggaran belanja tidak langsung sebesar 93,83%.

Dalam aspek akuntabilitas pelaksanaan anggaran dapat dikemukakan bahwa hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Tasikmalaya pada pelaksanaan anggaran tahun 2010, 2011 dan 2012 mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) sedangkan pada tahun anggaran 2013 masih dalam proses pemeriksaan.

Berikut adalah gambaran kinerja pelaksanaan keuangan daerah tahun terakhir berupa anggaran dan realisasi anggaran tahun 2013;

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013

NO	URAIAN	ANGGARAN 2013	REALISASI 2013	LEBIH / KURANG	
				Rp	%
I	PENDAPATAN DAERAH	2.228.882.007.810,00	2.213.623.318.967,00	(15.258.688.843,00)	99,32
1.1	Pendapatan Asli Daerah	70.232.926.830,00	70.474.192.115,00	241.265.285,00	100,34
	Pajak Daerah	21.913.071.772,00	23.839.779.378,00	1.926.707.606,00	108,79
	Retribusi Daerah	20.898.354.400,00	20.321.676.447,00	(576.677.953,00)	97,24
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	15.303.457.658,00	8.965.582.987,00	(6.337.874.671,00)	58,59
	Lain -lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	12.118.043.000,00	17.347.153.303,00	5.229.110.303,00	143,15
1.2	Dana Perimbangan	1.405.681.690.942,00	1.415.316.877.662,00	9.635.186.720,00	100,69
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	80.749.441.942,00	90.384.628.662,00	9.635.186.720,00	111,93
	Dana Alokasi Umum	1.225.934.879.000,00	1.225.934.879.000,00	0,00	100,00
	Dana Alokasi Khusus	98.997.370.000,00	98.997.370.000,00	0,00	100,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2013	REALISASI 2013	LEBIH / KURANG	
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	752.967.390.038,00	727.832.249.190,00	(25.135.140.848,00)	96,66
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prop.dan Pemerintah daerah Lainnya	49.818.388.638,00	48.623.930.526,00	(1.194.458.112,00)	97,60
	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	340.098.291.000,00	340.098.291.000,00	-	100,00
	Bantuan Keuangan dari Prop.atau pemerintah daerah lainnya	363.050.710.400,00	339.110.027.664,00	(23.940.682.736,00)	93,41
	BELANJA DAERAH	2.318.155.621.192,00	2.165.004.333.289,00	(153.151.287.903,00)	93,39
II	Belanja Tidak Langsung	1.509.152.806.773,50	1.415.967.383.050,00	(93.185.423.723,50)	93,83
2.1	Belanja Pegawai	1.300.114.330.981,18	1.213.201.315.838,00	(86.913.015.143,18)	93,31
	Belanja Bantuan Sosial	9.265.413.000,00	6.878.040.113,00	(2.387.372.887,00)	74,23
	Belanja Hibah	108.277.400.000,00	105.121.150.000,00	(3.156.250.000,00)	97,09
	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	9.323.552.052,32	9.137.697.359,00	(185.854.693,32)	98,01
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	77.168.069.740,00	77.161.349.740,00	(6.720.000,00)	99,99
	Belanja Tidak Terduga	5.004.041.000,00	4.467.830.000,00	(536.211.000,00)	89,28
	Belanja Langsung	809.002.814.418,50	749.036.950.239,00	(59.965.864.179,50)	92,59
	Belanja Pegawai	52.072.055.504,00	47.770.244.356,00	(4.301.811.148,00)	91,74
2.2	Belanja Barang & Jasa	233.203.540.971,00	212.903.508.725,00	(20.300.032.246,00)	91,30
	Belanja Modal	523.727.217.943,50	488.363.197.158,00	(35.364.020.785,50)	93,25
	Jumlah Belanja	2.318.155.621.192,00	2.165.004.333.289,00	(153.151.287.903,00)	93,39
	Surplus/(Defisit)	-89.273.613.382,00	48.618.985.678,00	137.892.599.060,00	(54,46)
	PEMBIAYAAN DAERAH	89.273.613.382,00	100.960.678.373,00	11.687.064.991,00	113,09
	Penerimaan Pembiayaan	97.773.613.382,00	104.460.678.373,00	6.687.064.991,00	106,84
	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	97.773.613.382,00	97.845.678.382,00	72.065.000,00	100,07
III	Pencairan Dana Cadangan				
	Penerimaan dari Investasi Pemerintah Daerah				
3.1	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan				
	Penerimaan Pinjaman Daerah				
	Penrimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
	Penerimaan dari Investasi Pemerintah Daerah		6.614.999.991,00	6.614.999.991,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	97.773.613.382,00	104.460.678.373,00	6.687.064.991,00	106,84
	Pengeluaran Pembiayaan	8.500.000.000,00	3.500.000.000,00	(5.000.000.000,00)	41,18
	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	-	(5.000.000.000,00)	0,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	-	100,00
3.2	Pembayaran Pokok Utang				
	Pemberian Pinjaman Daerah				
	Jumlah Pengeluaran Daerah	8.500.000.000,00	3.500.000.000,00	(5.000.000.000,00)	0,00

Selanjutnya untuk melihat kinerja pelaksanaan keuangan daerah, di awal dapat dilihat dari pertumbuhan rata-rata anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam 5 tahun terakhir dimana pendapatan bertumbuh positif, belanja juga tumbuh positif, sedangkan pembiayaan tumbuh negatif sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Pertumbuhan Rata-Rata Anggaran Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2009-2013

NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013	RATA - RATA PERTUMBUHAN	
							(Rp.)	%
I	PENDAPATAN DAERAH	1.185.100.366.999,00	1.342.089.983.270,74	1.199.397.190.893,82	1.815.831.038.787,68	2.228.882.007.810,00	260.945.410.202,75	11,71
1.1	Pendapatan Asli Daerah	46.873.279.735,00	78.594.418.880,62	45.864.108.805,62	59.135.672.163,93	70.232.926.830,00	5.839.911.773,75	8,32
	Pajak Daerah	10.936.636.452,00	12.619.413.496,00	13.605.466.625,00	17.382.839.000,00	21.913.071.772,00	2.744.108.830,00	12,52
	Retribusi Daerah	14.135.548.650,00	15.212.464.494,00	14.116.285.614,00	21.065.969.835,93	20.898.354.400,00	1.690.701.437,50	8,09
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.972.049.873,00	13.775.190.756,62	13.735.190.756,62	12.728.612.729,00	15.303.457.658,00	1.082.851.946,25	7,08
	Lain -lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	11.009.044.760,00	36.987.350.134,00	4.407.165.810,00	6.958.250.599,00	12.118.043.000,00	277.249.560,00	2,29
1.2	Dana Perimbangan	936.590.768.557,00	1.056.722.200.438,00	1.027.681.957.556,35	1.280.253.484.802,00	1.405.681.690.942,00	117.272.730.596,25	8,34
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	57.341.325.557,00	74.772.591.238,00	56.630.265.088,20	90.482.752.802,00	80.749.441.942,00	5.852.029.096,25	7,25
	Dana Alokasi Umum	801.713.443.000,00	921.404.109.200,00	881.979.959.000,00	1.083.660.482.000,00	1.225.934.879.000,00	106.055.359.000,00	8,65
	Dana Alokasi Khusus	77.536.000.000,00	60.545.500.000,00	76.880.600.000,00	106.110.250.000,00	98.997.370.000,00	5.365.342.500,00	5,42
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	201.636.318.707,00	206.773.363.952,12	138.042.258.000,00	477.541.881.821,75	752.967.390.038,00	137.832.767.832,75	18,31
	Pendapatran Hibah	274.471.000,00	146.724.308,00	-	-	-	(274.471.000,00)	-
	Dana Darurat	33.834.220.000,00	-	-	-	-	(33.834.220.000,00)	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prop.dan Pemerintah daerah Lainnya	26.470.317.576,00	29.572.300.550,12	28.954.112.000,00	39.641.639.461,75	49.818.388.638,00	5.837.017.765,50	11,72
	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	25.123.551.531,00	28.523.685.094,00	-	232.477.213.000,00	340.098.291.000,00	104.991.579.823,00	30,87
	Bantuan Keuangan dari Prop.atau pemerintah daerah lainnya	115.933.758.600,00	148.530.654.000,00	109.088.146.000,00	205.423.029.360,00	363.050.710.400,00	61.779.237.950,00	17,02
	BELANJA DAERAH	1.346.966.049.184,00	1.482.266.669.021,74	1.327.292.517.937,82	1.925.294.175.147,68	2.318.155.621.192,00	242.797.393.020,00	10,407
II	Belanja Tidak Langsung	985.208.638.768,00	1.475.450.894.021,74	966.563.558.472,82	1.270.190.867.119,68	1.509.152.806.773,50	130.986.042.013,8	8,68
2.1	Belanja Pegawai	674.398.028.270,00	1.086.855.500.779,74	842.274.053.772,82	1.138.266.558.967,58	1.300.114.330.981,18	156.429.075.677,80	12,03
	Belanja Bantuan Sosial	192.091.652.498,00	870.430.440.073,24	42.346.240.000,00	7.063.090.500,00	9.265.413.000,00	(45.706.559.874,50)	(493,30)
	Belanja Hibah	79.184.640.000,00	47.807.500.000,00	33.940.676.000,00	63.718.374.750,00	108.277.400.000,00	7.273.190.000,00	6,72

NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013	RATA - RATA PERTUMBUHAN	
							(Rp.)	%
	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	6.494.618.000,00	6.815.775.000,00	6.963.278.700,00	8.695.580.662,10	9.323.552.052,32	707.233.513,08	7,59
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa	21.434.700,00	34.501.000,00	36.039.310,00	50.578.429,74	77.168.069.740,00	13.933.342,435,00	18,06
	Belanja Tidak Terduga	11.605.000,00	115.300.785,706,50	5.000.000,00	1.868.832.500,00	5.004.041.000,00	(1.650.239.750,00)	(32,98)
	Belanja Langsung	361.757.410,416,00	6.815.775.000,00	360.728.959,465,00	655.103.308,028,00	809.002.814.418,50	111.811.351,006,30	13,82
	Belanja Pegawai	32.881.938,660,00	34.501.000,00	39.483.071,800,00	48.705.000,510,00	52.072.055.504,00	4.797.529,211,00	9,21
2.2	Belanja Barang & Jasa	106.872.613,045,00	12.000.000,00	169.269.689,319,00	232.378.758,919,00	233.203.540.971,00	31.582.731,981,50	13,54
	Belanja Modal	222.002.858,711,00	388.595.393,242,00	151.976.198,346,00	374.019.548,599,00	523.727.217.943,50	75.431.089,808,13	14,40
	Jumlah Belanja	1.346.966.049,184,00	26.567.777,300,00	1.327.292.517,937,82	1.925.294.175,147,68	2.318.155.621,192,00	242.797.393,02,00	10,47
	Surplus/(Defisit)	161.865.682,185,00	120.207.952,468,00	127.895.327,044,00	109.363.136,360,00	89.273.613.382,00	18.148.017,200,75	(20,33)
	PEMBIAYAAN DAERAH	161.865.682,185,00	241.819.663,474,00	127.895.327,044,00	109.363.136,360,00	89.273.613.382,00	(18.148.017,200,75)	(20,33)
	Penerimaan Pembiayaan	177.150.286,185,00	133.360.910,751,00	128.645.327,044,00	111.163.136,360,00	97.773.613.382,00	(19.844.168,200,75)	(20,30)
	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	154.150.286,185,00	135.369.499,951,00	128.645.327,044,00	106.552.852,836,00	97.773.613.382,00	(14.094.168,200,75)	(14,42)
III	Pencairan Dana Cadangan	23.000.000,00	135.369.499,951,00	-	-	-	(23.000.000,00)	-
	Penerimaan dari Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-	4.610.283.524,00	-	-	-
3.1	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
	Penyertaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	177.150.286,185,00	135.369.499,951,00	128.645.327,044,00	111.163.136,360,00	97.773.613.382,00	(79.376.672,803,00)	(81,18)
	Pengeluaran Pembiayaan	15.284.604,00	2.008.589.200,00	750.000.000,00	1.800.000.000,00	8.500.000.000,00	(6.784.604.000,00)	(79,82)
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	5.000.000.000,00	-	-
	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	6.500.000.000,00	2.000.000.000,00	750.000.000,00	1.800.000.000,00	3.500.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(85,71)
3.2	Pembayaran Pokok Utang	8.784.604.000,00	8.589.200,00	-	-	-	(8.784.604.000,00)	-
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	15.284.604,00	1.342.089.983,270,74	750.000.000,00	1.800.000.000,00	8.500.000.000,00	(6.784.604.000,00)	(79,82)

NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013	RATA - RATA PERTUMBUHAN	
							(Rp.)	% 2)
	Daerah							

Sumber : Perda APBD tahun 2009-2013, diolah

Selanjutnya untuk melihat kinerja pelaksanaan keuangan daerah, selanjutnya dapat dilihat dari realisasi pertumbuhan rata-rata anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam 5 tahun terakhir dimana pendapatan bertumbuh positif, belanja juga tumbuh positif, sedangkan pembiayaan tumbuh negatif sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Pertumbuhan Rata-Rata Realisasi Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2009-2013

NO	Uraian	Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rata-rata Pertumbuhan		
		2009	2010	2011	2012	2013	Realisasi	
I	PENDAPATAN DAERAH	1.227.079.796.070,00	1.309.528.239.959,00	1.505.485.957.229,00	1.815.931.038.787,68	2.213.623.318.967,00	246.635.880.724,25	11,14
1.1	Pendapatan Asli Daerah	49.657.867.201,00	48.338.061.521,00	51.160.921.192,00	58.135.672.163,93	70.474.192.115,00	5.204.081.228,50	7,38
	-Hasil Pajak Daerah	11.851.184.022,00	12.088.798.564,00	17.861.130.368,00	17.382.839.000,00	23.839.779.378,00	2.997.148.839,00	12,57
	-Hasil Retribusi Daerah	14.216.583.300,00	14.311.790.523,00	15.312.578.095,00	21.065.969.835,93	20.321.676.447,00	1.526.273.286,75	7,51
	-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.545.049.873,00	13.750.890.325,00	8.042.461.466,00	12.728.612.729,00	8.965.582.987,00	394.866.721,50	3,74
	-Lain-lain PAD Yang Sah	13.045.048.006,00	8.816.582.109,00	9.944.751.263,00	6.958.250.599,00	17.347.153.303,00	1.075.526.324,25	6,20
1.2	Dana Perimbangan	948.170.972.648,00	1.058.189.564.045,00	1.043.973.470.058,00	1.280.253.484.802,00	1.415.316.877.662,00	116.786.476.253,50	8,25
	-Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	68.921.529.648,00	76.259.954.845,00	85.602.332.058,00	90.482.752.802,00	90.384.628.662,00	5.365.774.753,50	5,94
	-Dana Alokasi Umum	801.713.443.000,00	921.384.109.200,00	881.513.538.000,00	1.083.660.482.000,00	1.225.934.879.000,00	106.055.359.000,00	8,65
	-Dana Alokasi Khusus	77.536.000.000,00	60.545.500.000,00	76.857.600.000,00	106.110.250.000,00	98.997.370.000,00	5.365.342.500,00	5,42
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	229.250.956.221,00	203.000.614.393,00	410.351.565.979,00	477.541.881.821,75	727.832.249.190,00	124.645.323.242,25	17,13
	-Pendapatan Hibah	365.389.385,00	148.363.496,00				(365.389.385,00)	-
	-Dana darurat	31.334.220.000,00					-	-
	--Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	28.145.956.076,00	25.830.911.803,00	32.630.263.344,00	39.641.639.461,75	48.623.930.526,00	5.119.493.612,50	10,53
	-Dana Penyusutan dan otonomi khusus	52.792.395.160,00	28.523.685.094,00	157.890.367.160,00	232.477.213.000,00	340.098.291.000,00	71.826.473.960,00	21,12
	-Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	116.612.995.600,00	148.497.654.000,00	110.742.789.475,00	205.423.029.360,00	339.110.027.664,00	55.624.258.016,00	16,40
	-Dana Alokasi Bantuan Operasional Sekolah			109.088.146.000,00			(109.088.146.000,00)	-
II	BELANJA DAERAH	1.253.770.095.370,00	1.362.716.080.298,00	1.508.879.721.149,00	1.925.294.175.147,68	2.165.004.333.289,00	227.808.559.479,75	10,52
2.1	Belanja Tidak Langsung	967.572.649.634,00	1.048.124.150.442,00	1.099.326.548.615,00	1.270.190.867.119,68	1.415.967.383.050,00	112.098.683.354,00	7,92

NO	Uraian	Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rata-rata Pertumbuhan		
		2009	2010	2011	2012	2013	Realisasi	
	-Belanja Pegawai	672.531.768.955,00	838.564.402.989,00	952.170.060.491,00	1.138.266.558.967,58	1.213.201.315.838,00	135.167.386.720,75	11,14
	--Belanja Hibah	76.715.470.000,00	47.239.846.355,00	37.823.326.750,00	63.718.374.750,00	105.121.150.000,00	7.101.420.000,00	6,76
	-Belanja Bantuan Sosial	185.745.655.357,00	109.891.265.989,00	56.638.491.000,00	7.063.090.500,00	6.878.040.113,00	(44.716.903.811,00)	(650,14)
	-Belanja bagi hasil kepada Prov/kab/kota dan pemerintah desa	5.713.442.246,00	6.556.689.095,00	7.512.387.678,00	8.695.580.662,10	9.137.697.359,00	856.063.778,25	9,37
	-Belanja Banku kepada Prov/kab/kota dan Pemerintah Desa	21.013.499.076,00	34.100.008.014,00	40.234.619.696,00	50.578.429.740,00	77.161.349.740,00	14.036.962.666,00	18,19
	-Belanja Tidak Terduga	5.852.714.000,00	11.771.938.000,00	4.947.663.000,00	1.868.832.500,00	4.467.830.000,00	(346.221.000,00)	(7,75)
2.2	Belanja Langsung	286.197.445.736,00	314.591.929.856,00	409.553.172.534,00	655.103.308.028,00	749.036.950.239,00	115.709.876.126,00	15,45
	-Belanja Pegawai	27.757.086.930,00	23.275.365.004,00	42.769.153.902,00	48.705.000.510,00	47.770.244.356,00	5.003.289.356,50	10,47
	-Belanja Barang Jasa	93.342.214.053,00	105.686.353.757,00	199.640.393.464,00	232.378.758.919,00	212.903.508.725,00	29.890.323.668,00	14,04
	-Belanja Modal	165.098.144.753,00	185.630.211.095,00	167.143.625.168,00	374.019.548.599,00	488.363.197.158,00	80.816.263.101,25	16,55
III	PEMBIAYAAN	162.059.799.251,00	163.884.457.095,00	114.556.900.280,00	109.363.136.360,00	100.960.678.373,00	(15.274.780.219,50)	(15,13)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	177.303.956.051,00	165.893.046.295,00	115.306.900.280,00	111.163.136.360,00	104.460.678.373,00	(18.210.819.419,50)	(17,43)
	-SILPA Tahun Sebelumnya	154.150.286.185,00	135.369.499.951,00	110.696.616.756,00	106.552.852.836,00	97.845.678.382,00	(14.076.151.950,75)	(14,39)
	-Pencairan Dana Cadangan	23.153.669.866,00	30.523.546.344,00				-	-
	-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan							
	-Penerimaan Pinjaman Daerah							
	-Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman							
	-Penerimaan dari Investasi Pemerintah Daerah			4.610.283.524,00	4.610.283.524,00	6.614.999.991,00	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	15.244.156.800,00	2.008.589.200,00	750.000.000,00	1.800.000.000,00	3.500.000.000,00	(1.686.039.200,00)	(19,84)
	-Pembentukan Dana Cadangan							
	-Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	6.500.000.000,00	2.000.000.000,00	750.000.000,00	1.800.000.000,00	3.500.000.000,00	(750.000.000,00)	(21,43)
	-Pembayaran Pokok Utang	8.744.156.800,00	8.589.200,00					-
	-Pemberian Pinjaman Daerah							

Kenaikan Realisasi Anggaran dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan telah optimalnya strategi peningkatan dan kebijakan yang dijalankan melalui berbagai upaya intensifikasi baik dalam bentuk kegiatan maupun secara tupoksi disamping adanya penerimaan yang bersifat bantuan dari kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi. Pada tahun 2010 anggaran pendapatan tidak tercapai dan alasan ketidaktercapaian tersebut dikarenakan

adanya ketidakrelevansian pengakomodiran pencairan dana abadi yang semula diakomodir di kode rekening lain-lain PAD yang sah tetapi berdasarkan hasil audit BPK dinyatakan tidak relevan dan harus dimasukkan ke kode rekening Pembiayaan, oleh karena itu untuk kedepan perlu adanya perencanaan anggaran yang tepat dan akurat serta mencari terobosan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang lebih prospektif dengan tetap berpijak kepada landasan hukum yang berlaku.

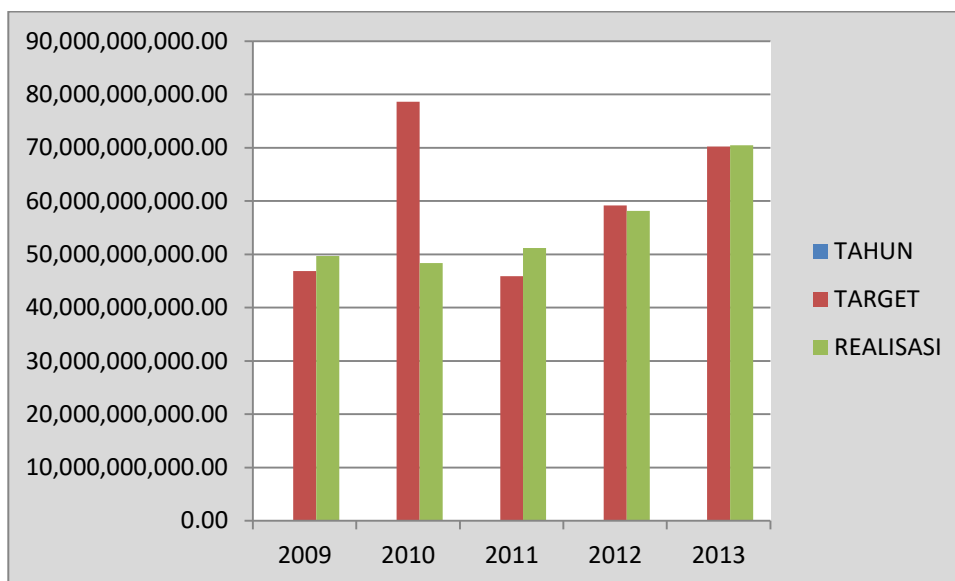
Perbandingan antara target dengan realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu 2009-2013, menunjukkan kenaikan dengan rata-rata sebesar 38,51%. Namun demikian, rata-rata realisasi pendapatan yang dicapai di bawah target yang telah ditetapkan dengan rasio efektivitas PAD rata rata sebesar 95,5 %, akan tetapi hal itu kontribusi terbesarnya terjadi pada tahun 2010 dengan kondisi yang telah digambarkan di atas, sehingga hal ini dianggap bukan menjadi *trend* tetapi lebih cenderung kasuistik yang tidak akan berulang pada tahun-tahun berikutnya dan cenderung bisa diabaikan dari rata-rata. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah berusaha maksimal dalam melakukan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu, sumber-sumber potensi pendapatan daerah masih cukup banyak yang dapat digali dan dikembangkan sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan daerah.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pada APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2009–2013

Tahun	Target		Realisasi		Rasio Efektivitas
	PAD	Pertumbuhan	PAD	Pertumbuhan	
2009	46.873.279.735,00		49.657.867.201,00		105,94
2010	78.594.418.880,62	67,67	48.338.061.521,00	(2,66)	61,50
2011	45.864.108.805,62	41,64	51.160.921.192,00	5,84	111,55
2012	59.135.672.163,93	28,94	58.135.672.163,93	13,63	98,31
2013	70.232.926.830,00	15,80	70.474.192.115,00	17,51	100,34
Rata-rata Per Tahun		38,51		9,91	95,53

Sumber : DPPKAD

Gambar 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pada APBD Kab. Tasikmalaya 2009–2013



3.1.2 Neraca Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca daerah tahun terakhir (2013) adalah sbb:

Tabel 3.5
Neraca Daerah Pemerintah Kab. Tasikmalaya Tahun 2013

Kode	Uraian	2013
1.	ASET	3.274.391.952.412,35
1.1.	ASET LANCAR	181.389.641.594,00
1.1.1.	Kas	149.583.717.032,00

Kode	Uraian	2013
1.1.3.	Piutang lain-lain	1.943.043.925,00
1.1.4.	Persediaan	29.862.880.637,00
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	117.768.577.870,03
1.2.1.	Investasi Non Permanen	1.489.914.063,21
1.2.2.	Investasi Permanen	116.278.663.806,82
1.3.	ASET TETAP	2.975.174.407.398,32
1.3.1.	Tanah	261.546.630.890,40
1.3.2.	Peralatan dan mesin	434.951.960.309,00
1.3.3.	Gedung dan bangunan	827.356.653.454,92
1.3.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	1.319.842.274.192,00
1.3.5.	Aset tetap lainnya	55.979.446.561,00
1.3.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	75.497.441.991,00
1.4.	Dana Cadangan	0
1.4.1.	Dana Cadangan	0
1.5.	ASET LAINNYA	59.325.550,00
1.5.1.	Tagihan penjualan angsuran	
1.5.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	59.325.550,00
	JUMLAH ASET DAERAH	3.274.391.952.412,35
2.	KEWAJIBAN	6.476.935.773,00
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.476.935.773,00
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	3.844.605,00
2.1.2.	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.473.091.168,00
3.	EKUITAS DANA	3.267.915.016.639,35
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	174.912.705.821,00
3.1.1.	SILPA	149.579.664.051,00
3.1.2.	Cadangan piutang	1.943.043.925,00
3.1.3.	Cadangan persediaan	29.862.880.637,00
3.1.5.	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(6.473.091.168,00)
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	3.093.002.310.818,35
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	2.975.174.407.398,32
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	59.325.550,00
3.2.3.	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	117.768.577.870,03
3.3.	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA CADANGAN	0

Kode	Uraian	2013
3.3.1	Diinvestasikan Dalam Dana cadangan	0
	Jumlah Ekuitas Dana	3.267.915.016.639,35
	Total Pasiva	3.274.391.952.412,35

Selanjutnya Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kab. Tasikmalaya selama kurun waktu 2009-2013 seperti dapat terlihat pada Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kab. Tasikmalaya
Tahun 2009-2013

Kode	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1.	ASET	2.098.727.550.554,46	2.233.021.999.504,46	2.432.303.828.535,39	2.775.409.921.537,96	3.274.391.952.412,35
1.1.	ASET LANCAR	143.393.328.366,00	12.057.392.565	123.353.354.711,00	110.575.079.220,90	181.389.641.594,00
1.1.1.	Kas	135.390.207.497,00	110.663.383.081,00	111.171.521.729,00	97.845.756.036,00	149.583.717.032,00
1.1.2.	Piutang	69.033,00	0	35.432.146,00	59.667.761,00	0
1.1.3.	Piutang lain-lain	14.451.971,00	0	405.327.632,00	621.290.859,00	1.943.043.925,00
1.1.4.	Persediaan	7.988.599.865,00	9.909.629.484	11.741.073.204,00	12.048.364.564,90	29.862.880.637,00
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	80.329.058.832,14	82.329.058.832,14	99.327.274.733,07	108.470.904.867,74	117.768.577.870,03
1.2.1.	Investasi Permanen Non	4.620.088.000,00	4.620.088.000,00	3.532.441.201,47	3.736.604.963,78	1.489.914.063,21
1.2.2.	Investasi Permanen	75.708.970.832,14	77.708.970.832,14	95.794.833.531,60	104.734.299.903,96	116.278.663.806,82
1.3.	ASET TETAP	1.844.426.716.462,32	2.030.056.927.557,32	2.209.563.873.541,32	2.556.304.611.899,32	2.975.174.407.398,32
1.3.1.	Tanah	322.890.829.032,40	324.904.900.991,40	325.039.954.867,40	309.222.991.771,40	261.546.630.890,40
1.3.2.	Peralatan dan mesin	170.081.462.793,00	191.045.373.384	237.176.341.830,00	298.593.945.079,00	434.951.960.309,00
1.3.3.	Gedung dan bangunan	538.354.000.118,92	599.421.519.078,92	633.256.220.928,92	761.090.251.683,92	827.356.653.454,92
1.3.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	780.801.098.734,00	872.614.823.319	950.952.018.804,00	1.103.439.679.254,00	1.319.842.274.192,00
1.3.5.	Aset tetap lainnya	32.299.325.784,00	32.368.404.784,00	51.019.389.111,00	51.699.880.111,00	55.979.446.561,00
1.3.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	0	9.701.906.000,00	12.119.948.000,00	32.257.864.000,00	75.497.441.991,00
1.4.	Dana Cadangan	30.523.546.344,00	-	0	0	0
1.4.1	Dana Cadangan	30.523.546.344,00	0	0	0	0
1.5.	ASET LAINNYA	54.900.550,00	63.000.550,00	59.325.550,00	59.325.550,00	59.325.550,00
1.5.1.	Tagihan penjualan angsuran	0	0			
1.5.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	54.900.550,00	63.000.550,00	59.325.550,00	59.325.550,00	59.325.550,00

Kode	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1.5.3.	Kemitraan dengan pihak kedua	0	0			
1.5.4.	Aset tak berwujud	0	0			
1.5.5.	Aset Lain-Lain	0	0			
	JUMLAH ASET DAERAH	2.098.727.550.554,46	2.233.021.999.504,46	2.432.303.828.535,39	2.775.409.921.537,96	3.274.391.952.412,35
2.	KEWAJIBAN	29.296.746,00	412.192,00	1.745.934.743,00	1.689.055.060,00	6.476.935.773,00
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	29.296.746,00	412.192,00	1.745.934.743,00	1.689.055.060,00	6.476.935.773,00
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	20.707.546,00	412.192,00	8.318.909,00	0	3.844.605,00
2.1.2.	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.589.200,00	15.724.360.210	1.737.615.834,00	1.689.055.060,00	6.473.091.168,00
3.	EKUITAS DANA	2.098.698.253.808,46	2.217.297.227.102,46	2.430.557.893.792,39	2.773.720.866.477,96	3.267.915.016.639,35
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	143.364.031.620,00	104.848.240.163	121.607.419.968,00	108.886.024.160,90	174.912.705.821,00
3.1.1.	SILPA	135.369.499.951,00	110.662.970.889	111.163.136.360,00	97.845.678.382,00	149.579.664.051,00
3.1.2.	Cadangan piutang	14.521.004,00	-	440.759.778,00	680.958.620,00	1.943.043.925,00
3.1.3.	Cadangan persediaan	7.988.599.865,00	9.909.629.484	11.741.073.204,00	12.048.364.564,90	29.862.880.637,00
3.1.4.	Pendapatan yang Ditangguhkan	0	0			
3.1.5.	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(8.589.200,00)	(15.724.360.210)	(1.737.615.834,00)	(1.689.055.060,00)	(6.473.091.168,00)
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	1.924.810.675.844,46	2.112.448.986.939,46	2.308.950.473.824,39	2.664.834.842.317,06	3.093.002.310.818,35
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	1.844.426.716.462,32	2.030.056.927.557,32	2.209.563.873.541,32	2.556.304.611.899,32	2.975.174.407.398,32
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	54.900.550,00	63.000.550,00	59.325.000,00	59.325.550,00	59.325.550,00
3.2.3.	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	80.329.058.832,14	82.329.058.832,14	99.327.274.733,07	108.470.904.867,74	117.768.577.870,03
3.3.	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA CADANGAN	30.523.546.344,00	-	0	0	0
3.3.1	Diinvestasikan Dalam Dana cadangan	30.523.546.344,00	-	.	0	0
	Jumlah Ekuitas Dana	2.098.698.253.808,46	2.217.297.227.102,46	2.430.557.893.792,39	2.773.720.866.477,96	3.267.915.016.639,35
	Total Pasiva	2.098.727.550.554,46	2.233.021.999.504,46	2.432.303.828.535,39	2.775.409.921.537,96	3.274.391.952.412,35

Sumber : DPPKAD

3.1.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi

pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi/pemerintah daerah lainnya. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasisumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan OPD Penghasil.
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.

5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
6. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
7. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem dan prosedur pemungutan serta administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
8. Meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah hingga tahun 2016 mendatang, prioritas kebijakan pendapatan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru diberlakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan pelaksanaannya.
2. Melaksanakan kajian penerapan pajak progresif, terutama yang terkait dengan imbasnya terhadap sosial-ekonomi masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.
3. Menerapkan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain, terutama dari potensi investasi daerah serta pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui kegiatan skema kerjasama pemerintah (*Public Private Partnership*) dan swasta maupun *corporate social responsibility (CSR)*.

Untuk itu sejumlah langkah yang akan dilakukan meliputi:

- a. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Kerjasama investasi antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan pihak swasta melalui perjanjian yang disepakati.
- c. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal.

- d. Optimalisasi Pelaksanaan Perijinan Pelayanan Terpadu (PPT) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan.
- e. Meningkatkan koordinasi program melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*
- f. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, industri pengolahan, dan industri manufaktur.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2011-2015 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran IPM. Untuk itu, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM guna memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2011-2015 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan

urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

4. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
5. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak,serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis perdesaan melalui gerakan membangun desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan.
8. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
9. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah akan mengarahkan pada pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam, optimalisasi kegiatan dalam upaya pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 64,12%, mitigasi bencana dan pengendalian alih fungsi lahan.
10. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*).

11. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
 - d. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak terduga seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

3.1.4 Proporsi Penggunaan Anggaran

Selama periode tahun 2009-2013, rata-rata presentase proporsi belanja langsung terhadap jumlah belanja daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah adalah 34,59%. Belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan

program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan rata-rata belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2009-2013 adalah 65,41%, belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Tabel 3.7
Analisis Proporsi Belanja Langsung
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2009-2013

No.	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan Belanja Langsung (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
1	Tahun Anggaran 2009	361.757.410.416,00	1.362.250.653.184,00	26,30
2	Tahun Anggaran 2010	388.595.393.242,00	1.477.459.483.222,74	27,16
3	Tahun Anggaran 2011	360.728.959.465,00	1.328.042.517.937,82	27,16
4	Tahun Anggaran 2012	655.103.308.028,00	1.927.094.175.147,68	33,90
5	Tahun Anggaran 2013	809.002.814.418,50	2.326.655.621.192,00	34,70
	Rata-rata			29,84

Sumber : DPPKAD

3.1.5. Analisis Pembiayaan

Kondisi pembiayaan daerah dalam kurun Tahun 2009-2013 dapat digambarkan seperti terlihat pada Tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.8
Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kab. Tasikmalaya Tahun 2009-2013

NO	Uraian	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.227.079.796.070,00	1.340.118.447.552,00	1.505.485.957.229,00	1.815.931.038.787,68	2.213.623.318.967,00
2.	Belanja Daerah	1,253,770,095,370,00	1.362.816.387.414,00	1.508.879.721.149,00	1.925.294.175.147,68	2.165.004.333.289,00
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	15.244.156.800,00	2.008.589.200,00	750.000.000,00	1.800.000.000,00	3.500.000.000,00
	Defisit riil	(41.934.456.100,00)	(24.706.529.062,00)	(4.143.763.920,00)	(111.163.136.360,00)	(45.118.985.678,00)

Sumber : DPPKAD

Untuk menutup defisit riil anggaran pada kurun tahun yang sama, dapat digambarkan komposisinya pada Tabel 3.9 berikut ini.

Tabel 3.9
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2009-2013

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	367,60	547,91	2.671,40	95,85	100,00
2.	Pencairan Dana Cadangan	55,21	-	-	-	-
3.	Penerimaan dari Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-	4,14	-

Sumber : DPPKAD

Untuk realisasi sisa lebih perhitungan anggaran pemerintah daerah, dengan kurun waktu yang sama pada tahun 2012-2013, gambaran dua tahun terakhir terlihat pada Tabel 3.10

Tabel 3.10
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Pemerintah Kab. Tasikmalaya Tahun 2012-2013

No.	Uraian	2012		2013	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	106.552.852.836,00	100,00	97.845.678.382,00	100,00
2.	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-	-
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	51.141.420.216,00	48	89.403.432.571,50	91,37
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-
7.	Pembiayaan Netto	109.363.136.360,00	102,63	100.960.678.373,00	103,18
8.	Kegiatan lanjutan	55.411.432.620,00	52	8.442.245.810,50	8,63

Sumber : DPPKAD

Dari Tabel di atas terlihat bahwa selama 2 tahun terakhir (2012-2013), sebagai tahun rujukan yang dijadikan bahan laporan keuangan pemerintah daerah, adanya kecenderungan penurunan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) pada setiap tahunnya. Merujuk pada ketentuan pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah Kondisi ini, sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

3.2. Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan pengeluaran keuangan yang harus dilakukan pemerintah daerah, baik terkait dengan pembelanjaan pada katagori kewajiban maupun pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran keuangan pemerintah daerah sepenuhnya mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ketentuan normatifnya telah disampaikan dalam uraian sebelumnya.

3.2.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat

Pengeluaran periodik pemerintah daerah yang dibebankan pada keuangan daerah pada tahun 2012-2013, memperlihatkan kondisi seperti berikut :

Tabel 3.11
Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat
Pemerintah Kab. Tasikmalaya Tahun 2012-2013

No	Uraian	2012	2013	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	
A	Belanja Tidak Langsung	1.146.962.139.629,68	1.222.339.013.197,00	6,57
1	Belanja Pegawai	1.138.266.558.967,58	1.213.201.315.838,00	6,58
2	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	8.695.580.662,10	9.137.697.359,00	5,08
B	Belanja Langsung	41.432.549.474,00	57.000.000.000,00	27,31
1	Belanja fasilitas Dasar dan Administrasi umum (fixedcost)	41.432.549.474,00	57.000.000.000,00	27,31
C	Pembiayaan Pengeluaran	1.800.000.000,00	8.500.000.000,00	78,82
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.800.000.000,00	3.500.000.000,00	48,57
2.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
3.	Pembentukan Dana Cadangan	-	5.000.000.000,00	100

No	Uraian	2012	2013	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	
	TOTAL (A+B+C)	1.190.194.689.103,68	1.374.937.883.033,50	13,43

Sumber : Diolah dari Perda APBD Tahun 2012 dan Tahun 2013

3.2.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Setelah mengetengahkan kondisi pengelolaan keuangan daerah yang telah dilaksanakansampai dengan tahun 2013, sebagai kerangka keuangan yang telah dimasukan dalam laporan keuangan daerah, selanjutnya akan digambarkan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah hingga tahun 2016 mendatang (Tabel 3.12).

Tabel 3.12
Proyeksi tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pendanaan Pembangunan Daerah
Pada Kurun Tahun 2014-2016

No.	Keterangan	2014	2015	2016
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	1,638,512,581,428,00	1.720.438.210.499,40	1.822.681.395.580,50
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	66,361,194,612,00	57.070.627.366,32	49.080.739.535,03
	Jumlah A	1.704.873.776.040,00	1.777.508.837.865,72	1.871.762.135.115,53
1	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat	1.169.174.162.281,00		
	Jumlah B	1.169.174.162.281,00	1.239.324.612.017,86	1.313.684.088.738,93
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	535.699.613.759,00	538.184.225.847,86	558.078.046.376,6

Sumber : DPPKAD

Dari tabel 3.13 di atas dapat diproyeksikan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk pendanaan pembangunan daerah 3 Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD 2014-2016, yaitu :

1. Proyeksi Tahun 2014 sebesar Rp. 535.699.613.759,00 atau sebesar 31 % dari total penerimaan.

2. Proyeksi Tahun 2015 sebesar Rp. 451.314.585.590,38 atau sebesar 30,27 % dari total penerimaan.
3. Proyeksi Tahun 2016 sebesar Rp. 367.857.853.035,30 atau sebesar 29,81 % dari total penerimaan.

Angka-angka kapasitas kemampuan keuangan riil yang terus menurun diakibatkan oleh proyeksi penerimaan pembiayaan yang semakin menurun sebagai indikator yang baik karena meningkatnya kualitas penyerapan anggaran dan matangnya perencanaan, meskipun proyeksi pendapatan mengalami tren kenaikan namun pengurangannya yaitu angka belanja wajib mengikat diproyeksikan tidak bisa menurun sehingga memperkecil angka alokasi pendanaan pembangunan, hal tersebut diantaranya diproyeksikan mengantisipasi pemberlakuan UU Aparatur Sipil Negara yang memperpanjang batas usia pensiun serta melanjutkan *trend* kebijakan kenaikan gaji PNS. Sehingga kisaran angka alokasi pembangunan ini bisa berkembang lebih besar apabila Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mampu menekan angka jumlah pegawai (moratorium rekrutment PNS) dan tidak ada kebijakan kenaikan gaji PNS oleh pemerintah pusat. Di sisi lain angka tersebut belum memperhitungkan SILPA untuk kegiatan lanjutan yang berkontribusi besar terhadap komponen angka alokasi pembangunan.

Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah daerah dalam membiayai :

- a. Rencana alokasi prioritas utama, yakni yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dialokasikan sebagai konsekuensi penganggaran dari pemerintah pusat dan/atau dana daerah urusan bersama. Contohnya pendamping DAK, DDUB PNPM, PAMSIMAS, P2KP dan lainnya.
- b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (*dedicated*) Kepala daerah seperti penguatan struktur ekonomi berbasis perdesaan, pembangunan infrastruktur perdesaan dan penanganan kemiskinan serta implementasi amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, seperti prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen) dan kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen). Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, kegiatan yang memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi serta

memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
- d. Rencana alokasi peneluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan desa. Pengalokasian dana pada prioritas III baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.

Melihat proyeksi kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana tabel 3.2.2.1 diatas maka terdapat sejumlah pertimbangan alokasi belanja ke depan, yaitu sebagai berikut :

1. Perlu adanya optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang didasarkan terhadap urutan prioritas.
2. Perlunya peningkatan keperansertaan sektor swasta dalam pendanaan pembangunan, baik melalui kemitraan pemerintah dan sector swasta (*public private partnership*) maupun potensi *corporate social responsibility* (CSR).

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis dalam RPJMD ini dirumuskan dengan terlebih dahulu menggali dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan lalu dikaitkan dengan isu nasional, regional dan lokal. Permasalahan pembangunan dijadikan patokan pemilihan isu strategis pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Dan pada isu strategis yang dipilih dan ditetapkan dijadikan dasar penentuan prioritas program pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.1.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

a. Bidang Kependudukan

Dalam bidang kependudukan, beberapa permasalahan yang masih perlu ditangani antara lain;

- 1) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk;
- 2) Penataan administrasi kependudukan;
- 3) Penguatan kelembagaan kependudukan; dan
- 4) Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya akta-akta pencatatan sipil.

b. Bidang Pendidikan

Di bidang pendidikan beberapa permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan segera mencakup:

- 1) Keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan menengah dan tinggi;
- 2) Masih rendahnya akuntabilitas pengelolaan pendidikan
- 3) Belum adanya SPM Pendidikan.

c. Bidang Kesehatan

Permasalahan bidang kesehatan, antara lain:

- 1) Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan, tenaga kesehatan, dan jaminan pembiayaan kesehatan;
- 2) Derajat kesehatan dan status gizi masyarakat masih rendah, yang antara lain tercermin dari masih tingginya Angka kematian bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI), serta masih tingginya angka kesakitan dan kematian yang diderita oleh masyarakat, baik berupa penyakit menular maupun penyakit tidak menular;
- 3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih & Sehat (PHBS).
- 4) Belum mempunyai Rumah Sakit Umum Daerah yang memadai.

d. Bidang Ketenagakerjaan :

Permasalahan pembangunan dalam bidang tenaga kerja yang sangat krusial antara lain:

- 1) Tingginya angka pengangguran terbuka;
- 2) Terbatasnya kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana pelatihan serta terbatasnya paket kegiatan bimbingan usaha.

e. Bidang Olah Raga dan Kepemudaan :

Permasalahan pembangunan keolahragaan saat ini antara lain:

- 1) Pembinaan olahraga yang belum terpadu antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi di lingkungan masyarakat, dan olahraga prestasi untuk kelompok atlet;
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk memwadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri.

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- 1) Terbatasnya akses terhadap kesempatan usaha, pendidikan, dan kesehatan.
- 2) Makin meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak.

g. Bidang Kebudayaan :

Permasalahan dalam pengembangan bidang kebudayaan antara lain:

- 1) Rendahnya ketahanan budaya masyarakat akibat imbas perubahan global.
- 2) Pemahaman masyarakat tentang arti penting kebudayaan dalam kehidupan belum berkembang dengan baik
- 3) Proses regenerasi dalam rangka pewarisan budaya daerah masih rendah
- 4) Belum termanfaatkannya produk budaya sebagai potensi industri kreatif.

h. Bidang Sosial :

Permasalahan bidang sosial adalah :

- 1) Kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 2) Perselisihan akibat dari konflik antar/inter pemeluk agama;
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana, sumberdaya manusia dan anggaran pemerintah untuk penanganan masalah-masalah sosial.

i. Bidang Keagamaan :

Dalam bidang keagamaan, permasalahan yang masih dihadapi di Kabupaten Tasikmalaya antara lain :

- 1) Perlu adanya kurikulum dan mata pelajaran agama yang proporsional dalam pendidikan dasar dan menengah.
- 2) Belum optimalnya peran lembaga-lembaga keagamaan dalam kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

4.1.2. Ekonomi

a. Bidang Investasi dan Penanaman Modal :

Permasalahan dalam bidang investasi dan penanaman modal antara lain:

- 1) Kondisi infrastruktur yang ada dirasakan masih terbatas.
- 2) Prosedur perizinan masih berbelit-belit.
- 3) Kajian potensi dan peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor masih terbatas.
- 4) Belum optimalnya peran KADIN.

b. Bidang Pertanian :

Kendala dalam pengembangan pertanian secara umum mencakup, antara lain:

- 1) Rendahnya tingkat kesejahteraan petani yang diakibatkan :
 - pada umumnya petani sebagai buruh tani
 - tingkat kepemilikan lahan petani relatif terbatas (kurang dari 0,5 Ha)
 - Skala usaha pertanian relatif terbatas.
- 2) Pengembangan pertanian masih bersifat parsial pada sistem pertanian;
- 3) Input produksi pertanian relatif terbatas pada umumnya disebabkan masih lemahnya kemampuan finansial untuk pengembangan usaha.
- 4) Terbatasnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pertanian

- 5) Penerapan teknologi tepat guna masih terbatas diakibatkan oleh terbatasnya sarana prasarana, rendahnya SDM petani, terbatasnya penyuluh pertanian dan tenaga teknis lainnya.
- 6) Alih fungsi lahan pertanian yang mengurangi produksi dan produktivitas hasil pertanian.
- 7) Masih terbatasnya sarana dan prasarana panen dan pasca panen
- 8) Masih rendahnya kualitas produk yang dihasilkan
- 9) Kelembagaan kelompok tani belum mandiri
- 10) Nilai Tambah hasil pertanian yang masih rendah disebabkan produk yang dijual masih berupa bahan mentah belum melalui proses pengolahan dan pengemasan.
- 11) Rendahnya nilai tukar petani (NTP).
- 12) Masih lemahnya akses permodalan sehingga mengakibatkan sistem ijon di petani
- 13) Belum konsistennya pelaksanaan Sistem Pertanian Organik.
- 14) Masih lemahnya penelitian untuk menghasilkan bibit dan produk unggulan

Permasalahan dalam Sub-Bidang Pertanian Tanaman Pangan :

- 1) masih belum adanya kawasan tanaman hortikultura baik sayuran maupun buah-buahan,
- 2) belum terintegrasinya tanaman dan ternak dalam penyediaan bahan pupuk organik,
- 3) Belum disertifikasinya produksi buah-buahan lokal

Permasalahan dalam Sub-Bidang Peternakan:

- 1) masih terbatasnya produksi daging.
- 2) masih terbatasnya populasi hewan.
- 3) Dalam hal prasarana dan sarana, kondisi Rumah Potong Hewan, Pasar Hewan, Unit Perbibitan Ternak masih jauh dari memadai.
- 4) Terbatasnya jumlah tenaga teknis lapangan (penyuluh, paramedic veteriner dan dokter hewan).

- 5) Terbatasnya akses peternak terhadap pendanaan.

Permasalahan dalam Sub-bidang Perikanan yaitu :

- 1) Berkurangnya kualitas, kuantitas, dan debit air di sentra perikanan air tawar.
- 2) Masih rendahnya produksi budidaya perikanan air tawar, khususnya ikan gurame, ikan nilam dan udang galah.
- 3) Belum adanya pusat pembenihan ikan nilam.

Permasalahan dalam Sub-Bidang Kehutanan yaitu :

- 1) Laju deforestasi tidak seimbang jika dibandingkan dengan upaya rehabilitasi hutan dan lahan.
- 2) Tidak terkendalinya penebangan hutan yang dilakukan oleh pemilik
- 3) Masih lemahnya penegakan aturan dalam tata usaha hasil hutan

Dalam Sub-Bidang Perkebunan yaitu :

- 1) Masih rendahnya tingkat produktifitas
- 2) Harga jual yang fluktuatif.

Sub-Bidang Ketahanan Pangan :

- 1) Masih rendahnya ketersediaan cadangan pangan khususnya beras dan jagung pada saat musim paceklik.
- 2) Rendahnya tingkat kemandirian pangan di desa kategori miskin.
- 3) Masih terbatasnya fasilitasi lumbung pangan perdesaan.

c. Bidang Kelautan :

- 1) Belum terpadunya pengelolaan kegiatan wilayah pesisir pantai selatan Tasikmalaya.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana tangkapan ikan.
- 3) Pemasalahan pengembangan komoditas kelautan berkaitan dengan investasi yang memerlukan dana sangat besar.

d. Bidang Pertambangan :

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pertambangan adalah:

- 1) Pemanfaatan potensi pertambangan belum memberikan nilai tambah.
- 2) Eksploitasi bahan tambang yang tidak terkendali
- 3) Belum adanya peta sebaran potensi pertambangan
- 4) Lemahnya pengawasan dan pengendalian eksploitasi pertambangan

e. Bidang Pariwisata :

Kendala yang masih dihadapi dalam pengembangan sektor pariwisata antara lain :

- 1) Fasilitas dan pelayanan wisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya belum cukup memadai.
- 2) Masih rendahnya minat swasta untuk mengelola potensi pariwisata.
- 3) Belum optimalnya penyebaran informasi dan promosi pariwisata

f. Bidang Koperasi, Industri Kecil dan Menengah :

Tasikmalaya sebagai tempat lahirnya koperasi di Indonesia masih mempunyai permasalahan dalam pengembangan koperasi antara lain:

- 1) rendahnya manajemen usaha koperasi,
- 2) terbatasnya permodalan koperasi,
- 3) rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi

Pengembangan industri kecil dan menengah Kabupaten Tasikmalaya di arahkan untuk pengembangan industri kreatif yaitu kerajinan dan bordir. Meskipun demikian, dalam pengembangannya masih menghadapi permasalahan antara lain :

- 1) Masih rendahnya manajemen pengelolaan usaha.

- 2) Kontinuitas produk kurang terjamin, terutama berkaitan dengan pasokan bahan baku.
- 3) Terbatasnya akses permodalan
- 4) Jaringan informasi dan akses pasar ke tingkat nasional maupun internasional masih lemah.
- 5) Kurangnya diversifikasi dan tingkat kreativitas desain produk.

g. Bidang Perdagangan :

Permasalahan yang masih dihadapi dalam bidang perdagangan, yaitu :

- 1) Masih kurangnya fasilitasi pemerintah daerah dalam perdagangan ekspor
- 2) Masih lemahnya tata niaga perdagangan antar daerah dan ekspor
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana distribusi perdagangan (Pasar).
- 4) Terbatasnya sarana promosi

4.1.3. Infrastruktur Wilayah

a. Bidang Pekerjaan Umum

Kabupaten Tasikmalaya memiliki jaringan jalan sepanjang 1.303,323 km, dari panjang jalan tersebut terdapat sepanjang 340,855 km dalam kondisi baik, 270,958 km dalam kondisi sedang, 269,635 km dalam kondisi rusak, dan 421,875 Km dalam kondisi rusak berat.

Permasalahan mendasar pada infrastruktur transportasi antara lain :

- 1) Masih banyaknya pengguna jasa jalan melebihi tonase yang telah ditentukan
- 2) Rendahnya kemantapan jalan pada sistem jaringan jalan di Kabupaten Tasikmalaya
- 3) Rendahnya optimalisasi fasilitas terminal angkutan penumpang
- 4) Cakupan pelayanan jaringan jalan belum bisa optimal melayani masyarakat

- 5) Sistem jaringan jalan yang ada belum bisa mengimbangi pergerakan barang dan orang

Adapun permasalahan pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, antara lain:

- 1) Rusaknya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam;
- 2) Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam memelihara infrastruktur yang ada; dan
- 3) Belum memadainya infrastruktur sumber daya air dan irigasi dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat.

b. Bidang Energi dan Kelistrikan :

Permasalahan pada aspek infrastruktur listrik dan energi adalah:

- 1) Cakupan elektrifikasi di Kabupaten Tasikmalaya baru mencapai 59,25% yang bersumber dari PLN dan Non PLN
- 2) Masih terbatasnya penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) mikro hidro, biogas, tenaga surya, dan tenaga angin.

c. Bidang Telekomunikasi :

Pada bidang telekomunikasi, permasalahan yang dihadapi adalah :

- 1) Masih terbatasnya cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi kabel.
- 2) Terbatasnya akses dan kemampuan masyarakat menikmati layanan telekomunikasi nirkabel.

d. Bidang Permukiman dan Perumahan :

Permasalahan mendasar di sektor infrastruktur air minum dan air bersih meliputi :

- 1) Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum PDAM
- 2) Masih tingginya tingkat kebocoran air minum PDAM.
- 3) Belum sesuai kapasitas terpasang dengan kapasitas produksi infrastruktur yang ada;
- 4) Belum termanfaatkannya sumber-sumber air baku baru.
- 5) Masih rendahnya cakupan air bersih khususnya untuk masyarakat perdesaan.

Permasalahan yang ada pada infrastruktur pengolahan limbah domestik meliputi :

- 1) Belum seimbang penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik dengan pertumbuhan penduduk;
- 2) Rendahnya kepedulian masyarakat dan swasta/dunia usaha terhadap bidang kesantitasian;
- 3) Belum adanya Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT)

Untuk aspek perumahan, permasalahan yang mendasar adalah :

- 1) masih adanya ketimpangan antara ketersediaan perumahan dengan kebutuhan perumahan (*backlog*).
- 2) masih banyaknya rumah tidak layak huni di perdesaan.

4.1.4. Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan acuan dasar dalam kerangka pengembangan wilayah. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang berkenaan dengan :

- 1) Pengaturan
 - Keterbatasan sumber daya manusia dalam melaksanakan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang;

- Belum adanya dokumen RDTR untuk semua kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh serta kawasan potensial

2) Pembinaan

- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang.
- Belum optimalnya sosialisasi dan diseminasi mengenai perencanaan tata ruang

3) Pelaksanaan

- Masih tingginya peta konflik antara peta struktur ruang dan pola ruang
- Kondisi fisik dasar Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan daerah rawan bencana secara tidak langsung membatasi peruntukan kawasan budidaya;
- Masih ditemuinya pengembangan wilayah sektoral yang tidak mengacu pada dokumen tata ruang yang ada;

4) Pengawasan: adanya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan pola ruang;

Adapun permasalahan yang dihadapi pada bidang pertanahan adalah:

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap identitas kepemilikan tanah
- 2) Masih banyaknya lahan tidur
- 3) Masih adanya konflik pemilikan tanah diantara masyarakat

4.1.5. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Tasikmalaya terakhir kurang menggambarkan keseimbangan lingkungan hidup yang baik, antara lingkungan ekosistem alami dengan lingkungan ekosistem budidaya/buatan manusia. Terjadinya kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam disebabkan beberapa faktor, diantaranya :

- 1) kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) pembangunan yang tidak sesuai tata ruang;
- 3) kerusakan hutan atau deforestasi akibat penebangan yang tidak terkendali

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup antara lain :

- 1) Luas eksisting kawasan lindung masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam RTRW Propinsi Jawa Barat, yaitu 64,32 % dari total luas wilayah.
- 2) Adanya degradasi pantai yang disebabkan abrasi baik oleh faktor alam maupun manusia.

Adapun permasalahan persampahan di Kabupaten Tasikmalaya antara lain :

- 1) Belum ada Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan persampahan
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana operasional persampahan
- 3) Kurangnya pegawai yang mengelola persampahan
- 4) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan
- 5) Pengelolaan sampah di TPA masih menggunakan cara-cara *open dumping*.

4.1.6. Politik

Perkembangan kehidupan demokrasi perlu ditunjang dengan penguatan institusi politik dan peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat. Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi belum berperan secara maksimal.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam bidang politik antara lain :

- 1) Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik

- 2) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan publik masih rendah.
- 3) Lembaga politik belum memberikan secara maksimal proses peningkatan kesadaran politik warga (pendidikan politik).

4.1.7. Hukum

Permasalahan Pembangunan Bidang Hukum antara lain :

- 1) Belum adanya *grand design* tentang pembuatan program legislasi daerah
- 2) Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia di bidang hukum
- 3) Masih rendahnya budaya hukum masyarakat.

4.1.8. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat antara lain :

- 1) Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan,
- 2) menurunnya wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara.
- 3) Berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, dan kejahatan terhadap kekayaan Negara.
- 4) Adanya tindakan-tindakan kelompok masyarakat yang bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku.
- 5) Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat.

4.1.9. Aparatur dan Pelayanan Publik

Permasalahan yang masih ada dalam pembangunan Bidang Aparatur dan pelayanan publik antara lain:

- 1) Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efektif dan efisien, sehingga struktur organisasi kurang proporsional
- 2) Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja.
- 3) Sistem dan prosedur kerja serta pelayanan publik di lingkungan aparatur daerah masih perlu ditingkatkan sejalan dengan tuntutan dan harapan masyarakat melalui peningkatan nilai-nilai etika dan budaya kerja, disiplin kerja, etos kerja, serta produktivitas kerja.
- 4) Masih rendahnya sarana dan prasarana pemerintahan
- 5) Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi pegawai

4.1.10. Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dengan asas-asas pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan yang masih dihadapi dalam bidang Keuangan daerah dan Pengelolaan asset daerah antara lain :

- 1) Capaian laporan kinerja keuangan yang masih pada level Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
- 2) pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi.
- 3) Masih adanya bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi yang dalam pembagiannya tidak proporsional dan cenderung disamaratakan dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya.
- 4) Belum proporsionalnya belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4.1.11. Pemerintahan dan Pembangunan Desa

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemerintahan desa antara lain :

- 1) masih rendahnya sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam tata kelola pemerintahan desa.
- 2) terbatasnya tingkat kesejahteraan aparatur pemerintahan desa.
- 3) belum optimalnya peran lembaga desa dan lembaga masyarakat desa
- 4) masih terbatasnya prasarana dan sarana pendukung penyelenggaraan pemerintah desa.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam bidang pembangunan desa antara lain :

- 1) Masih terbatasnya infrastruktur dasar perdesaaan
- 2) menurunnya nilai-nilai gotong royong masyarakat dalam gerakan pembangunan desa.

4.1.12. Penanggulangan Bencana

Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Nasional, Kabupaten Tasikmalaya menempati ranking kedua nasional sebagai daerah rawan bencana. Permasalahan yang dihadapi adalah;

- 1) Masyarakat belum sadar bencana dan lemah menghadapi bencana.
- 2) Lemahnya kapasitas dan kelembagaan BPBD.
- 3) Belum tersosialisasikannya peta rawan bencana
- 4) Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana

4.2. Isu Strategis

1. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Perdesaan.
2. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk.
3. Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dan Rintisan Wajar Dikdas 12 Tahun.

4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
5. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan
6. Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.
7. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa.
8. Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan.
9. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Perkotaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Permukiman.
10. Peningkatan Ketersediaan Pelayanan Prasarana dan Sarana untuk Mendukung Proses Produksi Pertanian serta Mensinergitaskan Usaha Agribisnis dari Hulu sampai Hilir.
11. Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.
12. Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah.
13. Penanggulangan Bencana Daerah.
14. Peningkatan kualitas lembaga pendidikan keagamaan dan peningkatan peran lembaga keagamaan dalam kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

4.3. Isu Strategis Kewilayahan

Berdasarkan tinjauan kewilayahan dari potensi ekonomi dan sosial, terdapat indikasi bahwa perkembangan wilayah dan kota-kota di bagian Utara dan Tengah lebih cepat dibandingkan dengan wilayah dan kota-kota di bagian Selatan Kabupaten Tasikmalaya. Ketidakmerataan terutama karena :

- 1) Belum termanfaatkannya secara optimal potensi produksi yang berada di bagian Selatan.
- 2) Keadaan geografis wilayah bagian Selatan yang menyebabkan belum berkembangnya bagian wilayah Selatan.
- 3) Kondisi fisik dasar yang tidak menunjang untuk pengembangan pertanian.

Hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini merupakan modal dasar dan sebagai kekuatan serta peluang untuk meningkatkan pembangunan selanjutnya. Tasikmalaya memiliki potensi sumberdaya alam yang sudah banyak dimanfaatkan, namun demikian potensinya belum secara optimal dapat dikembangkan termasuk di dalamnya sumberdaya pertanian, pertambangan, perindustrian dan pariwisata. Untuk meningkatkan pemanfaatan potensi yang ada, perlu didukung pembangunan infrastruktur dasar yang memadai, diantaranya jalan, jembatan, sumber daya air dan energi listrik.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2005-2025 yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah: **"Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Maju dan Sejahtera Tahun 2025"**. yang dijabarkan ke dalam 4 misi yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berkualitas dan mandiri
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis keunggulan agribisnis
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance)
4. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Lebih Merata Dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan yang Asri dan Lestari

Sebagai penjabaran RPJPD di atas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 – 2015, maka visi dan misi RPJMD akan mengacu kepada visi dan misi RPJPD.

5.1. Visi

Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 20011-2015 akan diprioritaskan kepada pembangunan yang berbasis perdesaan sesuai dengan karakteristik penduduk dan wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Permasalahan yang masih dihadapi Kabupaten Tasikmalaya antara lain kemiskinan, keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur dasar (jalan dan jembatan, listrik, air dan irigasi), keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, dan mitigasi bencana. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan komitmen dan keberpihakan pemerintah daerah serta penguatan kepemimpinan yang didukung oleh masyarakat dan dukungan politik.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan, perkotaan dan kawasan pusat pemerintahan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan untuk penuntasan wajar dikdas 9 tahun dan perintisan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun, meningkatkan prasarana dan sarana pertanian, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah dan desa, pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten yang berada di wilayah Pemerintah Kota.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011–2015 adalah:

“KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, MANDIRI, UNGGUL DI BIDANG AGRIBISNIS, DAN BERBASIS PERDESAAN”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya tersebut adalah sebagai berikut :

Religius Islami :

Religius sesungguhnya merupakan pencerminan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan agama yang dianutnya, jadi makna religius disini mencakup seluruh umat agama. Religius mengarah kepada kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan, lebih menekankan kepada substansi nilai-nilai luhur keagamaan dan tidak terjebak dalam bentuk ritual keagamaan.

Islami adalah kata sifat dari Islam. Islam secara etimologi berarti kepasrahan dan ketundukan kepada “Sang Khaliq“. Islam secara semantik berarti selamat, Islami memberikan pengertian menebarkan keselamatan dan kedamaian bagi seluruh umat dengan dilandasi oleh prinsip keadilan dan persamaan didepan sang Khaliq.

Religius Islami merupakan sikap keberagamaan yang lapang (*hanif*) dicerminkan dalam perilaku keseharian di masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal kemanusiaan seperti keadilan, kesetaraan (equal), menghargai kemajemukan (pluralitas).

Pengkalimatan **"Kabupaten Tasikmalaya yang religius Islami..."** sebagaimana terumuskan dalam visi dimaksud adalah menjadikan spirit keagamaan Islam menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan membangun hubungan sosial kemasayarakatan. Nilai-nilai Islam yang universal menjadi landasan dan nafas penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Mandiri :

Mandiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada pada orang lain. Mandiri sebagaimana terumuskan dalam visi menunjukkan kepada situasi dan kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengandalkan kemampuan sendiri.

Mandiri adalah sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Tingginya kualitas pendidikan penduduk ditandai dengan makin tingginya tingkat pendidikan serta meningkatnya partisipasi pendidikan. Dalam bidang kesehatan ditandai dengan angka harapan hidup yang lebih tinggi, laju pertumbuhan penduduk yang terkendali serta kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu daerah diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin dari tingkat pendapatan dan distribusinya. Tingginya pendapatan dan ratanya pembagian ekonomi suatu daerah menjadikan daerah tersebut lebih makmur dan lebih maju.

Unggul di bidang Agribisnis :

Unggul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet) daripada yang lain.

Agribisnis adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan keunggulan sumberdaya hayati pertanian. Sistem agribisnis terdiri dari tiga subsistem utama, yaitu:

Pertama, subsistem agribisnis hulu (*upstream agribusiness*) yang merupakan kegiatan ekonomi yang menyediakan sarana produksi bagi pertanian, seperti industri dan perdagangan agrokimia (pupuk, pestisida, dll), industri agrootomotif (mesin dan peralatan), dan industri benih/bibit),

Kedua, subsistem usaha tani (*on-farm agribusiness*) yang merupakan kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan oleh subsistem agribisnis hulu untuk menghasilkan produk pertanian primer. Termasuk ke dalam subsistem usahatani ini adalah usaha tanaman pangan, usaha tanaman hortikultura, usaha tanaman obat-obatan, usaha perkebunan, usaha perikanan, usaha peternakan, dan kehutanan.

Ketiga, subsistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) yang berupa kegiatan ekonomi yang mengolah produk pertanian primer menjadi produk olahan, baik produk antara maupun produk akhir, beserta kegiatan perdagangan di pasar domestik maupun di pasar internasional. Kegiatan ekonomi yang termasuk dalam subsistem agribisnis hilir ini antara lain adalah industri pengolahan makanan, industri pengolahan minuman, industri pengolahan serat (kayu, kulit, karet, sutera, jerami), industri jasa boga, industri farmasi dan bahan kecantikan, dan lain-lain beserta kegiatan perdagangannya. Disamping ketiga subsistem di atas, diperlukan subsistem keempat sebagai bagian dari pembangunan sistem agribisnis.

Subsistem **keempat** ini dikenal sebagai subsistem penunjang. Subsistem penunjang adalah seluruh kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis, seperti lembaga keuangan, lembaga penelitian dan

pengembangan, lembaga transportasi, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintah (kebijakan fiskal dan moneter, perdagangan internasional, kebijakan tata-ruang, serta kebijakan lainnya).

Unggul di bidang Agribisnis sebagaimana tertuang dalam Visi mengandung makna bahwa Kabupaten Tasikmalaya memiliki keunggulan komparatif dalam bidang pertanian dan akan ditingkatkan melalui pengembangan industri hulu pertanian dan industri pengolahan produk pertanian sehingga menjadikan keunggulan komparatif tersebut menjadi keunggulan kompetitif dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

Berbasis Perdesaan :

Mengingat sebagian besar wilayah dan penduduk kabupaten Tasikmalaya ada di perdesaan, maka perencanaan pembangunan disusun berdasarkan permasalahan dan potensi yang ada di perdesaan. Penggalan potensi desa tersebut harus dibarengi dengan peningkatan sumberdaya masyarakat desa, agar masyarakat desa tidak menjadi penonton terhadap pembangunan yang sedang berlangsung di desa. Berbasis perdesaan mengandung pengertian bahwa orientasi pembangunan diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa. Dengan orientasi pembangunan ke desa, diharapkan berdampak secara langsung terhadap peningkatan kualitas warga desa dan akan mengurangi tingkat kemiskinan di perdesaan.

5.2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlakulkarimah, berkualitas dan mandiri
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis perdesaan dengan keunggulan agribisnis

3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance)
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Guna mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks berikut:

Tabel 5.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD 2011-2105

Visi: **“Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan”**

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlaqul-karimah, Berkualitas dan Mandiri	1. Mewujudkan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan tata kelola pemerintahan	1. Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai landasan moral dan spiritual.
		2. Optimalisasi pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah untuk pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
	2. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat melalui perluasan akses, peningkatan mutu dan perbaikan tata kelola	1. Tuntas wajar dikdas 9 tahun
		2. Terlaksananya rintisan wajar 12 tahun
		3. Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan bagi anak usia dini dan pendidikan luar sekolah yang merata, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat
4. Meningkatnya mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal		
	5. Tersedianya bantuan beasiswa/keringanan	

Misi	Tujuan	Sasaran
		<p>biaya bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu</p> <p>6. Meningkatnya kreativitas siswa di semua jenjang pendidikan</p> <p>7. Meningkatnya kemampuan dan budaya baca masyarakat</p>
	<p>3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta pembiayaan yang terjangkau oleh masyarakat</p>	<p>1. Meningkatnya kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).</p> <p>2. Meningkatnya upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular</p> <p>3. Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak</p> <p>4. Meningkatnya sarana, prasarana, perbekalan dan pelayanan kesehatan</p> <p>5. Menjamin setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan atau rujukan/spesialis yang bermutu</p> <p>6. Meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, ibu</p>

Misi	Tujuan	Sasaran
		bersalin, ibu nifas, bayi, anak dan masyarakat resiko tinggi
	4. Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas, mandiri dan berbudaya	1. Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja. 2. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan penyebaran penduduk 3. Tersedianya Data Kependudukan yang akurat serta terwujudnya tertib administrasi dan meningkatnya pelayanan di bidang kependudukan. 4. Meningkatnya kualitas dan peran generasi muda dalam pembangunan daerah. 5. Meningkatnya prestasi dalam bidang olahraga 6. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah.
2. Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis	1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perluasan kegiatan ekonomi yang berbasis	1. Meningkatnya daya saing, produksi usaha pertanian, industri kecil, dan pariwisata dalam upaya meningkatkan pendapatan

Misi	Tujuan	Sasaran
Perdesaan dengan Keunggulan Agribisnis	potensi desa	petani/masyarakat
	2. Meningkatkan peran lembaga perekonomian dan perdagangan tradisional.	1. Meningkatnya kemampuan dan peran koperasi, UMKM dan Lembaga Keuangan Mikro dalam menunjang kegiatan perekonomian daerah
		2. Terwujudnya pasar tradisional yang nyaman dan representatif
	3. Menjadikan desa sebagai kesatuan komunitas ekonomi, sosial, dan budaya serta merupakan basis data pengambilan kebijakan	1. Terbentuknya Badan usaha Milik Desa (BUMDES)
		2. Berkembangnya kelompok usaha mandiri di perdesaan
		3. Memperkuat budaya gotong royong dalam pembangunan desa
3. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas pemerintahan melalui optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik	1. Tertatanya kelembagaan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien, serta meningkatkan pelayanan publik
		2. Tersedianya produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
		3. Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang

Misi	Tujuan	Sasaran
		akuntabel
		4. Terwujudnya keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya
		5. Terwujudnya pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan
		6. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai
		7. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berwawasan ke depan, transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan.
		8. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel
		1. Terpenuhinya kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
	2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan melalui kompetensi personil berbasis kinerja	2. Terwujudnya pelayanan prima dalam

Misi	Tujuan	Sasaran
		pengelolaan administrasi kepegawaian serta terwujudnya sistem dan penerapan manajemen kinerja pegawai yang objektif
	3. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme	1. Mencegah terjadinya praktek KKN di lingkungan pemerintah dan masyarakat
	4. Tegaknya peraturan daerah, terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat	1. Meningkatnya penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat
	5. Mewujudkan kehidupan berpolitik yang demokratis serta pemantapan wawasan kebangsaan	1. Meningkatnya kehidupan berpolitik yang demokratis berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya, serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemantapan wawasan kebangsaan
4. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata	1. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang partisipatif sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang yang	1. Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang yang berkelanjutan

Misi	Tujuan	Sasaran
Ruang yang berkelanjutan	dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.	
		2. Meningkatnya pengaturan rencana tata ruang wilayah yang konsisten
		3. Meningkatnya pembinaan tata ruang wilayah yang baik
		4. Meningkatnya pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
	2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dengan memperhatikan pembangunan perdesaan.	1. Tersedianya infrastruktur perdesaan yang memadai untuk memajukan perekonomian di wilayah perdesaan.
		2. Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman perdesaan dan perkotaan yang tertib, aman dan nyaman.
		3. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana perumahan yang layak huni serta sehat
		4. Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi dan perhubungan antar wilayah

Misi	Tujuan	Sasaran
		5. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengairan.
	3. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.	1. Meningkatnya produktivitas sumber daya alam, terpeliharanya kualitas lingkungan serta pencegahan dan penanggulangan kerusakan/pencemaran lingkungan.
	4. Meningkatkan Ketersediaan Energi	1. Meningkatnya ketersediaan energi terutama untuk daerah perdesaan.
	5. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	1. Terciptanya masyarakat tangguh bencana dan terwujudnya penanggulangan bencana yang terencana, dan terpadu.

BAB VI

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi dan Kebijakan

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran perlu dipertegas dan dirumuskan lebih konkrit dengan upaya untuk mencapainya melalui strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk lima tahun mendatang. Strategi dan kebijakan merupakan perencanaan komprehensif bagaimana Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi misi. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD dianggap strategis. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Kebijakan pembangunan yang dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, akan dijadikan pedoman dalam merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan. Berkenaan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang dipilih dan ditetapkan sebagai berikut di bawah ini.

Tabel 6.1

Strategi dan Kebijakan RPJMD 2011-2015

Misi 1: Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlaqulkarimah, Berkualitas dan Mandiri	
Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana lembaga keagamaan serta kesadaran kehidupan beragama.	1. Bidang Sosial Keagamaan. a. Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin dan anak terlantar
2. Meningkatkan APK dan APM di	b. Peningkatan pemahaman nilai-nilai

<p>jenjang pendidikan dasar dan menengah</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan 4. Meningkatkan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal 5. Meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan 6. Meningkatkan dukungan anggaran dan fasilitasi untuk pemberian beasiswa di semua jenjang pendidikan 7. Meningkatkan kreativitas siswa melalui berbagai event perlombaan 8. Mengembangkan budaya baca dan perpustakaan terutama di perdesaan 9. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan lingkungan sehat 10. Meningkatkan pelayanan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular 11. Meningkatkan gizi masyarakat dan keluarga sadar gizi 12. Meningkatkan cakupan pengawasan obat dan makanan yang beredar di masyarakat 13. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin 	<p>agama dan kebangsaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> c. Penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan d. Mengikutsertakan kafilah ketingkat Provinsi dan Nasional e. Meningkatkan pendidikan keagamaan secara proporsional f. Peningkatan kapasitas kelembagaan Bazda <p>2. Bidang Pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan dasar dan menengah. b. Peningkatan lembaga pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. c. Peningkatan mutu pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik. d. Pemberian beasiswa/keringanan biaya pendidikan terhadap masyarakat yang tidak mampu secara selektif dan proporsional serta beasiswa bagi siswa berprestasi. <p>3. Bidang Perpustakaan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat <p>4. Bidang Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat. b. Peningkatan upaya penemuan, pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian kasus penyakit menular dan tidak menular
--	--

<p>secara cuma-cuma di Puskesmas dan jaringannya</p> <p>14. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas</p> <p>15. Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas</p> <p>16. Menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita</p> <p>17. Meningkatkan pelayanan, perlindungan, santunan dan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial</p> <p>18. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan kesempatan kerja serta fasilitasi perlindungan bagi tenaga kerja</p> <p>19. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan upaya penyebaran penduduk</p> <p>20. Meningkatkan pelayanan dan penataan administrasi kependudukan</p> <p>21. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak</p> <p>22. Meningkatkan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah</p> <p>23. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga serta olahragawan</p>	<p>c. Peningkatan gizi keluarga</p> <p>d. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan</p> <p>e. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu</p> <p>f. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya.</p> <p>g. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, anak dan lansia</p> <p>5. Bidang Sosial</p> <p>a. Mewujudkan kemandirian fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)</p> <p>6. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil</p> <p>a. Menciptakan administrasi kependudukan yang akuntabel</p> <p>7. Bidang Transmigrasi</p> <p>a. Peningkatan penyebaran penduduk</p> <p>8. Bidang Ketenagakerjaan :</p> <p>a. Mengembangkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja</p> <p>9. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>a. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p> <p>b. Peningkatan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan diperdesaan dalam pembangunan desa.</p> <p>10. Bidang Keluarga Berencana dan</p>
---	--

<p>berprestasi secara berkelanjutan</p> <p>24. Mengembangkan nilai dan pengelolaan budaya lokal</p>	<p>Keluarga Sejahtera</p> <p>a. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk</p> <p>11. Bidang Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>a. Peningkatan peran pemuda dan organisasi kepemudaan</p> <p>b. Peningkatan pembinaan olahraga melalui lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi olahraga</p> <p>12. Bidang Kebudayaan</p> <p>a. Peningkatan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah.</p>
<p>Misi 2 :</p> <p>Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dengan Keunggulan Agribisnis</p>	
<p>1. Meningkatkan produksi, nilai tambah produk pertanian dan peternakan</p> <p>2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap</p> <p>3. Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata lokal</p> <p>4. Meningkatkan rehabilitasi lahan dan fungsinya yang berkelanjutan (ekonomi, ekologi, sosial)</p> <p>5. Meningkatkan sistem usaha agribisnis berbasis komoditas unggulan dengan dukungan permodalan</p> <p>6. Menciptakan BUMD yang sehat</p> <p>7. Mengembangkan pasar-pasar tradisional</p> <p>8. Meningkatkan kemandirian desa dan peran serta masyarakat</p>	<p>1. Bidang Pertanian dan Peternakan</p> <p>a. Meningkatkan produksipertanian tanaman pangan dan hortikultura</p> <p>b. Meningkatkan produksi peternakan</p> <p>c. Meningkatkan akses pasar untuk produk-produk agribisnis</p> <p>2. Bidang Kelautan dan Perikanan</p> <p>a. Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil perikanan dan kelautan.</p> <p>b. Pengembangan sentra komoditas unggulan dengan pendekatan kawasan</p> <p>3. Bidang Pariwisata</p> <p>a. Mengembangkan kawasan wisata dan budaya daerah</p> <p>4. Bidang Industri</p> <p>a. Mewujudkan sentra-sentra industri kecil dan menengah khususnya</p>

<p>dalam pembangunan perdesaan</p>	<p>dalam bidang industri (Batik, bordir, golok Manonjaya, anyaman bambu)</p> <p>5. Bidang Kehutanan dan Perkebunan</p> <p>a. Mengembangkan penanganan rehabilitasi hutan, lahan kebun dan DAS</p> <p>b. Peningkatan fungsi hutan, lahan dan kebun meliputi fungsi produksi (ekonomi) konservasi (ekologi) dan sosial (kesejahteraan)</p> <p>6. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>a. Mewujudkan KUMKM yang tangguh dan mandiri</p> <p>7. Bidang Penanaman Modal</p> <p>a. Mewujudkan BUMD yang berdaya saing dan sehat</p> <p>8. Bidang Perdagangan</p> <p>a. Menciptakan kelancaran Peneraan UTP dan BDKT</p> <p>b. Menciptakan sarana perdagangan yang memadai untuk memperlancar aktifitas perdagangan</p> <p>9. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</p> <p>a. Mengembangkan sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu</p> <p>10. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>a. Mengembangkan peran lembaga ekonomi perdesaan dalam</p>
------------------------------------	--

	<p>pembangunan desa</p> <p>b. Peningkatan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di perdesaan dalam pembangunan desa</p> <p>c. Pengembangan profil desa yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah</p> <p>11. Bidang Ketahanan Pangan</p> <p>a. Distribusi dan Akses Pangan</p> <p>b. Ketersediaan dan Cadangan Pangan</p> <p>c. Penanganan Kerawanan Pangan</p>
Misi 3 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah 2. Menyediakan regulasi/produk hukum daerah yang mengkomodasi nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan nilai-nilai hidup lainnya yang berkeadilan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan 3. Meningkatkan kapasitas DPRD 4. Meningkatkan koordinasi, keselarasan, dan efektivitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya 5. Meningkatkan pengelolaan dan penyelamatan dokumen/arsip daerah 6. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah b. Penataan sistem hukum Daerah c. Peningkatan kapasitas, fungsi dan peran DPRD d. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya. e. Pemenuhan biaya rutin kebutuhan dasar operasional kerja SKPD f. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan g. Penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan analisis terapan penyelenggaraan

<p>tingkat kabupaten, kecamatan dan desa</p> <p>7. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>8. Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah</p> <p>9. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah serta asset daerah</p> <p>10. Meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah</p> <p>11. Meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa</p> <p>12. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan karier aparatur berbasis kompetensi</p> <p>13. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian</p> <p>14. Meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya praktek KKN</p> <p>15. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik</p> <p>16. Meningkatkan Penegakkan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan</p>	<p>pemerintahan</p> <p>h. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah</p> <p>i. Penyelenggaraan Diklat aparatur dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur yang terencana sesuai dengan prioritas kebutuhan pemerintah daerah</p> <p>j. Peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa</p> <p>k. Internalisasi dan penyempurnaan peraturan tentang perencanaan dan pengembangan karier.</p> <p>l. Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang pelayanan administrasi kepegawaian dan sistem manajemen kinerja kepegawaian.</p> <p>m. Peningkatan sistem pengawasan internal</p> <p>n. Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pencegahan KKN</p> <p>o. Penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>p. Bidang Kearsipan</p> <p>q. Peningkatan administrasi kearsipan daerah</p> <p>r. Bidang Perencanaan Pembangunan</p> <p>s. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>t. Bidang Kesatuan Bangsa dan</p>
--	--

<p>Ketentraman serta perlindungan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat</p> <p>17. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat serta mengembangkan wawasan kebangsaan</p>	<p>Politik Dalam Negeri</p> <p>n. Peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.</p> <p>o. Peningkatan pendidikan politik dan pengembangan wawasan kebangsaan bagi masyarakat.</p> <p>2. Bidang Komunikasi dan Informatika</p> <p>a. Peningkatan teknologi, informasi dan komunikasi pemerintah</p>
<p>Misi 4:</p> <p>Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang Berkelanjutan</p>	
<p>1. Menyusun Landasan Hukum pengaturan rencana tata ruang</p> <p>2. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pengendalian dan pemanfaatan ruang</p> <p>3. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi penguasaan dan pemanfaatan tanah</p> <p>4. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perdesaan</p> <p>5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perumahan dan permukiman perdesaan dan perkotaan</p> <p>6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi antar wilayah</p> <p>7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana</p>	<p>1. Bidang Penataan Ruang</p> <p>a. Menyelenggarakan penataan ruang dengan peran aktif masyarakat</p> <p>b. Pembentukan landasan hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang</p> <p>c. Meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat</p> <p>2. Bidang Pertanahan</p> <p>a. Meningkatkan penyelenggaraan catur tertib pertanahan</p> <p>3. Bidang Perumahan</p> <p>a. Meningkatkan ketersediaan prasarana permukiman perdesaan dan perkotaan sehingga kualitas</p>

<p>pengairan</p> <p>8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan</p> <p>9. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan</p> <p>10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan</p> <p>11. Meningkatkan pelayanan dan ketersediaan energi serta ketenagalistrikan bagi masyarakat</p> <p>12. Menyusun mitigasi bencana dan fasilitasi serta koordinasi penanggulangan bencana alam.</p>	<p>lingkungan aman dan nyaman</p> <p>b. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan agar aman dan nyaman</p> <p>4. Bidang Pekerjaan Umum</p> <p>a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan</p> <p>b. Peningkatan aksesibilitas/kemudahan pergerakan kegiatan antar wilayah untuk mendukung kegiatan perekonomian daerah</p> <p>c. Peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumberdaya air untuk mendukung pembangunan bidang pertanian dan menjaga ketersediaan air bagi kehidupan masyarakat.</p> <p>5. Bidang Perhubungan</p> <p>a. Peningkatan aksesibilitas/kemudahan pergerakan kegiatan antar wilayah untuk mendukung kegiatan perekonomian daerah.</p> <p>6. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>a. Pengembangan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan</p> <p>b. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan</p> <p>7. Bidang Lingkungan Hidup</p> <p>a. Peningkatan kualitas lingkungan</p>
---	--

	<p>hidup dan pencegahan serta penanggulangan kerusakan/pencemaran lingkungan</p> <p>b. Peningkatan upaya penanggulangan bencana alam</p> <p>8. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</p> <p>a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan.</p>
--	--

6.2. Kebijakan Kewilayahan

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah, oleh karena itu kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Tasikmalaya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2011-2016 tidak terlepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

- a. pemantapan lahan sawah beririgasi serta meningkatkan produktivitas pertanian;
- b. pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;
- c. pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
- d. pengembangan sistem perkotaan – perdesaan;
- e. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
- f. pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi pada wilayah belum berkembang;
- g. pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan, dan pembangunan berkelanjutan; dan

- h. peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan.

Wujud dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas : rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah

Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas:

1. Rencana sistem pusat kegiatan
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem perdesaan.
2. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah
 - a. rencana sistem prasarana utama yaitu:
 - (1) rencana sistem jaringan transportasi darat;
 - (2) rencana sistem jaringan perkeretapian; dan
 - (3) rencana sistem jaringan transportasi laut.
 - b. rencana sistem prasarana lainnya, yaitu:
 - (1) rencana sistem jaringan prasarana energi;
 - (2) rencana sistem jaringan telekomunikasi;
 - (3) rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
 - (4) rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Pengembangan sistem perkotaan tidak terlepas dari pedoman yang menjadi acuan penataan ruang kabupaten yaitu Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional dan RTRW Provinsi di Kabupaten Tasikmalaya. Sistem perkotaan di Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas Pusat Kegiatan Lokal (PKL), PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) dan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan). Secara umum kriteria fungsi sistem perkotaan/pusat kegiatan yang digunakan untuk lingkup wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dapat dilihat pada tabel 6.2 sebagai berikut:

Tabel 6.2
Kriteria Fungsi Sistem Perkotaan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

No	Fungsi kota	Kriteria
1.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan; dan/atau ▪ Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan ▪ Diusulkan oleh pemerintah kabupaten
2.	Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beberapa pusat yang berpotensi/ dipromosikan untuk dikembangkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal
3.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa ▪ pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL, dengan notasi PKLp atau PKL promosi ▪ pusat kegiatan yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK)

Sumber: PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN & Permen PU No 16 Tahun 2009

Sistem pusat kegiatan di Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan satu pusat kegiatan utama wilayah kabupaten sesuai arahan RTRWP yaitu Singaparna dan Karangnunggal sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan mempromosikan pusat utama lainnya sesuai dengan potensinya.
- 2) Mempromosikan beberapa pusat kegiatan lainnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang berpotensi untuk dikembangkan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), diantaranya:
 - a) Kawasan Perkotaan Manonjaya; dan
 - b) Kawasan Perkotaan Ciawi.
- 3) Penetapan ibukota kecamatan lainnya yang tidak termasuk dalam PKL dan PKLp di wilayah Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi:
 - a) Kawasan Perkotaan Rajapolah;
 - b) Kawasan Perkotaan Mungunreja;
 - c) Kawasan Perkotaan Taraju;
 - d) Kawasan Perkotaan Cipatujah;

- e) Kawasan Perkotaan Bantarkalong;
- f) Kawasan Perkotaan Cibalong;
- g) Kawasan Perkotaan Cikatomas; dan
- h) Kawasan Perkotaan Cineam.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten tersebut berfungsi :

1. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
2. Sebagai arahan perletakan sistem jaringan prasarana wilayah yang menunjang dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan terutama pusat-pusat kegiatan/perkotaan.

Adapun rencana pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Tasikmalaya dengan menetapkan 1 (satu) dan atau beberapa desa yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan pada masing-masing wilayah kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang ditetapkan di Kabupaten Tasikmalaya meliputi :

1. Kecamatan Kadipaten meliputi:
 - a. Desa Mekarsari; dan
 - b. Desa Kadipaten.
2. Kecamatan Pagerageung meliputi:
 - a. Desa Pagerageung; dan
 - b. Desa Sukamaju.
3. Kecamatan Sukaresik meliputi:
 - a. Desa Sukamenak;
 - b. Desa Tanjungsari; dan
 - c. Desa Sukaresik.
4. Kecamatan Jamanis meliputi:
 - a. Desa Condong;
 - b. Desa Karangmulya; dan
 - c. Desa Tanjungmekar.
5. Kecamatan Sukahening meliputi:
 - a. Desa Banyurasa; dan
 - b. Desa Sukahening.
6. Kecamatan Sukaratu meliputi:
 - a. Desa Gunungsari; dan
 - b. Desa Sukaratu.
7. Kecamatan Cisayong meliputi:
 - a. Desa Cisayong;
 - b. Desa Sukasetia; dan
 - c. Desa Sukaraharja

8. Kecamatan Sariwangi meliputi:
 - a. Desa Sukamulih; dan
 - b. Desa Sirnasari.
9. Kecamatan Leuwisari meliputi:
 - a. Desa Ciawang; dan
 - b. Desa Jayamukti.
10. Kecamatan Cigalontang meliputi:
 - a. Desa Sukamanah; dan
 - b. Desa Lengkongjaya.
11. Kecamatan Salawu meliputi:
 - a. Desa Salawu; dan
 - b. Desa Neglasari.
12. Kecamatan Tanjungjaya meliputi:
 - a. Desa Sukanagara; dan
 - b. Desa Tanjungjaya.
13. Kecamatan Sukarame meliputi:
 - a. Desa Sukarame; dan
 - b. Desa Wargakerta.
14. Kecamatan Sukaraja meliputi:
 - a. Desa Mekarjaya; dan
 - b. Desa Janggala.
15. Kecamatan Padakembang meliputi:
 - a. Desa Rancapaku; dan
 - b. Desa Padakembang.
16. Kecamatan Puspahiangan meliputi:
 - a. Desa Puspahiangan; dan
 - b. Puspasari.
17. Kecamatan Sodonghilir meliputi:
 - a. Desa Cukangkawung;
 - b. Desa Parumasan; dan
 - c. Desa Sodonghilir.
18. Kecamatan Bojonggambir meliputi:
 - a. Desa Bojonggambir; dan
 - b. Desa Girimukti.
19. Kecamatan Jatiwaras meliputi:
 - a. Desa Kaputihan; dan
 - b. Desa Jatiwaras.
20. Kecamatan Cikalong meliputi:
 - a. Desa Singkir; dan
 - b. Desa Cikalong.
21. Kecamatan Gunungtanjung meliputi:
 - a. Desa Bojongsari; dan
 - b. Desa Gunungtanjung.
22. Kecamatan Salopa meliputi:
 - a. Desa Karyawangi;
 - b. Desa Kawitan; dan

- c. Desa Karyamandala.
- 23. Kecamatan Karangjaya meliputi:
 - a. Desa Karanglayung; dan
 - b. Desa Karangjaya.
- 24. Kecamatan Bojongasih meliputi:
 - a. Desa Bojongasih; dan
 - b. Desa Toblongan.
- 25. Kecamatan Parungponteng meliputi:
 - a. Desa Cigunung; dan
 - b. Desa Parungponteng.
- 26. Kecamatan Culamega meliputi:
 - a. Desa Cikuya; dan
 - b. Desa Cintabodas.
- 27. Kecamatan Pancatengah meliputi:
 - a. Desa Tonjong; dan
 - b. Desa Cibongas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat pada Tabel 6.3 sebagai berikut:

Tabel 6.3
Sistem Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Tasikmalaya

No.	Nama Kecamatan	Sistem Perkotaan		Sistem Perdesaan
1	Ciawi		PKLp	
2	Kadipaten			PPL
3	Pagerageung			PPL
4	Sukaresik			PPL
5	Jamanis			PPL
6	Sukahening			PPL
7	Rajapolah		PPK	
8	Sukaratu			PPL
9	Cisayong			PPL
10	Singaparna	PKL		
11	Sariwangi			PPL
12	Leuwisari			PPL
13	Cigalontang			PPL
14	Salawu			PPL
15	Mangunreja		PPK	
16	Tanjungjaya			PPL
17	Sukarame			PPL
18	Sukaraja			PPL
19	Padakembang			PPL
20	Taraju		PPK	
21	Puspahiang			PPL
22	Bojonggambir			PPL
23	Sodonghilir			PPL

No.	Nama Kecamatan	Sistem Perkotaan		Sistem Perdesaan
24	Manonjaya		PKLp	
25	Jatiwaras			PPL
26	Cineam			PPK
27	Karangjaya			PPL
28	Salopa			PPL
29	Gunungtanjung			PPL
30	Karangnunggal	PKL		
31	Cipatujah			PPK
32	Cibalong			PPK
33	Parungponteng			PPL
34	Bantarkalong			PPK
35	Bojongasih			PPL
36	Culamega			PPL
37	Cikalong			PPL
38	Pancatengah			PPL
39	Cikatomas			PPK

Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya 2012

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya. Rencana kawasan lindung dalam lingkup wilayah kabupaten mencapai total luas 173.686,72 ha atau 64,12 %, dan rencana kawasan budidaya, yaitu 97.195,04 ha atau 35,88 %. Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.4

Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi:

1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan;
2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dan RPJP dua puluh tahun; dan
4. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.

Tabel 6.4

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

No	Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)	%
A	KAWASAN LINDUNG		
1	Hutan Konservasi	24,157	0,01
2	Hutan Lindung	16.102,604	5,94
3	Kaw. Gn Berapi Daerah Bahaya	6.074,870	2,24
4	Kaw. Gn Berapi Daerah Terlarang	1.186,017	0,44
5	Kaw. Rawan Grkan Tanah Rendah	34.994,973	12,92
6	Kaw. Rawan Grkan Tanah Menengah	70.319,677	25,96
7	Kaw. Rawan Grkan Tanah Tinggi	17.389,499	6,42
8	Kaw. Rawan Tsunami	4.848,306	1,79
9	Kaw. Resapan Air	14.686,445	5,42
10	Sempadan Laut	475,330	0,18
11	Sempadan Sungai	7.584,843	2,80
	TOTAL KAWASAN LINDUNG	173.686,721	64,12
B	KAWASAN BUDIDAYA		
1	Enclave	788,279	0,29
2	Hutan Produksi	2.852,646	1,05
3	Hutan Produksi Terbatas	25.502,798	9,41
4	Kaw. Pedesaan	13.976,558	5,16
5	Kaw. Perkotaan	2.051,701	0,76
6	Lahan Basah	44.646,370	16,48
7	Lahan Kering	1.195,556	0,44
8	Perkebunan	6.181,129	2,28
	TOTAL KAWASAN BUDIDAYA	97.195,037	35,88
	TOTAL KAWASAN LINDUNG DAN BUDIDAYA	270.881,758	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Tasikmalaya 2012

Didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, juga telah ditetapkan Kawasan strategis Kabupaten Tasikmalaya. Kawasan strategis, merupakan kawasan yang diprioritaskan penataan ruangnya karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan.

Kawasan strategis di Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas :

1. Kawasan strategis provinsi yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat. Kawasan strategis provinsi di Kabupaten Tasikmalaya adalah kawasan pada wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang penataan ruangnya yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi dari sudut **Pertahanan dan Keamanan**. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan ditetapkan dengan kriteria:

- a. Diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategis nasional;
- b. Diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan
- c. Merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas

Didasari analisa yang bertumpu dari sudut pertahanan dan keamanan, kawasan strategis provinsi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya berupa kawasan strategis Pulau Manuk di Kecamatan Cikalong.

2. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), yang merupakan hasil perumusan dan kesepakatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan Strategis di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel 6.5 berikut ini :

Tabel 6.5
Kawasan Strategis di Kabupaten Tasikmalaya

NO	KRITERIA	SUB KRITERIA	PENETAPAN
1	KSK dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi ekonomi cepat tumbuh; 2. Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; 3. Potensi ekspor; 4. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; 5. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; 6. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; 7. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau 8. Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Perkotaan Ciawi b. Kawasan Perkotaan Karangnunggal c. Kawasan Perkotaan Manonjaya d. Kawasan Industri dan Perdagangan Kerajinan Rajapolah e. Kawasan wisata Pantai Karangtawulan f. Kawasan Wisata Alam Galunggung
2	KSK dari sudut kepentingan Sosial Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya; 2. Prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya; 3. Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan; 4. Tempat perlindungan peninggalan budaya; 5. Tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau 6. Tempat yang memiliki potensi pengembangan kualitas manusia (Akhlaq, Iman dan takwa) 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Budaya Kampung Naga b. Kawasan wisata Ziarah Pamijahan
3	KSK dari sudut kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan posisi geografis sumber daya alam strategi, pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Strategis Kabupaten Geothermal Karaha Bodas b. Kawasan Strategis Batu Mulia Jasper

NO	KRITERIA	SUB KRITERIA	PENETAPAN
	Teknologi Tinggi	1. atom dan nuklir; 2. Sumber daya alam strategis; 3. Fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; 4. Fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau 5. Fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.	di Desa Buni Asih Kecamatan Pancatengah c. Kawasan Plasma Nuftah Sirah Cimunjul

Kawasan pusat pemerintahan yang ditetapkan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dilihat dari posisi lokasi dan fungsi serta perannya merupakan kawasan yang sangat strategis dalam upaya pengembangan wilayah kabupaten secara keseluruhan.

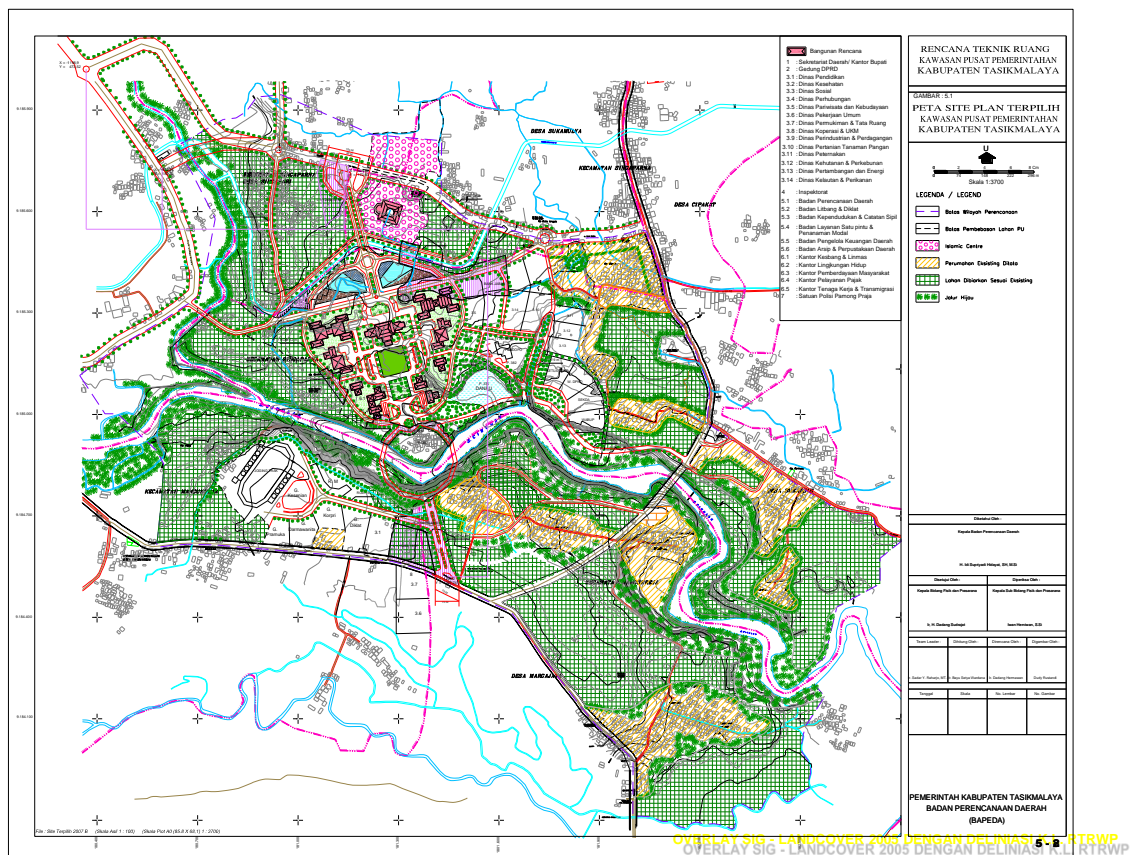
Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031, mengisyaratkan bahwa Singaparna sebagai kota utama di Kabupaten Tasikmalaya yang akan berperan sebagai gerbang utama pengembangan wilayah, yaitu sebagai Kota Pusat Kegiatan Wilayah (KPKW) dan juga sebagai Kota Pusat Kegiatan Sub Wilayah (KPKSW) dari Wilayah Pengembangan Utama Tengah (WPU-Tengah). Dan berdasarkan Perda Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Rencana Detail Ibukota Kabupaten Tasikmalaya Pasal 7, 9, menyatakan bahwa Wilayah Fungsional Ibukota Kabupaten Tasikmalaya seluas \pm 4.139,70 ha, meliputi 16 Desa di 6 Kecamatan yaitu

1. Kecamatan Singaparna: Desa Sukahening, Cikunten, Singasari, Singaparna, Sukamulya, Sukaasih, Cipakat, Cintaraja, Cikunir, dan Cikadongdong.
2. Kecamatan Mangunreja: Desa Mangunreja, dan Margajaya.
3. Kecamatan Sariwangi: Desa Selawangi.
4. Kecamatan Leuwisari :Desa Arjasari.
5. Kecamatan Padakembang: Desa Cilampunghilir;
6. Kecamatan Sukarame: Desa Sukarame.

Adapun Kawasan Pusat Pemerintahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya meliputi area seluas ± 247 ha, terdiri dari :

- Kawasan Inti Pusat Pemerintahan terletak di Desa Sukaasih, dan Sukamulya Kecamatan Singaparna.
- Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan terletak di Desa Singasari, Sukamulya, Kecamatan Singaparna, serta Desa Mangunreja dan Margajaya Kecamatan Mangunreja.

RTRK PUSAT PEMERINTAHAN



Untuk mewujudkan kawasan strategis pusat pemerintahan ibukota kabupaten dan menunjang pertumbuhan, perkembangan serta memperkuat dan memperlancar mobilitas, aksesibilitas pergerakan orang maupun barang dari dan ke wilayah Ibukota, direncanakan beberapa prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2011-2015 meliputi kegiatan :

1. Pembebasan Lahan
2. Pematangan Lahan dan Pembuatan Badan Jalan
3. Pembuatan Bangunan Pelengkap Jalan
4. Pembangunan Gedung Kantor

5. Pembangunan Perkerasan Jalan
6. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau/Taman
7. Pembangunan Utilitas
 - a. Jaringan Air Bersih
 - b. Jaringan Listrik
 - c. Jaringan Telepon
 - d. Jaringan drainase perkotaan
 - e. Jaringan teknologi komunikasi dan informasi

6.3. Kebijakan Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tasikmalaya dalam lima tahun kedepan, maka kebijakan pendanaan pembangunan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan anggaran berorientasikan pada program-program upaya pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia, melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan bidang penunjang lain, dengan memenuhi terlebih dahulu kebutuhan dasar pemerintah daerah seperti belanja gaji serta belanja tetap.
2. Mengimplementasikan amanat konstitusi dan kebijakan nasional yang harus dilaksanakan oleh daerah seperti prioritas bidang pendidikan sebesar 20% (duapuluh persen) dan bidang kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen) secara bertahap.
3. Meningkatkan proporsi belanja langsung terhadap jumlah belanja daerah
4. Alokasi belanja langsung diprioritaskan untuk program pembangunan daerah yang menjadi unggulan, seperti program gerbang desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan infrastruktur wilayah dan pengembangan agribisnis.
5. Konsistensi pengembangan agribisnis melalui alokasi belanja langsung untuk bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar minimal 9 % dari total belanja langsung.

6. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi dan agribisnis, maka pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, pengairan dan listrik, akan diarahkan pada sentra-sentra produksi di perdesaan. Proporsi belanja langsung untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ini sebesar minimal 18 % dari total belanja langsung.
7. Memberikan perhatian khusus kepada 10 kecamatan yang mempunyai nilai IPM terendah untuk memperoleh prioritas pendanaan atau program pembangunan.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk mencapai visi dan misi, selanjutnya dipertegas melalui strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi yang dilaksanakan perlu didukung oleh kebijakan yang bersifat umum dan dikaitkan dengan prioritas pembangunan serta program yang akan dilaksanakan. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antar bidang urusan pemerintahan daerah. Dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan kebijakan yang ditetapkan.

Setelah kebijakan umum, langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan daerah. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Program pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 yang dirumuskan dalam RPJMD, merupakan program prioritas. Program prioritas ini dirumuskan dan dipilih berdasarkan permasalahan dan isu strategis sebagaimana ditetapkan dalam bab empat sebelumnya dan program prioritas Bupati yang dijanjikan semasa kampanye.

7.1. Kebijakan Umum

Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Tasikmalaya dirumuskan dengan beberapa dasar pertimbangan yaitu:

- 1) Dinamika global yang dirumuskan dalam 8 (delapan) Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals/MDGs) diantaranya memberantas kemiskinan dan kelaparan;

pendidikan dasar untuk semua; menurunkan angka kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu. Dinamika global lainnya pemberlakuan ASEAN Economic Community tahun 2015.

- 2) Dinamika Nasional yakni Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN, diantaranya; reformasi birokrasi dan tata kelola; penanggulangan kemiskinan; lingkungan hidup dan bencana.
- 3) Dinamika Regional yakni 10 (sepuluh) Tujuan Pembangunan Jawa Barat yang tertera dalam RPJMD Jawa Barat, diantaranya: peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan; pembangunan perdesaan.
- 4) Dinamika Lokal yakni 14 (empat belas) isu strategis pembangunan kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam bab empat RPJMD ini.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka kebijakan umum pembangunan Kabupaten Tasikmalaya 2011-2015 ditetapkan sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing melalui pendidikan keagamaan, optimalisasi kualitas dan sebaran layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia;
2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui kebijakan agribisnis yang unggul;
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola pemerintahan, perluasan partisipasi publik dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
4. Memperkuat kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olah raga, seni, budaya dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal;
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar terutama wilayah perdesaan sebagai wujud keberpihakan

kepada masyarakat desa dalam kerangka penanggulangan kemiskinan.

7.2.1. Program Prioritas Bupati

Program prioritas Bupati merupakan janji Bupati dan Wakil Bupati selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah yang menjadi prioritas dalam program pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya selama lima tahun ke depan. Dengan memperhatikan kondisi potensi dan permasalahan yang ada, Bupati dan Waki Bupati merencanakan program pembangunan prioritas yang berpihak kepada masyarakat perdesaan melalui suatu **“Gerakan Bangun Desa (Gerbang Desa)”** Kabupaten Tasikmalaya. Dengan program Gerbang Desa ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tasikmalaya akan kembali pulang ke desa untuk membangun desa, dalam arti memprioritaskan pembangunan perdesaan untuk menjadi Kabupaten Tasikmalaya yang maju dan sejahtera.

Dalam Gerakan Bangun Desa (Gerbang Desa), ada 5 (lima) program prioritas yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Peningkatan kesejahteraan, petani, buruh tani, nelayan dan aparaturnya
2. Peningkatan jalan Desa
3. Listrik Masuk Desa
4. Irigasi, air bersih perdesaan dan sanitasi lingkungan perdesaan
5. Telekomunikasi dan informasi masuk desa

Pelaksanaan kelima program prioritas tersebut diharapkan akan mempunyai efek berantai terhadap tingkat kesehatan, pendidikan, dan perekonomian masyarakat perdesaan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7.2.2. Program Pembangunan Berdasarkan Misi

Selain program prioritas Bupati, dalam perencanaan pembangunan lima tahunan ditetapkan program-program yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum sebagai implementasi urusan-urusan pemerintahan kabupaten, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Program Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya 2011-2015 yang dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat dalam matrik pesandingan di bawah ini. Matrik persandingan tersebut disajikan agar memudahkan menguji konsistensi logika berpikir penyusunan rencana program pembangunan Kabupaten Tasikmalaya 2011-2015.

Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan	Program	SKPD PENANGGUNG JAWAB				
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran								
Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlakulkarimah, Berkualitas dan Mandiri										
1. Mewujudkan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan tata kelola pemerintahan	1,1	Meningkatnya nilai-nilai empati masyarakat terhadap kerawanan sosial	1	Meningkatnya pelayanan pemerintahan untuk kelompok dhuafa	1.1.1	Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin dan anak terlantar	1	Fasilitasi bantuan dana untuk fakir miskin dan anak terlantar	1. Setda, 2. Kantor Kementerian Agama 3. Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja	
								2		Pembinaan Anak Terlantar
								3		Subsidi Panti Sosial
			2	Menurunnya konflik sosial berlatarbelakang agama dan etnik	1.1.2	Peningkatan pemahaman nilai-nilai agama dan kebangsaan	1	Pembinaan nilai-nilai agama dan kebangsaan serta Peningkatan koordinasi lembaga keagamaan		
	1,2	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai landasan moral dan spiritual	3	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana lembaga keagamaan	1.2.1	Peningkatan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana lembaga keagamaan	1	Fasilitasi pembangunan lembaga keagamaan		
							1	Fasilitasi bantuan keagamaan		
							5	Meningkatnya jumlah jemaah haji	1.2.3	Penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji

	1,3	Meningkatnya peran lembaga- lembaga keagamaan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat	1 Meningkatkan Kuantitas Sarana dan Prasarana Lembaga Keagamaan	3. Meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat berbasis pesantren	1.3.1	Meningkatkan pendidikan keagamaan secara proporsional	1	Peningkatan bantuan lembaga keagamaan	
			2 Meningkatkan jumlah koperasi pondok pesantren		1.3.2	Peningkatan swadaya masyarakat dalam pengelolaan koperasi di Pondok Pesantren	1	Pemberdayaan Usaha Kecil dilingkungan Pondok Pesantren	
			3 Meningkatkan Pondok Pesantren yang mempunyai BMT		1.3.3	Meningkatnya lembaga keuangan syariah	1	Peningkatan aksesibilitas pondok pesantren kepada lembaga keuangan syariah	
	1,4	Optimalisasi pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah untuk pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka penanggulangan kemiskinan	1 Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, infaq dan sadaqah	4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pendayagunaan zakat, infaq dan sadaqah	1.4.1	Peningkatan kebijakan pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi umat	1	Peningkatan peran lembaga- lembaga pengelola zakat, infaq dan sadaqah	
			2 Meningkatkan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Shodakoh		1.4.2	Peningkatan kapasitas kelembagaan Bazda	2	Penguatan SDM Pengelola Bazda	
2. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat melalui perluasan akses, peningkatan mutu dan perbaikan tata kelola	2,1	Tercapainya wajar dikdas 9 tahun	1 Meningkatkan APK SD/MI Sederajat	5. Meningkatkan APK dan APM di jenjang pendidikan dasar	2.1.1	Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan dasar	1	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan
			2 Meningkatkan APM SD/MI Sederajat	6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar					
			3 Meningkatkan APK SMP/MTs Sederajat						

		4 Meningkatkan APM SMP/MTs Sederajat				
	2,2 Terlaksananya rintisan wajar 12 tahun	1 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SLTA/MA	7. Meningkatkan APK dan APM di jenjang pendidikan menengah	2.2.1 Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan menengah	1 Pendidikan Menengah	
		2 Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SLTA/MA	8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan menengah			
		3 Meningkatnya angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA				
		4 Meningkatnya Angka melanjutkan ke perguruan tinggi				
		5 Meningkatnya rata-rata lama sekolah				
	2,3 Meningkatnya lembaga pendidikan bagi anak usia dini dan pendidikan luar sekolah yang merata, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat	1 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	9. Meningkatkan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	2.3.1 Peningkatan lembaga pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	1 Pendidikan Anak Usia Dini	
		2 Meningkatnya angka melek huruf			2 Pendidikan Non Formal	
	2,4 Meningkatnya mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal	1 Meningkatnya jumlah pendidik dengan kualifikasi S1 dan S2 serta bersertifikasi		2.4.1 Peningkatan mutu pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik	1 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	

		2 Meningkatnya jumlah sekolah terakreditasi	10. Meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan		2 Manajemen Pelayanan Pendidikan	
	2,5 Tersedianya bantuan beasiswa / keringanan biaya bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu	1 Meningkatnya jumlah beasiswa untuk jenjang pendidikan dasar menengah	11. Meningkatkan dukungan anggaran dan fasilitasi untuk pemberian beasiswa di semua jenjang pendidikan	2.5.1 Pemberian beasiswa/keringanan biaya pendidikan terhadap masyarakat yang tidak mampu	1 Beasiswa pendidikan bagi siswa miskin	
		2 Menurunnya jumlah siswa dropout				
	2,6 Meningkatnya kreatifitas siswa di semua jenjang pendidikan	1 Meningkatnya jumlah siswa yang mengikuti kegiatan lomba kreatifitas di tingkat propinsi dan nasional	12. Meningkatkan kreativitas siswa melalui berbagai event perlombaan	2.6.1 Peningkatan kreatifitas siswa di semua jenjang pendidikan di tingkat kabupaten, Propinsi dan Nasional	1 Pengembangan kreatifitas siswa	
	2,7 Meningkatnya kemampuan dan budaya baca masyarakat	1 Meningkatnya kelembagaan teknis perpustakaan desa/kelurahan	13. Mengembangkan budaya baca dan perpustakaan khususnya di perdesaan	2.7.1 Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat	1 Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Kantor Perpustakaan
		2 Meningkatnya koleksi bahan perpustakaan desa/kelurahan dan perpustakaan umum				
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta pembiayaan yang terjangkau oleh masyarakat	3,1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam promosi kesehatan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan	1 Cakupan Desa Siaga Aktif		3.1.1 Peningkatan kemandirian masyarakat dalam kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat	1 Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan
		2 Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD	14. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan lingkungan sehat			

		3	Meningkatnya rumah tangga PHBS			2	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			
	3,2	Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	1	Meningkatnya Cakupan desa UCI Universal Child Immunization (UCI)	15. Meningkatkan pelayanan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	3.2.1	Peningkatan upaya penemuan, pencegahan, pemberantasan dan pengendalian kasus penyakit menular dan tidak menular	1	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
			2	Meningkatnya cakupan pelayanan penyakit menular langsung yang ditemukan						
			3	Meningkatnya cakupan pelayanan penyakit bersumber binatang yang ditemukan						
	3,3	Meningkatnya upaya perbaikan gizi masyarakat	1	Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	16. Meningkatkan gizi masyarakat dan Keluarga sadar gizi	3.3.1	Peningkatan Gizi keluarga	1	Perbaikan Gizi Masyarakat	
			2	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan						
	3,4	Meningkatnya upaya pelayanan dan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin	1	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di Puskesmas dan jaringannya	18. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin secara Cuma-Cuma di Puskesmas dan jaringannya	3.5.1	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu	1	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	- RSUD & Dinas Kesehatan

		2	Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin							
	3,5	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit	1	Meningkatnya jumlah puskesmas dengan perawatan DTP dan puskesmas mampu PONED	19. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasana kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas	3.6.1	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya	1	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	
	3,6	Meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, anak dan masyarakat resiko tinggi	1	Menurunnya Jumlah Kematian Bayi	21. Menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita	3.8.1	Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, anak dan lansia	1	Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak	Dinas Kesehatan
			2	Menurunnya Jumlah Kematian Balita						
			3	Menurunnya Jumlah Kematian Ibu						
			4	Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan						
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, mandiri dan berbudaya	4,1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas	1	Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	22. Meningkatkan pelayanan, perlindungan, santunan dan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan social	4.1.1	Mewujudkan Kemandirian Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan PSKS	1	Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja

		2 Jumlah partisipasi sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial			5 Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	
	4,2 Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja	1 Jumlah tenaga kerja yang terlatih di Balai Latihan Kerja per tahun	23. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan kesempatan kerja serta fasilitasi perlindungan bagi tenaga kerja	4.2.1 Mengembangkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	1 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja
		2 Meningkatnya jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan				
		2 Meningkatnya Jumlah Kepesertaan Jamsostek				
	4,3 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan penyebaran penduduk	1 Meningkatnya Prevalensi peserta KB aktif dan Peserta KB Baru	24. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan upaya penyebaran penduduk	4.3.1 Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	1 Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB
		2 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)				
		3 Terbinanya Pasangan Usia Subur			2 Pelayanan Kontrasepsi	
		4 Transmigrasi		4.3.2 Peningkatan Penyebaran Penduduk	1 Transmigrasi Lokal	Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja
	4.4 Terwujudnya Data Kependudukan yang dinamis dan akurat serta terwujudnya tertib administrasi dan	1 Meningkatnya Kepemilikan KTP dan Akta Kelahiran per1000 penduduk	25. Meningkatkan pelayanan dan penataan administrasi kependudukan	4.4.1 Menciptakan Administrasi Kependudukan yang akuntabel	1 Penataan administrasi Kependudukan	Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja

	meningkatkan pelayanan di bidang kependudukan						
	4,5 Terwujudnya pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang pembangunan	1 Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	26. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	4.5.1 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan		Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB
		2 Jumlah desa yang mengikuti Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) dan meningkatnya prestasi dalam Lomba P2WKSS Tingkat Provinsi		4.5.2 Peningkatan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di perdesaan dalam pembangunan desa	1 Peningkatan keberdayaan masyarakat di perdesaan		
	4,6 Meningkatnya kualitas dan peran generasi muda dalam pembangunan daerah	1 Jumlah Karang Taruna	27. Peningkatan peran organisasi / lembaga kemasyarakatan di perdesaan dalam pembangunan desa	4.6.1 Peningkatan Peran Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	1 Peningkatan Peran serta Kepemudaan		Bagian Kesra & Dinas Pendidikan
		2 Jumlah organisasi kepemudaan dan pemuda pelopor pembangunan	28. Meningkatkan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah				
	4,7 Meningkatnya prestasi dalam bidang olahraga	1 Jumlah induk organisasi olahraga di kabupaten	29. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga serta olahragawan berprestasi secara berkelanjutan	4.7.1 Peningkatan Pembinaan Olahraga melalui lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi olahraga	1 Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga		Bagian Kesra & Dinas Pendidikan
		2 Jumlah atlit yang dibina			2 Pembinaan dan Pemasarakat n Olah Raga		

	4,8	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah	1 Jumlah event seni dan budaya	30. Mengembangkan nilai dan pengelolaan budaya lokal	4.8.1 Peningkatan Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah	1 Pengembangan Nilai Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			2 Jumlah sarana penyelenggaraan seni budaya		4.8.2 Penyusunan Perda Pelestarian Cagar Budaya	2 Pengelolaan Keragaman Budaya	
			3 Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya			3 Pengelolaan Kekayaan Budaya	
Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dengan Keunggulan Agribisnis							
1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perluasan kegiatan ekonomi yang berbasis potensi desa	1 Meningkatnya daya saing, produktivitas dan produksi usaha pertanian, industri kecil, dan pariwisata dalam upaya meningkatkan pendapatan petani/ masyarakat	1 Meningkatnya produksi pertanian : padi (padi sawah dan padi gogo) dan palawija (jagung, kedelai kacang tanah, ubi kayu), sayur-sayuran (cabe merah, mentimun, tomat) dan buah-buahan : (manggis, salak, durian, pisang)	1. Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah produk pertanian dan peternakan		1.1.1 Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura 1	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
		2 Meningkatnya Populasi Ternak (Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas)			1.1.2 Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil peternakan	1 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan
		3 Meningkatnya produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap, pemanfaatan potensi pesisir	2. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap		1.1.3 Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil perikanan dan kelautan	1 Pengembangan Budidaya Perikanan 2 Pengembangan Perikanan Tangkap	Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan

		dan laut, Sarana Prasarana Penangkapan,					
		4 Jumlah kunjungan wisatawan ke Kab.Tasikmalaya				1 Pengembangan Destinasi Pariwisata	
		5 Tersedianya objek wisata yang berkualitas dan berwawasan lingkungan					Dinas Pariwisata
		6 Jumlah unit usaha industri : Industri Kecil Industri Kecil Menengah	4. Meningkatkan daya saing industri kecil	1.1.5 Mewujudkan sentra-sentra industri kecil dan menengah khususnya dalam bidang industri kreatif	1 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan
		7 Jumlah nilai Investasi					
		8 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB				1 Penataan struktur industri	
		10 Pertumbuhan Industri				1 Pengembangan sentra-sentra industri potensial	
		1 Tersusunannya 1 Dokumen Perencanaan Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RP-RHL dan RTn-RHL) per tahun	5. Meningkatkan rehabilitasi lahan dan fungsinya yang berkelanjutan (ekonomi, ekologi, sosial)	1.1.6 Mengembangkan Penanganan Rehabilitasi Hutan, Lahan Kebun dan DAS	1 Perencanaan dan Pengembangan Hutan dan Lahan		Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		1 Berkurangnya 2 Lahan Kritis				1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan	
		13 Meningkatnya hasil hutan kayu dan non kayu				1 Pemanfaatan Potensi Sumberdaya hutan dan lahan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan

		1 4	Meningkatkanya Jumlah Produksi Bibit di UPTD Hutbun			1	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	
1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perluasan kegiatan ekonomi yang berbasis potensi desa	1 Berkembangnya sentra dan kluster, 2 produk unggulan berdasarkan potensi lokal	2	Terlaksananya proses perencanaan kawasan agropolitan	7. Meningkatkan sistem usaha agribisnis berbasis komoditas unggulan dengan dukungan permodalan		3	Pengembangan Usaha Agribisnis	Bappeda dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	1 Terwujudnya pasar, 3 agribisnis	1	Terlaksananya kegiatan promosi komoditas unggulan perkebunan dan pertanian		1.3.1	Meningkatkan akses pasar untuk produk-produk agribisnis	1 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2. Meningkatkan peran lembaga perekonomian dan perdagangan tradisional.	2 Meningkatnya kemampuan dan peran koperasi, 1 UMKM dan Lembaga Keuangan Mikro dalam menunjang kegiatan perekonomian daerah	1	Meningkatnya Jumlah koperasi baru per tahun	8. Memperkuat kelembagaan, sumberdaya manusia dan sistem pembiayaan Koperasi dan UMKM	2.1.1	Mewujudkan KUMKM yang tangguh dan mandiri	1 Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif bagi KUMKM	Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan
		2	Meningkatnya Jumlah Koperasi dan UKM sehat dan aktif				2 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM	
		3	Kontribusi BUMD terhadap PAD		2.1.2	Mewujudkan BUMD yang sehat	1 Pengembangan jaringan dan permodalan PD. BPR	Bag. Perekonomian & Penanaman Modal
			Meningkatnya pengawasan terhadap barang beredar		2.2.2	Menginformasikan arti pentingnya Undang- Undang Perlindungan Konsumen	1 Monitoring dan Pengawasan	
		4	Jumlah peneraan UTTP dan BDKT		2.2.3	Menciptakan kelancaran Peneraan UTTP dan BDKT	1 Pengawasan dan pendampingan tera dan tera ulang alat UTTP	
		5	Jumlah wajib daftar perusahaan		2.2.4	Mewujudkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan pendaftaran perusahaan	1 Pembinaan penyederhanaan pengisian formulir pendaftaran perusahaan	

				kepada pelaku usaha		
		6 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB			2 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	
		7 Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang memadai		2.2.5 Pembinaan, penataan sarana dan prasarana perdagangan	1 Penyempurnaan dan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	
		8 Volume dan nilai ekspor Kab. Tasikmalaya		2.2.6 Memberikan kemudahan prosedur ekspor dan impor	1 Peningkatan dan Pengembangan ekspor	Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan
		9 Laju pertumbuhan investasi			2 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	
		10 Persentase ketepatan waktu dan biaya pelayanan perizinan		2.2.8 Mengembangkan sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu	1 Pelayanan Perizinan Terpadu	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)
	23 Terwujudnya pasar tradisional yang nyaman dan representatif	1 Meningkatnya jumlah pasar tradisional yang memadai		2.3.1 Menciptakan sarana perdagangan yang memadai untuk memperlancar aktifitas perdagangan	1 Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan
3. Menjadikan desa sebagai kesatuan komunitas ekonomi, sosial, dan budaya serta merupakan <i>data base</i> pengambilan kebijakan	31 Terwujudnya desa unggulan	1 Jumlah desa yang mendapatkan dana stimulan desa unggul dan mandiri		3.1.1 Mewujudkan desa unggul dan mandiri	1 Percepatan Pembangunan Perdesaan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB
	32 Terwujudnya Badan usaha Milik Desa (BUMDES)	1 Meningkatnya jumlah desa yang memiliki BUMDES	9. Menciptakan BUMDes yang sehat	3.2.1 Mengembangkan peran lembaga ekonomi perdesaan dalam pembangunan desa	1 Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	

	3 Terwujudnya Desa , sebagai Pusat 3 Pembangunan Daerah	1 Meningkatnya persentase lahan milik desa yang dikelola oleh petani penggarap (buruh tani)		3.3.1 Peningkatan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di perdesaaan dalm pembangunan desa	1 Peningkatan keberdayaan masyarakat di perdesaaan	
	3 Berkembangnya , kelompok usaha 4 mandiri di perdesaan	1 Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, penanganan kerawanan pangan	11. Mengembangkan pasar-pasar tradisional	3.4.1 Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1 Ketersediaan energi dan protein per kapita	Bagian Ketahanan Pangan
					2 Penguatan cadangan pangan	
				3.4.2 Distribusi dan akses pangan	1 Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	
					2 Stabilitas harga dan pasokan pangan	
				3.4.3 Penganekaragaman dan keamanan pangan	1 Skor pola pangan harapan (PPH)	
					2 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	
					3 Pengembangan kelompok usaha produktif	

				3.4.4	Penanganan kerawanan pangan	1	Penanganan daerah rawan pangan dan pengembangan desa mandiri pangan		
	3 , 5	Mempertahankan budaya gotong royong dalam penguatan pembangunan desa	1						
			1	Jumlah desa yang melaksanakan Pembangunan melalui Bhakti Siliwangi manunggal Satata Sariksa (BSMSS) dan TMMD	3.5.1	Peningkatan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di perdesaan dalam pembangunan desa	1	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB
			3	Meningkatnya jumlah kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)			2	Peningkatan peran perempuan di perdesaan	
			4	Jumlah karang taruna dan LPM yang aktif di perdesaan			3	Peningkatan peran pemuda dalam kewirausahaan di perdesaan	

Misi 3: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)						Setda (Bag. Organisasi)			
1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan melalui optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik	1 , 1	Tertatanya kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang efektif dan efisien dalam meningkatkan pelayanan publik	1	Kesesuaian OPD berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang berlaku	1. Meningkatkan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah		1	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	1

					2	Penyusunan SPM	
					3	Peningkatan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Bag. Pemerintahan , Bappeda
					4	Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan kerjasama daerah	Bag. Organisasi, Bag Pemerintahan
					5	Peningkatan Kerjasama daerah	
					6	Pemantauan, Pengevaluasian serta Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah	Bag. Bina Program
	1 Tersedianya produk hukum daerah 2 untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan	1 Jumlah peraturan daerah yang disusun	2. Menyediakan regulasi / produk hukum daerah yang mengakomodasi nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan nilai-nilai hidup lainnya yang berkeadilan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan	1 Penataan sistem hukum di daerah 2 1	1 Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Setda (Bag. Hukum)	
	1 Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel 3	1 Jumlah perda inisiatif dan perda yang disetujui	3. Meningkatkan kapasitas Lembaga legislatif	1 Peningkatan kapasitas, fungsi dan peran lembaga legislatif 3 1	1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD	
	1 Terwujudnya keselarasan dan efektivitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lainnya 4	1 Penyelenggaraan konsultasi pemerintah an kabupaten dgn pemerintah dan Gubernur selaku wakil pemerintah		1 Peningkatan koordinasi Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lainnya 4 1	1 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Setda (Bag. Keuangan dan Bag Pemerintahan)	
	1 Terwujudnya pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan 5	1 Tingkat penerapan teknologi informasi dalam administrasi kearsipan	5. Meningkatkan pengelolaan dan penyelamatan dokumen /arsip daerah	1 Peningkatan Administrasi Kearsipan Daerah 5 1	1 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Kantor Perpustakaan dan Arsip	

		2 Tingkat pelayanan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat			2 Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	
		3 Penyelamatan Arsip In Aktip			3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	
	1 Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai	1 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD		1 Pemenuhan biaya rutin kebutuhan kerja SKPD	1 Pelayanan Administrasi perkantoran	Setda (Bag.Pemerintahan, Bag Umum)
					2 Peningkatan Disiplin Aparatur	
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemerintahan		1 Peningkatan sarana dan Prasarana Pemerintahan	1 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Setda (Bag.Pemerintahan, Bag Umum)
		3 Terbangunnya gedung kantor di Kawasan Pusat Pemerintahan	6. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa			Bag Pemerintahan
		4 Tersedianya Lahan utk Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya			2 Pembebasan lahan	

		a					
	1 7	Terwujudnya sistem informasi manajemen pemerintahan yang modern dan meningkatnya transparansi pelaksanaan pemerintahan	1 Web Site milik pemerintah daerah sebagai layanan akses informasi publik	7. Meningkatkan penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1 Peningkatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pemerintahan	1 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kantor Litbang, , Bag.Humas, dan Dinas Perhubungan
	1 8	Terwujudnya sistem Penelitian dan Pengembangan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan	1 Jumlah kajian isu strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif dan ilmiah		1 Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan dan analisis terapan penyelenggaraan pemerintahan	1 Peningkatan Penelitian dan Pengembangan	Kantor Litbang
	1 9	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berwawasan kedepan, transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.	1 Tingkat Ketersediaan data / statistik daerah		1 Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1 Pengembangan data / informasi / statistik daerah	Bappeda, BPS, Kantor Libang
	1 10	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	1 Tingkat efisiensi realisasi belanja daerah	10. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah serta aset daerah	1 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	DPPKAD
			2 Tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah yang				DPPKAD

		sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan, meliputi :				
		3 Opini BPK terhadap Lapkeu Daerah				
		5 Nilai asset daerah			2 Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah dan Pembiayaan	
		6 Terealisasinya target pendapatan asli daerah	11. Meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah		3 Peningkatan, Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan	
		7 Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah			4 Program peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah	
		1 Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah yang Handal, dan Relevan			5 Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
2. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintahan melalui kompetensi personil berbasis kinerja	2 Terpenuhinya kualitas / 1 kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	1 Terpenuhinya keseimbangan rasio antara pegawai yang memenuhi kompetensi dengan jumlah jabatan	12. Meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa	2 Penyelenggaraan · Diklat aparatur dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur yang terencana sesuai dengan prioritas kebutuhan pemerintah daerah	1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKPLD

		yang ada.				
		- Rasio pegawai yang memenuhi kompetensi jabatan struktural dengan jumlah jabatan struktural	13. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan karier aparatur berbasis kompetensi			
		2 - Rasio Jumlah CPNSD yang telah mengikuti Diklat Prajabatan	14. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian			
		3 - Rasio pegawai yang memenuhi kompetensi jabatan fungsional dengan jumlah jabatan fungsional			2 Pendidikan Kedinasan	
		4 - Jumlah aparatur yang telah mengikuti Diklat Teknis				
		5 Jumlah Aparatur desa yang telah mengikuti diklat		2 Peningkatan kinerja . 1 aparatur pemerintahan desa . . 2	3 Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan aparatur pemerintah Desa	
		6 Jumlah aparatur desa yang				DPPKAD

		mendapatk an insentif dan jaminan/as uransi keehatan				
	2 Meningkatkan pengembangan karier pegawai berbasis kompetensi	1 Tersusunnya pedoman penyusunan formasi dan pengadaan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan (rightsizing)		2 Internalisasi dan penyempurnaan peraturan tentang perencanaan dan pengembangan karier	1 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKPLD
	2 Terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan administrasi kepegawaian serta 3 Terwujudnya sistem dan penerapan manajemen kinerja pegawai yang objektif	1 Rasio penyelesaian proses administrasi kepegawaian sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) dan ketentuan perundang-undangan dalam kepegawaian.		2 Penetapan Standar Pelayanan Minimal dalam bidang pelayanan administrasi kepegawaian dan sistem manajemen kinerja kepegawaian	1 Fasilitas Purna Tugas PNS 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 Pelayanan Administrasi Kantor 4 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
3. Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme	3 Mencegah terjadinya praktek KKN di lingkungan pemerintah dan masyarakat	1 Pelaksanaan Pengawasan secara berkala	15. Meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya praktek KKN	3 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 1 1	1 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Inspektorat

		2 Peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			2 Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	
		3 Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dapat dilaksanakan	16. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik	3 Penerapan Prinsip-prinsip Pengadaan 1 Barang/Jasa 1 Pemerintah 3 sebagaimana sesuai dengan peraturan yang berlaku	1 Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Bina Program
4. Terwujudnya Penegakan Perda, Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	4 , 1 Meningkatkan Penegakkan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta perlindungan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat	1 Menurunnya Pelanggaran Perda	17. Meningkatkan Penegakkan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta perlindungan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat	4 Peningkatan 1 . Pemahaman dan Kesadaran terhadap Perda, 1 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta perlindungan Masyarakat	1 Peningkatan Penegakan Perda	Kantor Pol PP dan Kesbanglinmas
					2 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	
		2 Jumlah Satuan Linmas yang Aktif dan terlatih			3 Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	
5. Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis serta pemantapan wawasan kebangsaan	5 , 1 Meningkatkan kehidupan berpolitik yang demokratis berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya, serta meningkatnya peran masyarakat dalam pemantapan wawasan	1 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada	18. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat serta mengembangkan wawasan kebangsaan	5 Peningkatan 1 . pendidikan politik dan pengembangan wawasan 1 kebangsaan bagi masyarakat	1 Pendidikan Politik Masyarakat	Kantor Pol PP dan Kesbanglinmas

	kebangsaan					
		2 Jumlah masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi nilai-nilai demokrasi, wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa			2 Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	
Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan	Program	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang berkelanjutan						
1. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang partisipatif sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat	1.1. Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang yang berkelanjutan	1 Tersusunnya Dokumen RTRW	1. Melaksanakan penataan ruang wilayah dengan pendekatan partisipatif	1.1.1 Menyelenggarakan Penataan ruang dengan peran aktif masyarakat	1 Perencanaan tata ruang	Bappeda

		2	Jumlah RDTR Kawasan Strategis Kabupaten	2. Menyusun Landasan Hukum pengaturan rencana tata ruang			Dinas Tata Ruang dan Permukiman			
		3	Jumlah RDTR Kawasan Perkotaan	3. Meningkatkan kinerja penataan ruang dan pemahaman masyarakat serta aparatur terhadap rencana tata ruang wilayah						
	1,2	Meningkatnya pengaturan rencana tata ruang wilayah yang konsisten	1	Jumlah Perda rencana tata ruang		1.2.1	Pembentukan landasan hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.	1	Pengendalian pemanfaatan ruang	
	1,3	Meningkatnya pembinaan tata ruang wilayah yang baik	1	Jumlah penyelenggaraan diseminasi dan sosialisasi penataan ruang	4. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pengendalian dan pemanfaatan ruang	1.3.1	Meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat	1	Pengendalian pemanfaatan ruang	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
			2	Prosentase perwujudan Kawasan Lindung	5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penguasaan dan pemanfaatan tanah			2	Pemanfaatan ruang	
			3	Prosentase perwujudan Kawasan Budidaya						
	1,4	Meningkatnya pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah	1	Tersedianya tim monitoring yang bertugas mengawasi pemanfaatan ruang		1.4.1	Meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat	1	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dinas Tata Ruang dan Permukiman

		di lapangan								
		2	Prosentase luas lahan kawasan pusat pemerintahan		1.4.2	Meningkatkan penyelenggaraan catur tertib pertanahan	1	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		
		3	Prosentase jumlah penerbitan sertifikat tanah				2	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan		
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dengan memperhatikan pembangunan perdesaan	2,1	Tersedianya infrastruktur perdesaan yang memadai untuk memajukan perekonomian di wilayah perdesaan	1	Jumlah Alokasi Dana Desa	6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perdesaan	2.1.1	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan	1	Pembangunan Infrastruktur perdesaan	Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Bina Marga dan Pengairan, BPMKB
		2	Panjang jalan desa yang dibangun / direhabilitasi							
		3	Jumlah cakupan sarana dan prasarana air bersih perdesaan							
		4	Panjang saluran irigasi perdesaan yang dibangun / direhabilitasi							

	2,2	Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman perdesaan yang tertib, aman dan nyaman	1	Prosentase panjang Jalan Desa terhadap luas kawasan permukiman perdesaan	7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana permukiman perdesaan	2.2.1	Meningkatkan ketersediaan prasarana permukiman perdesaan, sehingga kualitas lingkungan aman dan nyaman.	1	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
			2	Prosentase cakupan pelayanan air bersih						
			3	Prosentase produk sampah yang tertangani						
			4	Prosentase cakupan pelayanan irigasi perdesaan						
			5	Jumlah saluran irigasi perdesaan yang dibangun / direhabilitasi						
			6	Prosentase Panjang jalan desa yang dibangun dan atau direhabilitasi						

	2,3	Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman perkotaan yang tertib, aman dan nyaman	1	Jumlah dokumen perencanaan prasarana perkotaan		2.3.1	Meningkatkan ketersediaan prasarana permukiman perkotaan, sehingga kualitas lingkungan aman dan nyaman.	1	Program Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
			2	Prosentase luas Jalan Perkotaan terhadap luas kawasan permukiman perkotaan						
			3	Prosentase luas Jalan Lingkungan terhadap luas wilayah perkotaan						
			4	Prosentasi Penataan Pembangunan Kawasan Fungsional Ibukota Pemerintahan	8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasana dan sarana permukiman perkotaan					
			5	Jumlah dokumen perencanaan/ penataan sarana permukiman perkotaan				3	Pengembangan Perumahan	Dinas Tata Ruang dan Permukiman

		6	Jumlah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau			4	Pengelolaan Areal Pemakaman			
		7	Tingkat pelayanan terhadap bahaya kebakaran			5	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran			
	2,4	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana perumahan yang layak huni serta sehat	1	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah		2.4.1	Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan aman dan nyaman.	1	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
			2	Prosentase jumlah rumah layak huni terhadap total jumlah rumah	9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan			2	Program Lingkungan sehat perumahan	
			3	Prosentase Jumlah rumah yang menggunakan air bersih						
	2,5	Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi antar wilayah	1	Terbangunnya jalan Ciawi-Singaparna	10. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi antar wilayah	2.5.1	Peningkatan aksesibilitas / kemudahan pergerakan kegiatan antar wilayah untuk mendukung kegiatan perekonomian	1	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas Bina Marga dan Pengairan

				n daerah		
		2	Jumlah jalan dan Jembatan Kabupaten Yang ditangani oleh Pembangunan Jembatan			
		3	Terbangunnya jembatan ruas jalan Ciawi-Singaparna, Jembatan masuk RSUD dan Jembatan pada ruas jalan strategis Kabupaten			
		4	Jumlah panjang kondisi jalan Kabupaten yang Mantap			
		5	Panjang jalan yang ditangani melalui kegiatan rehabilitasi jalan			

		6	Banyaknya jembatan yang ditangani melalui rehabilitasi jembatan					
		7	Persentase penanganan rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat			2	Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	
	2,6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengairan	1	Jumlah Daerah Irigasi yang dibuat/direhab	11. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengairan	2.6.1	Peningkatan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Sumberdaya Air	
			1	Jumlah embung, dan bangunan penampung air lainnya.			1	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
			3	Jumlah embung, dan bangunan penampung air lainnya.			2	Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya
			4	Jumlah Sumur Pantek/Bor			3	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
								Dinas Bina Marga dan Pengairan
								Dinas Pertambangan dan Energi
	2,7	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	1	Tersedianya Perencanaan dan pembangunan Lokasi Terminal		2.7.1	Peningkatan aksesibilitas / kemudahan pergerakan kegiatan antar wilayah untuk mendukung kegiatan perekonomian	
							1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan
								Dinas Perhubungan

				n daerah					
		5	Tersedianya infrastruktur komunikasi dan informatika di Kompleks perkantoran pusat pemerintahan						
		6	Tersedianya sarana dan prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)		3	Program pengendalian dan pengamanan Lalu lintas			
		7	Optimalisasi Terminal Kabupaten Tasikmalaya		5	Program rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ			
3. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan berawasan lingkungan	3,1	Meningkatkan produktivitas sumberdaya alam, terpeliharanya kualitas lingkungan serta pencegahan dan penanggulangan kerusakan / pencemaran lingkungan	1	Jumlah usaha penambangan yang dibina	3.1.1	Pengembangan usaha pertambangan yang berawasan lingkungan	1	Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Dinas Pertambangan dan Energi

		2	Jumlah Ijn Usaha Pertambangan (IUP) yang terbit	13. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan				
		3	Jumlah perusahaan yang memiliki IPAL	14. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	3.1.2	Peningkatan kualitas lingkungan dan pencegahan serta penanggulangan kerusakan/pencemaran lingkungan	1 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
		4	Jumlah perusahaan yang memiliki ijin pengumpulan sementara limbah B3				2 Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	
		5	Jumlah Sumber mata air yang dikonservasi				3 Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam	
		6	Jumlah RTH					
4. Meningkatkan Ketersediaan Energi	4,1		Meningkatnya ketersediaan energi terutama untuk daerah perdesaan	15. Meningkatkan pelayanan dan ketersediaan energi serta ketenagalistrikan bagi masyarakat	4.1.1.	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	1 Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Dinas Pertambangan dan Energi
		2	Jumlah desa yang terjangkau pelayanan listrik					

			3	Jumlah penerangan Sarana umum					
			4	Tersedianya energi listrik di Kawasan Pusat Pemerintahan Kab. Tasikmalaya					
5. Meningkatkan Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	5,1	Terlaksananya mitigasi dan penanggulangan bencana alam	1	Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah	16. Menyusun mitigasi bencana dan fasilitasi serta koordinasi penganggulangan bencana alam	5.1.1. Peningkatan Upaya Penanggulangan Bencana Alam	1	Penanggulangan Bencana Alam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			2	Tersedianya sarana dan prasarana mitigasi bencana alam					
			3	Jumlah TAGANA, Forum Penanggulangan Bencana			2	Pelatihan dan Pembentukan Forum Penanggulangan Bencana	
			4	Tersedianya Dokumen Mitigasi Bencana Alam Kab Tasikmalaya			3	Penyusunan Perubup Peta Rawan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana	

BAB VIII

INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Skenario dan asumsi hasil pembangunan daerah tahun 2011-2015 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai tahun 2010, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2015.

Indikator kinerja daerah yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari Indikator makro serta indikator kinerja daerah lainnya yang disusun berdasarkan bidang urusan.

Target indikator makro Kabupaten Tasikmalaya untuk Tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 8.1

Target Indikator Makro Kabupaten Tasikmalaya 2011-2016

NO	INDIKATOR MAKRO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,49	72,74	72,92	73,22	73,52	73,82
	Angka Harapan Hidup (th)	68,38	68,41	68,46	68,68	68,89	69,11
	Rata-Rata Lama Sekolah (th)	7,19	7,22	7,25	7,28	7,31	7,33
	Angka Melek huruf (%)	99,18	99,19	99,20	99,21	99,22	99,23
	Daya Beli (Konsumsi/kapita/tahun) (Rp)	572.930	575.630	577.330	579.330	581.330	583.400
	Indeks Pendidikan	82,10	82,17	82,24	82,32	82,39	82,44
	Indeks Kesehatan	72,30	72,34	72,43	72,79	73,15	73,51
	Indeks Daya Beli	63,08	63,70	64,09	64,56	65,02	65,50
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.690.289	1.704.656	1.718.294	1.731.181	1.743.299	1.755.502
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,88	0,85	0,80	0,75	0,70	0,70
4	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	312,703	306,838	292,110	276,989	261,495	245.770
	Proporsinya terhadap jumlah penduduk total (%)	18,5	18	17	16	15	14
5	PDRB (berlaku) (Rp. Trilyun)	12,29	12,78	13,30	13,83	14,38	14,96
6	PDRB Per kapita (berlaku) (Rp.)	7.272.602	7.499.761	7.737.845	7.987.454	8.249.209	8.519.540
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (konstan 2000)	4,18	4,5 - 5,5	4,5 - 5,5	4,5 - 5,5	5 - 6	5 - 6
8	Jumlah Penduduk yang bekerja (Jiwa)	763.165	770.505	778.387	785.956	793.201	800.509
9	Proporsi jumlah penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk total (%)	45,15	45,20	45,30	45,40	45,50	45,60
10	Pengangguran Terbuka (%)	7	6 - 7	6 - 7	6 - 7	6 - 7	6 - 7

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 3 (tiga) tahun pelaksanaan RPJMD, target indikator makro di atas harus diubah untuk beberapa hal. Pertama, Indeks Pembangunan Manusia, karena angka yang ditargetkan sudah tercapai bahkan terlampaui. Perubahan target IPM dimulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

Kedua, laju pertumbuhan penduduk. Diperkirakan sangat berat untuk mencapai angka yang ditargetkan. Dasarnya adalah, struktur kependudukan kita mayoritas, lebih dari 64 persen merupakan usia

produktif dan subur yang menyebabkan angka kelahiran makin tinggi. Kemudian angka kematian yang sangat rendah dan migrasi penduduk juga rendah. Dari sisi upaya, kita kekurangan SDM untuk menekan laju pertumbuhan penduduk untuk peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat, minimnya anggaran dan masih tercerainya pembagian urusan dan kewenangan.

Ketiga angka kemiskinan. Perubahan dilakukan selain karena adanya penurunan, juga dipengaruhi oleh perubahan metodologi perhitungan penduduk miskin pasca sensus penduduk tahun 2010 dan program pendataan perlindungan sosial/PPLS tahun 2011. Sehingga terjadi penurunan drastis sampai dengan 5 persen. Lebih lengkapnya, perbandingan antara target indikator makro awal dan perubahannya dapat dilihat pada tabel 8.2 di bawah ini.

Tabel 8.2

Target Indikator Makro Perubahan Tahun 2013-2016

NO	INDIKATOR MAKRO	2013		2014		2015		2016	
		AWAL	REVISI	AWAL	REVISI	AWAL	REVISI	AWAL	REVISI
1	Indeks Pembangunan Manusia	72.92	73.12	73.22	73.79	73.52	74.39	73.82	75.01
	Angka Harapan Hidup (th)	68.46	68.34	68.68	68.38	68.89	68.42	69.11	68.46
	Rata-Rata Lama Sekolah (th)	7.25	7.34	7.28	7.46	7.31	7.6	7.33	7.76
	Angka Melek huruf (%)	99.2	99.3	99.21	99.38	99.22	99.46	99.23	99.54
	Daya Beli (Konsumsi/kapita/tahun) (Rp)	577,330	641,558	579,330	646,558	581,330	652,558	583,400	658,558
	Indeks Pendidikan	82.24	82.51	82.32	82.83	83.29	83.2	82.44	83.6
	Indeks Kesehatan	72.43	72.23	72.79	72.3	73.15	72.37	73.51	72.43
	Indeks Daya Beli	64.09	65.07	64.56	66.23	65.02	67.61	65.5	69
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1,718,294	1,738,488	1,731,181	1,759,350	1,743,299	1,776,944	1,755,502	1,792,936
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0.80	1.3	0.75	1.25	0.70	1.25	0.70	1.25
4	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	292.11	211,574	276.989	211,122	261.495	199,093	245,770	193,120
	Proporsinya terhadap jumlah penduduk total (%)	17	12.17	16	12.00	15	11.50	14	11.00
5	PDRB (berlaku) (Rp. Trilyun)	13.3	15	13.83	16.13	14.38	17.25	14.96	18.36
6	PDRB Per kapita (berlaku) (Rp.)	7,737,845	8,628,186	7,987,454	9,168,158	8,249,209	9,707,680	8,519,540	10,240,187
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (konstan 2000)	4,5 - 5,5	4 - 5	4,5 - 5,5	4,25 - 5,25	5 - 6	4,5 - 5,5	5 - 6	5 - 6
8	Jumlah Penduduk yang bekerja (Jiwa)	778,387	911,663	785,956	923,483	793,201	933,606	800,509	942,905
9	Proporsi jumlah penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk total (%)	45.3	52.44	45.4	52.49	45.5	52.54	45.6	52.59
10	Pengangguran Terbuka (%)	6 - 7	6 - 7	6-7	6 - 7	6 - 7	6 - 7	6 - 7	6 - 7

Adapun indikator kinerja daerah yang disusun berdasarkan misi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah sebagaimana tercantum pada tabel 8.3 berikut:

Tabel 8.3
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB		
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015					
Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlakulkarimah, Berkualitas dan Mandiri														
1. Mewujudkan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan tata kelola pemerintahan	1,1	Meningkatnya nilai-nilai empati masyarakat terhadap kerawanan sosial	1	Meningkatnya pelayanan pemerintah untuk kaum Duafha (Penanganan Anak Terlantar dan Fakir Miskin)									1. Setda, 2. Kantor Kementerian Agama 3. Dinas Sosial	
				Jumlah keluarga fakir miskin	KK	98.760	97.008	95.188	90.619	85.928	81.121	81.121	76.314	
				Jumlah keluarga fakir miskin yang ditangani	KK	15.878	16.801	19.599	20.599	22.474	23.474	23.474	23.474	
	1,2	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai landasan moral dan spiritual	1	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana lembaga keagamaan						106.048		106.048		
			-	Pondok Pesantren	Buah	149	284	394	594	604	703	703	718	
			-	Mesjid	Buah	2.351	2.476	2.501	2.701	2.800	3.025	3.025	3.075	
			-	Madrasyah Diniyah	Buah	208	343	403	703	900	1.350	1.350	1.450	
			-	Majlis Talim	Buah	17	147	202	502	696	850	850	860	
			-	Jumlah bantuan stimulan guru Madrasah Diniyah	Rp	750.000.000	1.000.000.000	1.250.000.000	1.500.000.000	1.750.000.000	2.000.000.000	7.500.000.000	2.000.000.000	
			2	Meningkatnya jumlah jemaah haji	Orang	1.326	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355	
	1,3	Meningkatnya peran lembaga-lembaga keagamaan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat	1	Meningkatnya kuantitas sarana dan prasana lembaga keagamaan										
			2	Jumlah Koperasi Pondok Pesantren	Buah	22	25	28	31	34	38	38	40	

			3	Jumlah Pondok Pesantren yang mempunyai BMT	Buah	-	10	15	20	25	30	30	33		
			4	Jumlah Pondok Pesantren yang memiliki Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren)	Buah	17	19	21	23	25	27	27	30		
	1,4	Optimalisasi pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah untuk pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka penanggulangan kemiskinan	1	Meningkatnya jumlah pembayar zakat dan nilai zakat, infaq dan sadaqah											
				a. Jumlah Muzaki Zakat											
				- Zakat Profesi	Rp	630.317.851	693.349.636	762.684.600	838.953.060	922.848.366	1.015.133.202	1.015.133.202	1.115.133.202		
			2	Jumlah pendayagunaan ZIS											
				- Zakat Fitrah	Rp.	610.342.143	711.819.433	811.819.433	911.819.433	1.011.819.433	1.111.819.433	1.111.819.433	1.211.819.433		
				- Zakat Profesi	Rp.	630.317.851	693.349.636	762.684.600	838.953.060	922.848.366	1.015.133.202	1.015.133.202	1.115.133.202		
2. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat melalui perluasan akses, peningkatan mutu dan perbaikan tata kelola	2,1	Tercapainya wajar dikdas 9 tahun	1	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SD/MI/ sederajat										Dinas Pendidikan	
				- APK SD/MI (Usia 7-12 Tahun)	%	101,40	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
			2	Meningkatnya APM SD/MI Sederajat											
				- APM SD/MI (Usia 7-12 Tahun)	%	100,89	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
			3	Meningkatnya APK SMP/MTs Sederajat											
				- APK SLTP/Mts(Usia 13 – 15 tahun)	%	93,65	95,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
			4	Meningkatnya APM SMP/MTs Sederajat											
				- APM SLTP/MTs(Usia 13 – 15 tahun)	%	91,12	93,00	96,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

	2,2	Terlaksananya Pendidikan Menengah Universal	1	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SLTA /MA										
				APK SLTA/MA(Usia 16 – 18 tahun)	%	40,22	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	50,0	53,0	
			2	Meningkatnya APM SLTA/MTs Sederajat										
				APM SLTA/Mts(Usia 16 – 18 tahun)	%	38,92	41	42	43	44	45	45	50	
			3	Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA	%	48,95	50	55	60	65	70	70	75	
			4	Meningkatnya angka melanjutkan perguruan tinggi	%	20	25	30	40	50	60	60	62	
			5	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Tahun	7,16	7,19	7,22	7,25	7,28	7,31	7,31	7,33	
	2,3	Meningkatnya lembaga pendidikan bagi anak usia dini dan pendidikan luar sekolah yang merata, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat	1	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	26,51	52	60	65	80	90	90	95	
			2	Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH)	%	99,14	99,19	99,20	99,21	99,22	99,23	99,23	99,24	
	2,4	Meningkatnya mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal	1	Meningkatnya Tingkat Pendidikan Guru										
				Guru kualifikasi S1	Orang	11, 899	15, 827	15,926	13.439	14, 279	14, 787	14,787	15,469	
				Guru Kualifikasi S2	Orang	183	386	386	784	800	816	816	832	
			2	Meningkatnya jumlah guru yang sudah mempunyai bersertifikasi guru TK	%	5,5	8,5	11,5	14,5	17,5	20,5	20,5	23,5	

				guru SD	%	22,2	42,2	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	50,0		
				guru SMP	%	29,0	59,0	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	70,0		
				guru SMA	%	39,6	69,6	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4	85,0		
				guru SMK	%	8,9	58,9	63,4	63,4	63,4	63,4	63,4	65,0		
			2	Meningkatnya jumlah sekolah terakreditasi											
				TK	%	19,3	23,2	27,1	30,9	34,8	38,7	38,7	42,54		
				RA	%	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,41		
				SD	%	72,2	77,3	82,3	87,4	92,4	97,5	97,5	100		
				SMP	%	46,9	56,2	65,6	75,0	84,3	93,7	93,7	100		
				MTs	%	16,9	20,3	23,6	27,0	30,4	33,8	33,8	37,15		
				SMA	%	90,2	92,0	93,8	95,7	97,5	99,3	99,3	100		
				SMK	%	36,2	43,4	50,6	57,9	65,1	72,3	72,3	79,57		
				MA	%	33,9	40,7	47,5	54,2	61,0	67,8	67,8	74,58		
			3	Meningkatnya Nilai Rata-Rata Ujian Nasional / Ujian (UN/USBN)											
				- Jenjang SD/MI	%	6,74	6,80	6,90	7,00	7,10	7,20	7,20	7,30		
				- Jenjang SMP/MTs	%	7,07	7,09	7,11	7,13	7,15	7,17	7,17	7,19		
				- Jenjang SMA/SMK/MA	%	7,42	7,45	7,46	7,50	7,55	7,60	7,60	7,70		
	2,5	Tersedianya bantuan beasiswa / keringanan biaya bagi siswa yang	1	Meningkatnya jumlah beasiswa untuk jenjang pendidikan dasar	Rp	6.974.100.000	6.974.100.000	6.974.100.000	6.974.100.000	6.974.100.000	6.974.100.000	6.974.100.000	34.870.500.000	7.810.992.000	

		berasal dari keluarga tidak mampu	2	Meningkatnya jumlah penerima beasiswa untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah										
				- SD/MI	Orang	14.565	14.565	14.565	14.565	14.565	14.565	14.565	16.313	
				- SMP/MTs	Orang	5.152	5.152	5.152	5.152	5.152	5.152	5.152	5.770	
				- SMA	Orang	1.129	1.152	1.174	1.197	1.219	1.242	1.242	1.264	
				- SMK	Orang	802	818	834	850	866	882	882	898	
			3	Menurunnya siswa dropout										
				SD/MI	%	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	
				SLTP/MTs	%	0,63	0,50	0,40	0,35	0,30	0,20	0,20	0,10	
				SMU/SMK/MA	%	0,59	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,30	0,20	
	2.6	Meningkatnya prestasi siswa di semua jenjang pendidikan	1	Meningkatnya jumlah prestasi										
				Jumlah prestasi tingkat propinsi	siswa	285	304	326	346	459	480	480	490	
				Jumlah prestasi tingkat nasional	siswa	25	29	33	38	32	37	37	40	
	2.7	Meningkatnya kemampuan dan budaya baca masyarakat	1	Meningkatnya kelembagaan teknis perpustakaan desa/kelurahan	buah	137	20	20	20	20	20	100	25	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
			2	Meningkatnya SDM pengelola perpustakaan desa/kelurahan	orang	111	20	20	20	20	20	100	25	
			3	Meningkatnya koleksi bahan perpustakaan desa/kelurahan	eksemplar	137.000	137.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000	
			4	Meningkatnya koleksi bahan perpustakaan umum	eksemplar	31.097	31.097	1.000	1.500	1.500	1.500	7.000	2.000	

	3,1	Mingkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya promosi kesehatan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan	1	Cakupan desa siaga aktif	%	31,62	45	47	50	55	60	60	65	
			2	Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD/MI	%	91,19	100	100	100	100	100	100	100	
			3	Meningkatnya Rumah Tangga Sehat (RT ber-PHBS)	%	43,70	45,0	47,0	50,0	55,0	60,0	60,0	60,0	
			4	Cakupan sanitasi total berbasis masyarakat/STBM	%	40	45	50	55	60	60	60	60	
	3,2	Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak menular	1	Meningkatnya Cakupan desa UCI Universal Child Immunization (UCI)	%	85,8	80,0	85	90	95	100	100	100,00	Dinas Kesehatan
			2	Cakupan Pelayanan Penyakit Menular Langsung/P2ML	%	65	80	80	80	80	80	80	80	
			3	Cakupan pelayanan penyakit bersumber i binatang/P2BB	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
			4	Cakupan Desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	3,3	Meningkatnya upaya perbaikan gizi masyarakat	1	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	%	74,9	80	85	90	95	100	100	100	
			2	Cakupan balita gizi buruk dapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	3,5	Meningkatnya pelayanan dan pembiayaan bagi masyarakat miskin	1	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	%	8,7	10	12	14	15	15	15	15	Dinas Kesehatan
			2	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	2,5	2,3	2,2	2,1	2	2	2	2	
	3,6	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fungsi sarana	1	Meningkatnya jumlah puskesmas dengan perawatan DTP	Puskesmas	8	10	13	15	16	17	17	17	Dinas Kesehatan

		prasarana kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit	2	Puskesmas mampu PONED	Puskesmas	0	5	10	15	25	27	27	27	
			3	Pembangunan Rumah Sakit Tipe C	buah	0	1	1	2	2	3	3	3	
	3,8	Meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, anak dan masyarakat resiko tinggi	1	Menurunnya jumlah Kematian Bayi	Orang	454	453	452	451	450	449	449	440	Dinas Kesehatan
			2	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 kelahiran hidup	12	12	12	12	12	10	10	9	
			3	Menurunnya jumlah kematian Balita	Orang	51	50	49	48	47	46	46	45	
			4	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1000 balita	1	1	1	1	1	1	1	1	
			5	Menurunnya Jumlah Kematian Ibu	Orang	46	45	44	43	42	41	41	38	
			6	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 kelahiran hidup	116	115	114	113	112	112	112	111	
			7	Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan	%	76,44	86	88	89	90	90	90	90	
			8	Meningkatnya pelayanan kesehatan antenatal (K4)	%	76,09	86	88	89	90	95	95	95	
			9	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	15	60	65	70	75	80	80	80	
			10	Cakupan peserta KB Aktif	%	69,08	70	70	70	70	70	70	70	
			11	Cakupan kunjungan bayi dan balita	%	84,04	86	86	86	88	90	90	90	
			12	Pelayanan PONEK di RSUD	%	-	40	50	75	80	100	100	100	
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas,	4,1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial	1	PMKS yang memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	-	35	35	40	45	50	50	50	Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja

mandiri dan berbudaya		perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat	2	PMKS yang menerima KUBE	%	-	-	40	45	50	55	55	55	
			3	Jumlah Keluarga berumah Tidak Layak Huni yang ditangani	orang	1.134	1.144	1.154	1.163	1.172	1.180	5.813	1.180	Dinsos, tarkim, bpmkb
				- Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSS) Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Karang Taruna (KT) Organisasi Sosial (Oros)	orang	2.307	2.307	2.307	2.307	2.307	2.307	2.307	2.307	
	4,2	Meningkatnya kesempatan dan perlindungan penyediaan lapangan kerja	1	tenaga kerja yang terlatih di Balai Latihan Kerja per tahun	orang	204	240	400	400	400	400	1.840	400	
			2	Jumlah tenaga kerja bersertifikasi di Kab. Tasikmalaya	orang	204	240	400	400	400	400	1.840	400	
			3	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	78,69	78,70	78,73	78,75	79,20	80,00	80,00	80	
			4	Proporsi jumlah penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk total	%	45,12	45,15	45,20	45,30	45,40	45,50	45,50	45,60	
			5	Meningkatnya jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	orang	982	1.282	1.682	2.082	2.532	3.032	3.532	3.032	
			6	Meningkatnya Jumlah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Orang	1.900	1.980	2.065	2.155	2.265	2.385	2.385	2.385	
			7	Meningkatnya Upah Kerja Sesuai dengan Ketentuan	%	82	87	89	91	95	100	100	100	
	4,3	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dan penyebaran penduduk	1	Meningkatnya Prevalensi peserta KB aktif	%	68,85	68,91	68,94	68,98	69,01	69,04	69,04	69,10	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB
			2	Menurunnya TFR	%	2,60	2,60	2,58	2,56	2,54	2,52	2,52	2,43	

			3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,88	0,88	0,85	0,80	0,75	0,70	0,70	0,69		
			4	Meningkatnya Jumlah Peserta KB Baru	Akseptor	66.860	83.270	83.880	84.490	85.100	85.710	85.710	85.926		
			5	Transmigrasi	KK	15	35	45	55	65	80	80	100	Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja	
	4,4	Tersedianya Data Kependudukan yang akurat serta terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1	Meningkatnya Kepemilikan E-KTP	%	68,78	80	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja	
2			Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk	%	30,37	34,56	38,56	42,46	46,27	49,89	49,89	53,51			
3			Kartu Keluarga	%	-	50	100	100	100	100	100	100	100		
4			Cakupan perbitan kutipan akta kematian	%	-	-	0,08	1,00	2,08	5,56	8,33	8,33			
	4,5	Terwujudnya pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang pembangunan	1	Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	1,87	1,90	1,95	2,00	2,20	2,40	2,40	3	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB	
			2	Penanganan kasus yang dapat ditangani oleh P2TP2	%	63	67,5	73	78	83	88	88	88		
			3	Peningkatan pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA)	kelompok	2	2	2	2	2	2	10	10		
			4	Terbentuknya KLA (Kabupaten Layak Anak)	Kab	-	-	1	-	-	-	1	1		
			5	Meningkatnya prestasi dalam Lomba P2WKSS Tingkat Provinsi Jawa Barat	Peringkat	-	5	4	3	2	1	1	1		
	4,6	Meningkatnya peran generasi muda dalam pembangunan daerah	1	Jumlah Karang Taruna	buah	351	351	351	351	351	351	351	351	351	Bagian Kesra & Dinas Pendidikan
			2	Jumlah organisasi kepemudaan	buah	45	45	45	45	45	45	45	45	54	
			3	Jumlah pemuda pelopor pembangunan	orang	21	21	21	21	21	21	21	21	21	

	4,7	Meningkatnya prestasi dalam bidang olahraga	1	Jumlah induk organisasi olahraga di kabupaten	buah	29	31	33	35	37	39	39	39	Bagian Kesra & Dinas Pendidikan
			2	Jumlah atlit yang dibina	orang	236	241	246	251	256	261	261	266	
			3	Jumlah atlit berprestasi	orang	46	48	50	52	54	56	58	60	
	4,8	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah	1	Jumlah even seni dan budaya										Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				- Penyelenggaraan even seni dan budaya	Kegiatan	3	3	10	12	14	12	12	14	
				- Pengiriman misi seni dan budaya	Kegiatan	3	6	8	8	8	10	10	12	
			3	Jumlah Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan										
				- Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada	Buah	41	41	41	41	41	41	41	41	
				- Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dipelihara	Buah	8	-	10	13	17	20	20	20	
			4	Perda Cagar budaya	Buah					1				

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir	Target	SKPD PENANGGUNG JAWAB		
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015					
Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dan Keunggulan Agribisnis														
1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perluasan kegiatan ekonomi yang berbasis potensi desa	1,1	Meningkatnya daya saing, produktivitas dan produksi usaha pertanian, industri kecil, dan pariwisata dalam upaya meningkatkan pendapatan petani/ masyarakat	1	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan								Dinas Pertanian Tanaman Pangan		
				Padi										
				- Padi sawah	Ton GKG	851.351	699.997	704.184	707.776	711.386	792,825		808,682	729,314
				- Padi gogo	Ton GKG	22.190	19.831	19.933	20.034	20.137	20.239		20.239	20.441
				- Padi organik (Bagian dari Padi sawah)	Ton GKG	31.412	60.990	61.789	62.589	63.391	62,034		62,654	65,470
				Sisa beras/surplus	Ton	320.020,82	230.950,32	231.871,71	232.530,91	233.280,99	284.038,73		234.122,14	247.990,80
				Palawija										
				- Jagung	Ton	61.293	61.689	62.618	63.560	64.517	65.488		65.488	66.142
				- Kedele	Ton	1.735	1.443	1.465	1.487	1.509	1.532		1.532	1.547
				- Kacang tanah	Ton	81.115	8.561	8.689	8.820	8.953	9.088		9.088	9.178
				- Ubi kayu	Ton	333.871	340.886	346.016	351.224	356.509	361.875		361.875	365.493
				- Ubi jalar	Ton	20.224	18.119	20.854	16.028	16.188	16.350		16.514	16.679
				Sayuran										
				- Cabe merah	Ton	24.259	17.248	17.508	17.771	18.039	18.310		18.310	18.493
				- Mentimun	Ton	18.235	13.853	14.062	14.273	14.488	14.706		14.706	14.853
				- Tomat	Ton	9.752	4.098	4.160	4.222	4.266	4.350		4.350	4.393
				Buah-buahan										
				- Manggis	Ton	13.507	21.830	22.828	23.171	23.520	23.874		23.874	24.112
				- Salak	Ton	35.460	117.285	120.248	122.058	123.895	125.759		125.759	127.016
				- Pisang	Ton	132.707	130.235	138.856	140.946	143.067	145.220		145.220	146.672
	- Durian	Ton	3.418	3.540	3.593	3.647	3.702	3.758	3.758	3.795				
	Aneka tanaman													
	- Tanaman obat kapulaga	Kg	5.350.113	6.597.563	7.541.292	6.696.526	6.796.974	6.898.929	6.898.929	7.002.413				
			2	Meningkatnya luas areal pertanian ramah lingkungan Padi Organik	Ha	5.539	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700	8.700	8.800	
			3	Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur pertanian										
				- JIDES	Ha	850	950	1.450	2.000	2.580	8.430	8.430	9.273	

			- Jalan Usaha Tani (JUT)	Km	4	7	10	13	16	19	19	21		
			- Cetak Sawah Tani	Ha	-	-	100	200	300	400	400	440		
		4	Meningkatnya tingkat kemampuan kelompok tani berbasis usaha tanaman pangan (Kelompok)											
			- Pemula	Kel	914	923	923	923	923	923	923	923		
			- Lanjut	Kel	709	739	739	739	739	739	739	739		
			- Madya	Kel	126	124	124	124	124	124	124	124		
			- Utama	Kel	9	40	40	40	40	40	40	40		
		1	Meningkatnya Populasi dan Produksi Ternak										Dinas Peternakan, Perikanan dan kelautan	
			a. Populasi Ternak											
			Ternak Besar	ekor	53.081	67.379	71.901	75.256	62.211	64.795	64.795	67.504		
			Ternak Kecil	ekor	339.212	343.198	354.392	376.660	431.300	452.865	452.865	475.508		
			Ternak Unggas	ekor	7.411.884	7.789.221	8.267.597	8.856.269	9.583.347	9.876.039	9.876.039	10.178.259		
			b. Produksi Hasil Ternak											
			Daging	ton	49.479,53	52.448,30	52.448,30	55.595,20	58.930,91	62.327,39	62.466,77	64.255,18		
			Telur	ton	8.215,94	8.544,58	9.057,25	9.618,80	11.532,85	12.109,5,38	10.930,38	12.714,27		
			Susu	ton	3.967,24	4.046,58	4.167,98	4.334,70	3.261,96	3.327,48	4.779,00	3.394,56		
		3	Meningkatnya produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pemanfaatan potensi laut											
			a. Produksi Ikan Budidaya											
			- Ikan Konsumsi hasil budidaya	ton	33.343,38	37.822,40	41.630,87	45.664,08	50.269,00	55.296,00	55.296,00	58.060,80		
			- Benih	Juta Ekor	1.898	2.467	3.208	4.170	4.667	4.807	4.951	4.951		
			b. Produksi Perikanan Tangkap											

			Perairan Umum	ton	818,59	686	694	702	705	708	710	710	
			Ikan Laut	ton	883,41	897	908	919	861,57	871,92	882,38	882,38	
			c. Prosentase Pemanfaatan Potensi Laut	%	13,30	13,51	13,67	13,84	12,98	13,13	13,29	13,29	
		4	Jumlah kunjungan wisatawan ke Kab.Tasikmalaya per tahun	orang	632.643	670.601	676.928	683.254	689.580	695.907	695.907	702.234	
			- Wisatawan Nusantara	orang	624.743	662.228	668.475	674.722	680.970	687.217	687.217	693.465	
			- Wisatawan Mancanegara	orang	7.900	8.373	8.453	8.532	8.610	8.690	8.690	8.769	
		5	Jumlah unit usaha industri :	unit	13.869	13.917	13.968	14.019	14.070	14.121	14.121	14.161	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			Industri Kecil	unit	13.853	13.901	13.949	13.997	14.045	14.093	14.093	14.130	
			Industri Kecil Menengah	unit	16	16	19	22	25	28	28	31	
		6	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	7,35	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
		7	Pertumbuhan Industri	%	5	5,3	5,3	5,4	5,4	5,45	5,45	5,45	
		8	Berkurangnya Lahan Kritis	ha	10.974	9.499	8.024	6.549	5.074	3.599	3.599	2.124	
			a. Penanganan Lahan Kritis per tahun	ha	1.942	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	7.375	1.475	
			b. Rehabilitasi Sumber Mata Air per tahun	ha	595,9	100	100	100	100	100	500	95,9	
		9	Meningkatnya Produksi Hasil Hutan Hak										
			- Produksi Kayu	m3	393.154	397.085	401.056	405.067	409.118	413.209	413.209	417.341	
			b. Meningkatkan Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan										
			- Kelapa	ton	24.513	24.758	25.005,71	25.255,77	25.508,33	25.763,41	25.763,41	26.021,04	

				Teh	ton	10.220	10.322	10.425,42	10.529,68	10.634,97	10.741,32	10.741,32	10.848,74	
				- Kopi	ton	998	1.008	1.018,06	1.028,24	1.038,52	1.048,91	1.048,91	1.059,40	
				- Cengkeh	ton	450	455	459,05	463,64	468,27	472,95	472,95	477,68	
				- Karet	Ton	66	71,92	80,42	89,09	98,58	109, 59	121,27	121,27	
2. Meningkatkan peran lembaga perekonomian dan perdagangan tradisional.	2,1	Meningkatnya kemampuan dan peran koperasi, UMKM dan Lembaga Keuangan Mikro dalam menunjang kegiatan perekonomian daerah	1	Meningkatnya Jumlah koperasi baru per tahun	buah	26	12	14	16	18	21	21	23	Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan,
			2	Meningkatnya Jumlah Koperasi sehat	buah	117	128	137	145	152	160	160	162	
			3	Meningkatnya Jumlah Koperasi aktif	buah	323	371	396	423	452	483	483	483	
			4	Meningkatnya Jumlah UKM	Unit	27.586	29.138	30.595	32.125	33.731	35.418	35.418	35.418	
	2. 2.	Meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat	1	Volume dan nilai ekspor Kab.Tasikmalaya	US \$	3.617.967.24	3.690.326.58	3.764.133.11	3.839.415.77	3.916.20.08	3.994.528.16	3.994.528.16	4.074.419	
			2	Laju Pertumbuhan ekspor Kab.Tasikmalaya	%	2	2,5	3	3,5	4	4,5	4,5	5	
			3	Laju Pertumbuhan Investasi	%	9,25	10	11	12	13	14	14	14	
	2,3	Terwujudnya pasar tradisional yang nyaman dan representatif	1	Meningkatnya jumlah pasar tradisional yang memadai										Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
				- Pasar Kabupaten	Buah	4	5	5	5	5	5	5	5	
				- Pasar Desa	Buah	67	67	67	67	67	67	67	67	
3. Menjadikan desa sebagai kesatuan komunitas	3,1	Terwujudnya desa unggulan	1	Jumlah desa yang mendapatkan dana stimulan desa unggul dan mandiri per tahun	Desa	0	0	39	39	39	39	156	39	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB

ekonomi, sosial, dan budaya serta merupakan <i>data base</i> pengambilan kebijakan	3,2	Terwujudnya Badan usaha Milik Desa (BUMDES)	2	Meningkatnya jumlah desa yang memiliki BUMDES	buah	8	9	10	11	12	13	13	13	
	3,3	Terwujudnya Desa sebagai Pusat Pembangunan Daerah	1	Meningkatnya Prestasi dalam Lomba Desa	Keg	0	5	4	3	2	1	1	1	
			2	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa	Desa	33	36	39	42	45	48	48	51	
	3,4	Mempertahankan budaya gotong royong dalam penguatan pembangunan desa	1	Meningkatnya Jumlah desa yang melaksanakan BSMSS Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa	Desa	10	11	12	13	14	15	15	16	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB
			2	Meningkatnya Jumlah desa yang melaksanakan TMMD	Desa	5	0	6	0	7	0	13	8	
			3	Meningkatnya jumlah Kelompok Simpan Pinjam melalui mekanisme kegiatan lumbung desa	Kelompok	2	0	3	4	5	6	6	7	
			4	Meningkatnya jumlah kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	Kelompok	12.860	12.865	12.870	12.875	12.880	12.885	12.885	12.890	
4. Meningkatkan Ketahanan Pangan	4.1	Meningkatnya ketersediaan, terjaganya stabilitas harga pangan	1	Ketersediaan energi dan protein perkapita	%									
				Energi perkapita	%	-	-	-	2457	2957	3457	3457	3457	Bagian Ketahanan Pangan
				Protein perkapita	%	-	-	-	128	133	138	138	138	
			2	Skor Pola Pangan Harapan	%	-	-	-	61,5	67,5	72,5	72,5	72,5	
			3	Pangan daerah rawan pangan	%	-	-	-	10	15	20	20	20	

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi Akhir RPJM	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB		
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015					
Misi 3 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)														
1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan melalui optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik	1,1	Tertatanya kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang efektif dan efisien dalam meningkatkan pelayanan publik	1	Kesesuaian OPD berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang berlaku	%	92% (yang belum sesuai Inspektorat dan Ketahanan Pangan)	92	100	100	100	100	100	Bagian Organisasi	
			2	Jumlah SKPD yang telah dianalisis beban kerjanya	buah	0 (penataan kelembagaan belum didasarkan pada analisa beban kerja)	0	0	7,4	10,42	-	10,42	10,42	
			3	Ketepatan waktu penyampaian LPPD, ILPPD, LKPJ berdasarkan PP no. 3 thn 2007	Tepat/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Bagian Pemerintahan, Bappeda	
			4	Ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja instansi pemerintah daerah	Tepat/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Bag. Organisasi	
	1,2	Tersedianya produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan	1	Jumlah peraturan daerah yang disusun	buah	7 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda	50 Perda	10 Perda	Setda (Bag.Hukum)
			2	Jumlah sosialisasi/penyuluhan hukum terhadap masyarakat.	kali	15	10	10	10	10	10	50	10	
	1.3	Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel	1	Jumlah perda yang disetujui	buah	7	10	10	10	10	10	10	10	Sekretariat DPRD
			2	Jumlah perda inisiatif	buah	0	2	3	3	3	3	3	3	
	1.4	Terwujudnya keselarasan dan efektivitas Hubungan Antara	1	Penyelenggaraan konsultasi pemerintahan kabupaten dgn pemerintah	kali	172	170	170	170	170	170	170	170	Setda (Bag.Keuangan dan Bag Pemerintahan)

		Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya	2	Penyelenggaraan konsultasi pemerintahan daerah dgn Gubernur selaku Wakil Pemerintah	kali	40	50	50	50	50	50	50	50	
	1.5	Terwujudnya pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan	1	Tingkat penerapan teknologi informasi dalam administrasi kearsipan	SKPD	1	2	4	6	8	10	10	12	Kantor Arsip
	2		Tingkat pelayanan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat	Paket	20	50	75	100	125	150	150	160		
	3		Penyelamatan Arsip In Aktip	SKPD	12	13	15	18	21	24	24	27		
	1.6	Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai	1	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	%	57,5	60	65	75	90	100	100	100	Setda Bagian Umum, Bag Pemerintahan
	2		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemerintah	%	67,5	72,5	77,5	82,5	87,5	100	100	100		
	3		Terbangunnya gedung kantor di Kawasan Pemerintahan	buah	7	1	2	2	2	2	16	2	Bagian Pemerintahan dan Distarkim	
	1.7	Terwujudnya sistem informasi manajemen pemerintahan yang modern dan meningkatnya transparansi pelaksanaan pemerintahan	1	Web Site milik pemerintah daerah (updating fitur)	paket	1	26	13	13	13	13	26	13	Kantor Litbang dan PDE, Bag.Humas
	2		Diseminasi dan distribusi informasi	Berita	5000	5400	5625	5850	6075	6300	6000	6000		
	1.9	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berwawasan kedepan, transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.	1	Tingkat ketersediaan dan validitas informasi perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda, BPS
	2		Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah (Peserta Musrenbang)	orang	353	360	360	360	360	360	360	360	360	Bappeda
	3		Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan PERDA	ada/ tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
	4		Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA	ada/ tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	

			5	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan Perbup	ada/ tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
	1.1 0	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Tingkat penyerapan anggaran belanja daerah	%	92,36	92,5	92,75	93	93,3	93,7	94	94	DPPKAD
			2	Tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan, meliputi :	Buah	1	1	1	1	1	1	1	1	
			3	Opini BPK terhadap Lapkeu Daerah	WDP/W TP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	
			4	Proporsi belanja yang dialokasikan ke desa	%	2,98	3,25	3,29	3,32	3,37	3,38	3,4	3,4	
			5	Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah	%	77,07	78,67	80,21	81,70	83,12	84,47	84,47	85,74	
			6	Pertumbuhan PAD	%	5	5	5	5	5	5	5	5	
2. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintahan melalui kompetensi personil berbasis kinerja	2.1	Terpenuhinya kualitas / kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	1	Terpenuhinya keseimbangan rasio antara pegawai yang memenuhi kompetensi dengan jumlah jabatan yang ada.										BKPLD
				- Rasio pegawai yang memenuhi kompetensi jabatan struktural dengan jumlah jabatan struktural :										
				1) Eselon II	%	92,59	100	100	100	100	100	100	100	
				2) Eselon III	%	75,96	97,81	100	100	100	100	100	100	
				3) Eselon IV	%	32,44	33,66	100	100	100	100	100	100	
			2	- Rasio pegawai yang memenuhi kompetensi jabatan fungsional dengan jumlah jabatan fungsional :										
				1) Guru	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

			2) Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
			3) Fungsional lainnya	%	100	100	100	100	100	100	100	1000	
			2 - Jumlah aparatur yang telah mengikuti Diklat Teknis	Orang	98	0	400	300	230	250	250	250	
			3 Jumlah Aparatur desa yang telah mengikuti diklat	Orang	116	66	60	60	60	60	422	60	Bag Pemerintahan
			4 Jumlah aparatur desa yang mendapatkan jaminan/asuransi kesehatan	Orang	0	0	0	0	351	351	351	351	
			5 Jumlah insentif bagi aparatur desa (Kepala Desa, Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan, Kepala Dusun)	Rp.	11.095.200.000	12.244.800.000	15.809.400.000	15.809.400.000	15.809.400.000	15.809.400.000	15.809.400.000	15.809.400.000	
			6 Jumlah aparatur desa yang mendapatkan insentif (kades, kaur)	Orang	4458	4285	4454	4454	4454	4454	4454	4454	
3. Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme	3.1.	Mencegah terjadinya praktek KKN di lingkungan pemerintah dan masyarakat	1 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Obdit	168	142	142	142	142	142	142	142	Inspektorat
			2 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	%	54	75	85	100	100	100	100	100	
			3 Jumlah temuan hasil audit yang ditindaklanjuti	%	46	53	60	67	73	80	80	85	
			4 Jumlah LAKIP SKPD yang ditangani	Buah	3	3	6	6	16	26	26	26	
			5 Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	kali	1	1	1	1	1	1	5	1	
			6 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	orang	11	10	10	10	10	10	50	10	
4. Terwujudnya Penegakan Perda, Ketertiban umum dan ketentraman	4,1	Meningkatnya Penegakkan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan	1 Capaian Penurunan Pelanggaran Perda	Kegiatan	1	2	4	4	5	5	20	4	Kantor Pol PP dan Kesbanglinmas

masyarakat serta Perlindungan Masyarakat		Ketentraman serta perlindungan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat												
			2	Meningkatnya Jumlah Lokasi Ketertiban Umum yang di Bina.	Kegiatan	4	3	5	7	8	9	32	4	
			3	Jumlah Satuan Linmas yang aktif dan terlatih	Orang	1001	140	390	390	390	390	2701	390	kesbang
5. Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis serta pemantapan wawasan kebangsaan	5,1	Meningkatnya kehidupan berpolitik yang demokratis berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya, serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemantapan wawasan kebangsaan	1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu										Kantor Kesbanglinmas, KPU
				a. Pemilu Kada Bupati/Wakil Bupati	%	66,22 (2006)	66,92	0	0	0	0	66,92	70,05	
				b. Pemilu Kada Gubernur/Wakil Gubernur	%	68,28 (2008)	0	0	69	0	0	69	0	
				c. Pemilu kada Legislatip	%	75,25 (2009)	0	0	0	70	0	70	0	
				d. Pemilu Kada Presiden / Wapres	%	75,71 (2009)	0	0	0	70	0	70	0	
			2	Jumlah masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan	orang	1500	1550	1850	2150	2450	2750	2750	2800	
			3	Jumlah masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi kerukunan umat beragama	orang	750	750	1050	1350	1650	1950	1950	2250	
			4	Jumlah peserta bintek ormas/LSM	orang	250	250	350	500	650	800	800	950	

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB		
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015					
Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang berkelanjutan														
1. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang partisipatif sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat	1,1	Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang yang berkelanjutan	1	Tersusunnya Dokumen RTRW									Bappeda	
				Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah	Buah	1	-	-	-	-	1	1		
			2	Jumlah RDTR Kawasan Strategis Kabupaten	KSK	0	-	2	6	10	13	13	13	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
			3	Jumlah RTRK dan atau RTBL Kawasan Strategis, Kawasan Cepat tumbuh, potensial	RTR	1	1	2	3	4	5	5	5	
			4	Jumlah RDTR Kawasan Perkotaan	KP	1	4	5	6	7	8	8	8	
			5	Jumlah Zoning Regulation yang dapat disusun	ZR	3	3	5	7	9	11	11	11	
	1,2	Meningkatnya pengaturan rencana tata ruang wilayah yang konsisten	1	Jumlah Perda rencana tata ruang	Buah Perda	2	-	1	1	1	1	6	6	
2			Jumlah Juklak tentang rencana tata ruang.	Buah Perbup	1	1	1	3	5	7	7	7		
3			Jumlah Pedoman Operasional tentang pemanfaatan dan pengendalian tata Ruang	Buah	-	-	-	1	2	3	3	3		
	1,3	Meningkatnya pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah												

			1	Tersedianya tim monitoring yang bertugas mengawasi pemanfaatan ruang di lapangan	Tim	1	1	1	1	1	1	1	1	
			2	Tersedianya tim yang bertugas mengamankan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan pemanfaatan ruang	Tim	1	1	1	1	1	1	1	1	
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dengan memperhatikan pembangunan perdesaan	2,1	Tersedianya infrastruktur perdesaan yang memadai untuk memajukan perekonomian di wilayah perdesaan	1	Jumlah Alokasi Dana Des	Desa	351	351	351	351	351	351	351	351	Dinas Tarkim, Dinas Bina Marga dan Pengairan, BPMKB
			2	Panjang jalan desa yang dibangun / direhabilitasi	km	107	257	407	557	707	857	857	1007	BPMKB
			3	Jumlah cakupan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	%	10	20	30	40	50	60	60	70	
			4	Panjang saluran irigasi perdesaan yang dibangun / direhabilitasi	meter	750	1500	2000	2500	3000	3000	3000	1000	
			5	Prosentase cakupan pelayanan irigasi perdesaan	%	20	25	30	35	40	45	45	50	
			6	Jumlah saluran irigasi perdesaan yang dibangun / direhabilitasi	buah	50	52	54	56	58	60	60	62	
	2,2	Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman perdesaan yang tertib, aman dan nyaman	1	Jumlah dokumen perencanaan prasarana perdesaan (RPIJM : Jaringan Jalan, Air Limbah, Drainase, Persampahan)	Dokumen	0	1	5	9	13	17	17	17	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
			2	Prosentase cakupan pelayanan air bersih	%	35	40	45	50	55	60	60	65	
			3	Prosentase cakupan penduduk yang terlayani prasarana pengelolaan air limbah	%	5	10	15	20	25	30	30	35	
			4	Prosentase produk sampah yang tertangani	%	26	29	32	35	38	41	41	44	
	2,3	Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman perkotaan yang tertib, aman dan nyaman	1	Jumlah dokumen perencanaan prasarana perkotaan (Jaringan Jalan, Air Bersih, Air Limbah, Drainase, Persampahan)	Dokumen	2	3	4	5	6	7	7	7	Dinas Tata Ruang dan Permukiman

			2	Prosentase luas Jalan Lingkungan terhadap luas wilayah perkotaan	%	25	28	31	34	37	40	40	43	
			3	Prosentasi Penataan dan Pembangunan Kawasan Fungsional Ibukota Pemerintahan	%	5	5	15	25	35	45	45	65	
			4	Prosentase luas cakupan pelayanan prasarana air limbah terhadap luas wilayah perkotaan	%	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	52,5	54	
			5	Prosentase luas cakupan pelayanan persampahan terhadap luas wilayah perkotaan	%	35	40	45	50	55	60	60	65	
			6	Prosentase cakupan pelayanan air minum terhadap jumlah penduduk perkotaan	%	40	45	50	55	60	65	65	70	
			7	Jumlah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (Taman dan Pemakaman Umum)	Lokasi	4	5	6	7	8	9	9	9	
			8	Tingkat pelayanan terhadap bahaya kebakaran	%	-	10	15	20	25	30	30	35	
	2,4	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana perumahan yang layak huni serta sehat												Dinas Tata Ruang dan Permukiman
			1	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi/pembangunan baru	Unit	-	150	300	450	600	750	750	150	
			2	Prosentase Jumlah rumah yang menggunakan air bersih	%	38	42	46	50	54	58	58	60	
	2,5	Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi antar wilayah	1	Terbangunnya jalan Ciawi-Singaparna	%	50	55	60	65	70	100	100	100	
			2	Kondisi jalan kabupaten :	km	1303,323	1303,323	1303,323	1303,323	1303,323	1303,323	1303,323	1303,323	Dinas Bina Marga dan Pengairan
				1. Kondisi Baik.	km	340,855	370,855	410,855	450,855	490,855	530,855	530,855	550,85	.
				2. Kondisi sedang	km	270,958	160,958	130,958	100,958	70,958	40,958	40,958	39,958	
				3. Kondisi rusak ringan	km	269,635	369,635	379,635	389,635	399,635	409,635	409,635	410,64	

			4. Kondisi rusak berat	km	421,875	401,875	381,875	361,875	341,875	321,875	321,875	301,875	
			Kondisi jembatan kabupaten :	buah	392	435	435	435	435	435	435	435	
			1. Kondisi Baik.	buah	337	339	345	350	355	360	360	364	
			2. Kondisi sedang	buah	11	10	9	8	7	6	6	6	
			3. Kondisi rusak ringan	buah	23	20	17	15	13	11	11	10	
			4. Kondisi rusak berat	buah	21	66	64	62	60	58	58	55	
			3 Jumlah pembangunan jembatan ruas jalan Ciawi-Singaparna, Jembatan masuk RSUD da Jembatan pada ruas jalan strategis Kabupaten	buah	11	19	22	25	28	28	28	30	
			4 Panjang peningkatan jalan	km	30	30	30	35	35	40	170	40	
			5 Panjang jalan yang ditangani melalui kegiatan rehabilitasi jalan	km	75	45	45	50	50	50	240	50	
			6 Banyaknya jembatan yang ditangani melalui rehabilitasi jembatan	buah	2	1	5	5	5	5	21	5	
	2,6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengairan	1 Jumlah Daerah Irigasi	buah	272	272	272	1494	1494	1494	1494	1486	Dinas Bina Marga dan Pengairan
			1. Jumlah DI yang dikelola oleh Kabupaten (layanan luas areal s/d 1.000ha)	buah	264	264	264	1486	1486	1486	1486	1474	
			2. Jumlah DI yang dikelola oleh Propinsi (lintas kabupaten)	buah	6	6	6	6	6	6	6	10	
			3. Jumlah DI Strategis	buah	2	2	2	2	2	2	2	2	
			2 Jumlah Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi	buah DI	30	30	30	30	30	30	150	30	
			3 Jumlah Sumur Pantek/Bor	unit	31	36	41	46	51	56	56	30	Dinas Pertambangan dan Energi
			4 Jumlah Penurunan Mata Air	buah	4	6	8	10	12	14	14	10	
	2,7	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan											Dinas Perhubungan

			1	Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan infomatika	Unit	-	-	1	2	0	3	6	4	
			2	Peningkatan prasarana dan infrastruktur komunikasi dan informatika	Kegiatan	-	-	-	1	-	5	6	2	
			3	Pembangunan sarana dan prasarana LLAJ	unit	-	-	1	2	0	3	6	4	
			4	Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan	%	33	33	38	40	50	60	60	70	
			5	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	
			6	Peningkatan pelayanan umum angkutan jalan	Kegiatan	-	-	2	2	-	5	6	1	
			7	Peningkatan kualitas SDM Bidang LLAJ	Kegiatan	-	-	-	-	-	4	4	3	
			8	Peningkatan kesadaran hukum berkendara	Kegiatan	2	2	3	3	3	3	3	3	
3. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan berawasan lingkungan	3,1	Terpeliharanya kualitas lingkungan serta pencegahan dan penanggulangan kerusakan/pencemaran lingkungan												Dinas Pertambangan dan Energi
			1	Jumlah perusahaan yang memiliki IPAL	buah	105	110	115	120	125	130	130	135	Kantor Lingkungan Hidup
			3	Jumlah kendaraan dinas yang sudah memiliki hasil tes uji emisi udara	buah	100	100	100	100	100	100	100	100	
			3	Jumlah tenaga pengawas pengendali pencemaran dan perusakan lingkungan	buah	1	2	3	4	5	6	6	8	
			4	Jumlah Sumber mata air yang dikonservasi	buah	5	-	10	15	20	25	25	27	
			5	Jumlah dan cakupan pengujian kualitas lingkungan	Buah									
				- Kualitas air	sungai	10	10	10	10	10	10	10	10	
				- Kualitas udara (bergerak)	titik	1	5	5	5	5	5	5	5	

4. Meningkatkan Ketersediaan Energi	4,1	Meningkatnya ketersediaan energi terutama untuk daerah perdesaan	1	Jumlah jaringan listrik yang dibangun									Dinas Pertambangan dan Energi
				- JTM	M	102.734	1.892	9.082	10.500	9.094	7.369	37.937	6.026
				- JTR	M	164.737	15.714	28.340	2.644	41.715	50.236	138.649	27.343
				- Trafo	buah	49	8	11	12	12	8	51	10
			2	Jumlah Pelanggan listrik	KK	248	1.594	1.455	1.639	2.241	2.056	8.985	1.095
			3	Jumlah desa yang terjangkau pelayanan listrik	desa	351	351	351	351	351	351	351	351
			4	Jumlah Penerangan Sarana umum	unit	98	100	150	170	180	200	200	200
			5	Jumlah SR IR keluarga miskin	KK	-	-	1000	1000	1000	500	3500	50
5. Meningkatkan Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	5,1	Terlaksananya mitigasi dan penanggulangan bencana alam	1	Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah	SKPD	0	1	-	-	-	-	1	Badan Penanggulan n Bencana Daerah
			2	Tersedianya Dokumen Mitigasi Bencana Alam Kab Tasikmalaya	dokumen	0	0	1	1	1	1	5	5
			3	Prosentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	0	0	60	70	80	90	90	90
			4	Posentase Penanganan Rehab/rekonstruksi	%	0	0	30	40	50	60	60	60
			5	Relawan penanggulangan bencana	Orang	0	0	100	250	250	250	250	110

BAB IX

PEDOMAN TRANSISI DAN KAJDAH PELAKSANAAN

9.1. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 akan menjadi pedoman penyusunan rencana sampai dengan tahun 2015. Sedangkan untuk perencanaan pembangunan tahun 2016 tetap mengacu RPJM Daerah Tahun 2011-2015, sebelum ditetapkannya RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020. Oleh karena itu dalam penyusunan RPJMD ini ditambahkan rancangan program dan target indikator kinerja untuk satu tahun ke depan, yaitu tahun 2016. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPDP setelah RPJMD berakhir.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan tahun 2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015, diperlukan kaidah pelaksanaan yang menjamin terciptanya tata pemerintahan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (RPJMD) Tahun 2011-2015 dengan sebaik-baiknya,serta menjamin konsistensi antara RPJP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 dengan RPJMD 2011-2015, Renstra SKPD, dan RKPD

2. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya agar melaksanakan program dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 dengan sebaik-baiknya;
3. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015. Hal tersebut dimaksudkan agar program-program yang direncanakan dalam renstra SKPD dapat terintegrasi dengan baik dengan RPJMD, sehingga diharapkan visi dan misi pada tahun 2015 dapat dicapai.
4. RPJM Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 untuk setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya harus berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya.
5. Penyusunan RKPD Kabupaten Tasikmalaya harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.

6. RKPD Kabupaten Tasikmalaya akan menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja.
7. RKPD Kabupaten Tasikmalaya merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya.
8. Renja SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
9. Dalam melaksanakan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2011-2015 setiap SKPD perlu memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
10. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan dasar evaluasi dalam laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan.

BAB X

PE N U T U P

Proses pembangunan pada dasarnya merupakan proses yang berkesinambungan, berlangsung secara terus menerus. Karena itu RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015, memiliki kesinambungan dengan program pembangunan pemerintahan sebelumnya, serta mengacu kepada dokumen perencanaan jangka panjang. RPJM Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan RPJP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025.

Sebagai proses yang terus menerus maka RPJMD senantiasa membuka diri untuk dilakukan evaluasi baik dari sisi formulasi/substansi, implementasi dan dampaknya. Oleh karena itu, dokumen RPJMD Perubahan ini dihadirkan dalam kerangka perbaikan formulasi perencanaan dan diharapkan berimbas pada perbaikan dampak, yang pada intinya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan janji politik yang diikrarkan pada saat kampanye. Guna memenuhi janjinya, Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah menetapkan prioritas pembangunan melalui suatu Gerakan Bangun Desa (Gerbang Desa) Kabupaten Tasikmalaya yaitu:

1. Peningkatan kesejahteraan petani, buruh tani, nelayan dan aparaturnya.

2. Peningkatan Jalan Desa
3. Listrik Masuk Desa
4. Irigasi, air bersih perdesaan dan sanitasi lingkungan perdesaan
5. Telekomunikasi dan informasi masuk desa

Tiga tahun pelaksanaan janji politik di atas, sisa dua tahun pemerintahan akan lebih difokuskan pada perluasan dan pendalaman dampak pelaksanaan Gerbang Desa. Sehingga pada akhir masa pemerintahan nanti tercipta kondisi dimana petani dan buruh serta nelayan naik pendapatannya, bisa menyekolahkan anaknya, terpelihara kesehatannya. Seperti halnya dua tahun terakhir, di masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati diharapkan ada kenyamanan bekerja yang dirasakan aparat desa karena terjamin kesehatannya dengan Jaminan Kesehatan Daerah, bekerja dan melayani masyarakat dengan baik karena Alokasi Dana Desa makin besar dan terjaminnya pendanaan pembangunan desa.

Prioritas pembangunan tersebut disinergikan dengan program-program lain guna mencapai visi besar Kabupaten Tasikmalaya yang hendak dicapai pada tahun 2015 yaitu: “**Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan**”. Untuk pencapaian misi tersebut dilaksanakan 4 misi, yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlaqulkarimah, Berkualitas dan Mandiri

2. Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dengan Keunggulan Agribisnis
3. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
4. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang Berkelanjutan.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Renstra OPD, RKPD, Renja OPD dan perencanaan penganggaran, guna mewujudkan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya yang sinergis, terpadu, berkesinambungan.

Betapapun baiknya sebuah proses penyusunan dan perubahan RPJMD, tidak akan memiliki makna yang berarti bila tidak diimplementasikan dengan baik. Keberhasilan implementasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya sangat tergantung dari kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Propinsi Jawa Barat serta seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu Tahun 2011-2015.

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

UU RUZHANUL ULUM